



**RENCANA KERJA (RENJA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2018**



---

# ***RENJA***

*RENCANA KERJA*

---

# **SETDA**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TAHUN 2018**





---

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 .....</b>	<b>6</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2016 .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Setda .....	36
2.2.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kab. Temanggung .....	36
2.2.2 Susunan Kepegawaian .....	39
2.2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana .....	40
2.2.4 Capaian Kinerja Pelayanan Setda .....	40
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda .....	43
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	44
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2018 .....</b>	<b>56</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	56
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Setda .....	58
3.3 Program dan Kegiatan .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>

**LAMPIRAN I**

Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Setda kabupaten Temanggung dan Perkiraan Maju Tahun 2019

---

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017. Rencana Kerja (RENJA) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2015, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Rencana Kinerja Tahunan ini juga merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2013–2018. Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2017 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan. Pada tahun 2017 Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung merencanakan 43 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 142 kegiatan baik belanja langsung maupun tidak langsung untuk mencapai 28 urusan yang ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) dengan total anggaran sebesar Rp 89.319.904.075,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 17.808.850.000,- dan belanja langsung sebesar Rp 71.511.054.075,-.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah ini dibuat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2017.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. BAMBANG AROCHMAN, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580628 198703 1 005

---

**DAFTAR TABEL**

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Th. 2016 .....	6
Pegawai menurut jenis jabatan .....	39
Pegawai menurut jenis pendidikan .....	39
Sarana dan Prasarana .....	40
Pencapaian Kinerja .....	40
Sebelum dan sesudah desk .....	45

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018. Rencana Kerja (RENJA) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Rencana Kinerja Tahunan ini juga merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2013–2018. Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2018 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan. Pada tahun 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung merencanakan 35 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 100 kegiatan baik belanja langsung maupun tidak langsung untuk mencapai 12 urusan dengan total anggaran sebesar Rp 98.549.731.508,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 42.652.231.508,- dan belanja langsung sebesar Rp 55.897.500.000,-.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

---



Demikian Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah ini dibuat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. BAMBANG AROCHMAN, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580628 198703 1 005

## LAMPIRAN

# **Usulan Program dan Kegiatan Setda kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019**

---

**HALAMAN VERIVIKASI**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2018**

Disusun oleh:

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah ditelitidan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 2017

Koordinator Bidang Pemerintahan

Petugas Verifikator

DANANG PURWANTO, S.Sos, M.Si

NIP. 19690501 199603 1 003

NURSARI SUGIASTUTI, A. Ks

NIP. 19730819 200604 2 001

Mengetahui,  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. BAMBANG DEWANTORO

Pembina Utama Muda

NIP. 19581023 198503 1 005



# **RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018**

---



# ***RENJA***

**RENCANA KERJA**

---

# **SETDA**

## **KABUPATEN TEMANGGUNG**

### **TAHUN 2018**

**DAFTAR ISI**

---

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 .....</b>	<b>6</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2016 .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Setda .....	36
2.2.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kab. Temanggung .....	36
2.2.2 Susunan Kepegawaian .....	39
2.2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana .....	40
2.2.4 Capaian Kinerja Pelayanan Setda .....	40
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda .....	43
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	44
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2018 .....</b>	<b>56</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	56
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Setda .....	58
3.3 Program dan Kegiatan .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>

#### LAMPIRAN I

Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Setda kabupaten Temanggung dan Perkiraan Maju Tahun 2019

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017. Rencana Kerja (RENJA) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2015, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Rencana Kinerja Tahunan ini juga merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2013–2018. Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2017 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan. Pada tahun 2017 Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung merencanakan 43 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 142 kegiatan baik belanja langsung maupun tidak langsung untuk mencapai 28 urusan yang ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) dengan total anggaran sebesar Rp 89.319.904.075,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 17.808.850.000,- dan belanja langsung sebesar Rp 71.511.054.075,-.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah ini dibuat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2017.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. BAMBANG AROCHMAN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19580628 198703 1 005

## DAFTAR TABEL

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Th. 2016 .....	6
Pegawai menurut jenis jabatan .....	39

Pegawai menurut jenis pendidikan .....	39
Sarana dan Prasarana .....	40
Pencapaian Kinerja .....	40
Sebelum dan sesudah desk .....	45

#### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018. Rencana Kerja (RENJA) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan

Sekretariat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Rencana Kinerja Tahunan ini juga merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2013–2018. Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2018 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan. Pada tahun 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung merencanakan 35 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 100 kegiatan baik belanja langsung maupun tidak langsung untuk mencapai 12 urusan dengan total anggaran sebesar Rp 98.549.731.508,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 42.652.231.508,- dan belanja langsung sebesar Rp 55.897.500.000,-.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah ini dibuat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. BAMBANG AROCHMAN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19580628 198703 1 005

## **LAMPIRAN**

# **Usulan Program dan Kegiatan Setda kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019**





**HALAMAN VERIVIKASI**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2018**

Disusun oleh:  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah ditelitidan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 2017

Koordinator Bidang Pemerintahan

Petugas Verifikator

DANANG PURWANTO, S.Sos, M.Si

NIP. 19690501 199603 1 003

NURSARI SUGIASTUTI, A. Ks

NIP. 19730819 200604 2 001

Mengetahui,  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. BAMBANG DEWANTORO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581023 198503 1 005

**BAB I**

---

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Undang-undang ini juga mengamanatkan penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk didalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman RPJMD Daerah setiap 5 tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berfungsi sebagai penjabaran RPJP daerah dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal arah kebijakan strategi dan indikasi program 5 tahun secara lintas pembiayaan.
3. Rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahunnya.

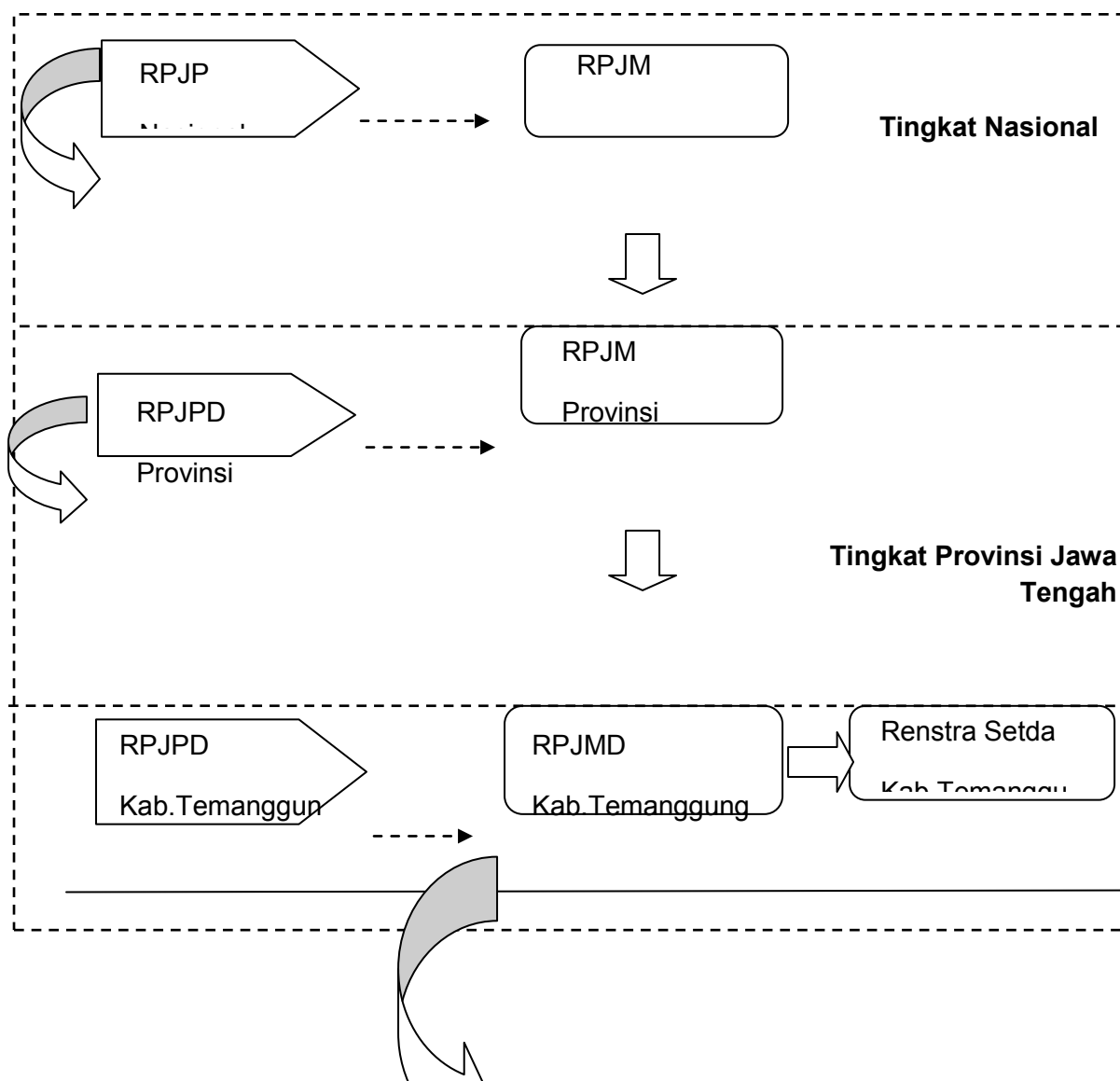
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sehingga sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Penyusunan rencana pembangunan daerah tersebut selain mengacu kepada perencanaan pembangunan nasional juga wajib memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya RPJMD Kab. Temanggung akan menjadi dasar bagi penyusunan RKPD Kab. Temanggung setiap tahunnya, Renstra SKPD untuk periode 5 tahun kedepan, dan Renja SKPD setiap tahunnya.

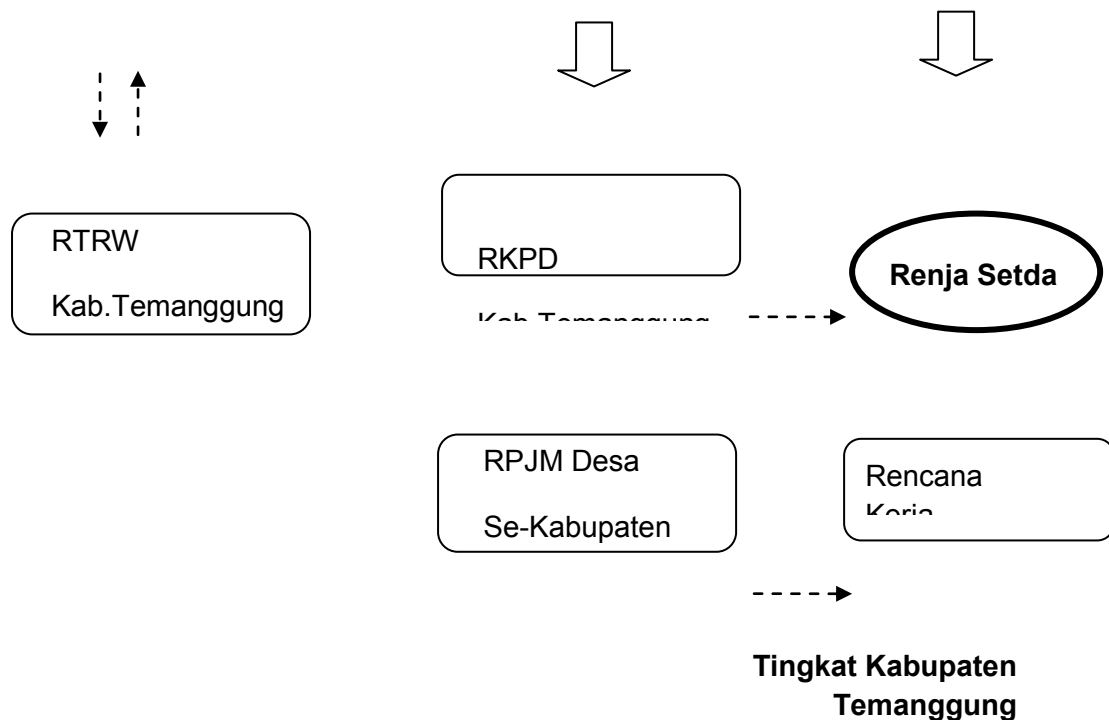
Dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah Kabupaten Temanggung yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 dimana setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi dan juga partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan di daerah. Koordinasi perencanaan pembangunan daerah sebagai awal dari proses penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai kedudukan strategis dan fungsi yang penting dalam optimalisasi perencanaan guna meningkatkan sinkronisasi dan konsistensi dalam mencapai tujuan.

Perangkat Daerah menyusun 2 dokumen perencanaan yaitu Perencanaan Strategis (Renstra) perangkat daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan jangka waktu satu tahun pada tahun 2018. Dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, maka penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 dilaksanakan secara matang dengan memperhatikan prinsip prioritas dan efisiensi anggaran, tetap memperhatikan alokasi anggaran tahun 2018 dan kinerja anggaran tahun 2017.

Bagan hubungan Renja Setda dengan Dokumen Perencanaan lainnya:





Rencana Kerja/ Kegiatan yang akan dilaksanakan disusun secara terperinci sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019.
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018 sebagai berikut:

1. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
2. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efektif dan efisiensi serta menjamin adanya kesinambungan program dari waktu ke waktu.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah

##### 1.1 Latar Belakang

##### 1.2 Landasan Hukum

##### 1.3 Maksud dan Tujuan

##### 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2016
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2018**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

## **BAB IV PENUTUP**

## **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2016**

Tahun 2016 merupakan tahun ke tujuh dari pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Secara keseluruhan tahun anggaran 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang lalu memperoleh alokasi dana



APBD sebesar Rp. 95.037.052.750,- yang terbagi dalam kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja langsung : Rp. 81.655.934.650,-

2. Belanja tidak langsung : Rp. 13.381.118.100,-

Perlu dijelaskan disini bahwa komponen belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai. Sedangkan komponen belanja langsung berbentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat daerah, sehingga anggaran tersebut diupayakan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang diemban Sekretariat Daerah.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2016, dapat dilihat beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya telah memenuhi target, melebihi target, dan yang tidak memenuhi target sebagaimana table sebagai berikut.

Tabel 2.1

## Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi Keuangan	Target	Realisasi Kinerja	%
		Pagu Renja	Pagu DPA				
	<b>PEMUM</b>						
1	<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah</b>						
1	Pengadaan Tanah Pemerintah	8.925.000.00 0	18.546.074.50 0	16.839.401.167	38.426 M2	37.218 M2	96 %
2	Pensertifikatan Tanah Pemda	250.000.000	244.468.500	179.149.740	92 %	92 %	100 %
3	Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum	0	485.000.000	24.722.000	56 M2	0	0
2	<b>Program Penyelesaian Konflik Konflik-Konflik Pertanahan</b>						
1	Penanganan Permasalahan/Sengketa Tanah	30.000.000	27.405.000	23.865.000	100 %	100 %	100 %

<b>3</b>	<b>Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>						
1	Koordinasi Keamanan Daerah	130.000.000	126.946.500	124.846.500	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
<b>4</b>	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>						
1	Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal	35.000.000	18.839.600	18.679.600	97 %	97 %	100 %
2	Inventarisasi dan serah terima P3D	0	100.000.000	95.950.000	1 dokumen	1 dokumen	100 %
3	Pembuatan dan Publikasi LPPD, LKPJ, AMJ dan memori jabatan	170.000.000	154.860.000	153.330.000	100 %	100 %	100 %
<b>5</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>						
1	Fasilitasi Sosialisasi Batas Wilayah Hasil Pemetaan Badan Informasi Geospasial (BIG)	0	89.045.000	89.045.000	20 kecamatan	20 kecamatan	100 %
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>						
1	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan	25.000.000	113.430.000	113.047.500	50 %	50 %	100 %
<b>7</b>	<b>Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>						
1	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	0	316.386.000	250.197.000	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %
<b>8</b>	<b>Program Kerjasama Daerah</b>						
1	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah melalui Fasilitasi dan Monev Kerjasama	30.000.000	16.428.000	16.188.000	1 dokumen	1 dokumen	100 %
<b>9</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>						

1	Lelang tanah bekas bengkok kelurahan	50.000.000	41.329.000	41.254.000	1.050.000 .000	1.377.804 .000	131 %
	<b>BAGIAN PEMDES</b>						
<b>1</b>	<b>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>						
1	fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa	20.000.000	20.000.000	19.253.900	5 bidang	5 bidang	100 %
2	Identifikasi Data Alih Fungsi dan Penyusunan Tataguna Tanah Kas Desa	0	50.815.000	50.728.150	266 desa	266 desa	100 %
<b>2</b>	<b>Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>						
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa	20.000.000	14.125.000	14.125.000	15 Raperdes	15 Raperdes	100 %
2	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan Bupati kepada Desa	0	15.000.000	12.405.000	4 buku	4 buku	100 %
<b>3</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>						
1	Pembekalan Tugas Kepala Desa	250.000.000	224.480.000	223.018.000	35 orang	36 orang	102 %
2	Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa	50.000.000	49.851.000	41.660.000	75 orang	190 orang	253 %
3	Pembinaan Adminitrasi Desa	6	54.340.000	39.925.000	266 desa	266 desa	100 %
4	Penguatan Kekayaan Desa	900.000.000	76.965.000	71.364.000	266 desa	266 desa	100 %
5	Fasilitasi Pendampingan dan Eksistensi APBDesa dan Barang Pengadaan Barang dan Jasa	400.000.000	358.214.000	323.437.190	266 desa	266 desa	100 %
6	Fasilitasi Pengisian Kepala Desa	250.000	248.943.750	230.746.750	35 orang	36 orang	102 %

7	Bintek Perangkat Desa	150.000.000	140.705.000	127.800.000	266 desa	266 desa	100 %
4	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>						
1	Penatausahaan Keuangan Desa	60.000.000	121.201.900	117.065.375	266 desa	266 desa	100 %
2	Penguatan Keuangan Desa	60.000.000	59.641.000	57.547.000	266 desa	266 desa	100 %
	<b>HUKUM</b>						
1	<b>Penataan peraturan perundang-undangan</b>						
1	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	65.000.000	64.997.000		10 dokumen	11 dokumen	110%
2	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	100.000.000	94.117.000	92.799.363	12	12	100 %
3	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	125.000.000	104.610.000		15 dokumen	26 dokumen	173 %
4	Dokumentasi dan informasi hukum	40.000.000	29.053.000		60	60	100%
5	Pengelolaan sjudi hukum dan pembinaan di 20 kecamatan	25.000.000	24.980.000		20 kecamatan	20 kecamatan	100 %
6	Pelayanan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan	334.698.000	334.698.000		10 kasus	10 kasus	100%
7	Rencana aksi nasional hak asasi manusia	18.000.000	17.999.000		1 kegiatan	1 kegiatan	100 %

8	Peningkatan kesadaran hukum	41.899.500	41.988.500		20 kecamatan	20 kecamatan	100 %
<b>BAGIAN HUMAS</b>							
1	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>						
1	Penyusunan Raperda Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal	50.000.000	50.000.000	48.529.760	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2	Penyusunan Perbup LPPL TV Temanggung dan Revisi Perbup LPPL Radio Temanggung	25.000.000	25.000.000	24.845.000	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa</b>						
1	Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala	150.000.000	149.302.000	146.140.920	18.000 eksemplar	18.000 eksemplar	100 %
2	Lembaga Penyiaran Publik Lokal	225.000.000	245.315.300	231.703.895	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %
3	Pengelolaan Webside Kabupaten Temanggung	75.000.000	72.832.500	66.470.960	5.200 kegiatan	5.142 kegiatan	98,8 %
4	Pengisian Materi Videotron	10.000.000	0	0	0	0	0
5	Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi dan Media Massa Bagi Masyarakat	150.000.000	324.070.000	318.624.530	20 kegiatan	31 kegiatan	155 %
6	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	140.000.000	139.300.000	134.058.280	5.400 kegiatan	4.816 kegiatan	89,1 %
7	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat (Press Tour)	200.000.000	249.070.000	246.305.700	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %

8	Penyelenggaraan Kehumasan	50.000.000	238.357.500	215.579.060	700 kegiatan	700 kegiatan	100 %
9	Pembuatan Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung	100.000.000	119.360.000	109.859.800	1.000 eksemplar	1.500 eksemplar	150 %
10	Fasilitasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi dan Radio Lokal	6.000.000.000	6.993.352.500	6.710.694.860	1 paket	1 paket	100 %
<b>KESRA</b>							
<b>1</b>	<b>Pendidikan Non Formal</b>						
	Pemberian bantuan siswa dan masyarakat berprestasi	150.000.000	150.000.000	147.434.200	150 orang	150 orang	100 %
<b>Peningkatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>							
	Pemberian Bantuan Kesejahteraan Wiyata Bhakti Pendidikan	5.250.000.000	85.645.000	14.499.778	1.680 orang	560 orang	33 %
<b>Upaya Kesehatan Masyarakat</b>							
	Kegiatan Rakor TP UKS Kabupaten Temanggung	50.000.000	50.000.000	42.923.776	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
<b>Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>							
	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.000.000	15.000.000	14.937.300	6 kegiatan	6 kegiatan	100 %
<b>Pengembangan Nilai Keagamaan</b>							
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	570.000.000	569.530.000	527.788.560	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
	Penyelenggaraan MTQ	327.000.000	398.250.000	357.890.787	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %

	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	300.000.000	298.460.000	267.997.566	9 kegiatan	9 kegiatan	100 %
	Pelatihan Guru TPQ dan Badan Koordinasi TPQ	30.000.000	30.000.000	28.398.400	260 orang	260 orang	100 %
	Pelatihan Manajemen Masjid	50.000.000	48.760.000	37.209.450	200 orang	200 orang	100 %
	Fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan sosial/hibah	120.000.000	151.950.000	108.582.150	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %
	Silaturahmi Aparatur bersama masyarakat	0	561.185.000	479.834.572	38 kegiatan	38 kegiatan	100 %
<b>Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>							
	Fasilitasi Olahraga di Lingkungan Pemerintah Daerah	50.000.000	46.950.000	35.471.830	20 kali	16 kali	80 %
<b>PEREKONOMIAN</b>							
1	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						
1	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	129.810.800	129.810.800	105.556.443	12 bulan	12 bulan	100 %
2	Koordinasi Pelaksanaan TPID	44.997.000	44.997.000	37.590.328	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
3	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)	200.000.000	200.000.000	190.901.245	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %
2	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan &amp; Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>						
1	Monitoring Program Kredit Lunak	11.368.850	11.368.850	11.234.500	140 sasaran	140 sasaran	100 %
3	<b>Program Peningkatan &amp; Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>						
1	Pembinaan & Evaluasi BUMD	119.943.500	119.943.500	112.861.684	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %

2	Fasilitasi Manajemen Organisasi BUM	23.785.000	23.785.000	22.841.680	5 BUMD	5 BUMD	100 %
3	Fasilitasi Penyertaan Modal	21.647.500	21.647.500	20.902.654	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
4	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>						
1	Koordinasi Pendampingan Program RASKIN	900.000.000	899.547.600	827.789.419	12 distribusi	14 distribusi	116 %
5	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>						
1	Koordinasi Pengawasan Program LPG 3 KG	24.999.500	24.999.500	21.016.500	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %
	<b>PEMBANGUNAN</b>						
1	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						
1	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	750.000,00	690.000,00	689.750	12 bulan	12 bulan	100%
2	Fasilitasi Perencanaan Dana DAK, Tugas Pembantuan dan Banyuan Dana Pusat Lainnya kepada Kabupaten	16.500.000,0 0	16.939.000,00	13.450.900	12 bulan	12 bulan	100%
2	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>						
1	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan (Pengendalian Program)	66.000.000,0 0	124.982.500,0 0	66.117.100	12 bulan	12 bulan	100%
3	<b>Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>						
1	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung	66.000.000,0 0	72.556.000,00	67.523.750	12 bulan	12 bulan	100%



2	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung Melebihi Tahun Anggaran	0,00	14.934.000,00	10.822.500	3 bulan	3 bulan	100%
4	<b>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>						
1	Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	223.300.000,00	631.686.500,00	474.341.895	12 bulan	12 bulan	100%
2	Peningkatan Sarana LPSE	53.895.000,00	184.675.000,00	171.718.320	12 bulan	12 bulan	100%
3	Peningkatan SDM Pengelola LPSE dan ULP	60.500.000,00	65.350.000,00	37.044.400	12 bulan	12 bulan	100%
	<b>UMUM</b>						
1	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000.00	13.366.464.00	13.318.296.084	12 bulan	12 bulan	100 %
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	800.000.000	818.000.000	771.959.028	12 bulan	12 bulan	100 %
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	797.000.000	797.000.000	735.571.500	12 bulan	12 bulan	100 %
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	95.000.000	95.000.000	94.294.000	12 bulan	12 bulan	100 %
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	94.300.000	94.300.000	89.743.530	12 bulan	12 bulan	100 %
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	198.750.000	203.750.000	182.106.237	12 bulan	12 bulan	100 %
7	Penyediaan Komponen	95.000.000	100.000.000	99.995.000	12 bulan	12 bulan	100 %

	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	98.000.000	98.000.000	86.485.800	12 bulan	12 bulan	100 %
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	2.250.000.00 0	2.535.000.000	2.461.336.96 9	12 bulan	12 bulan	100 %
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2.850.000.00 0	3.924.500.000	3.771.017.39 6	12 bulan	12 bulan	100 %
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	40.000.000	40.000.000	37.950.000	12 bulan	12 bulan	100 %
12	Jasa Pelayanan Perkantoran	586.000.000	663.000.000	576.606.890	12 bulan	12 bulan	100 %
13	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	4.500.000.00 0	4.500.000.000	3.912.188.00 0	12 bulan	12 bulan	100 %
<b>2</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.619.987.00 0	7.619.987.000	7.584.113.39 0	12 bulan	12 bulan	100 %
2	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	467.810.000	866.210.000	807.332.500	12 bulan	12 bulan	100 %
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	258.700.000	342.800.000	319.019.200	12 bulan	12 bulan	100 %
4	Pengadaan Meubelair	178.675.000	188.675.000	185.675.000	12 bulan	12 bulan	100 %
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	671.910.000	778.910.000	713.732.642	12 bulan	12 bulan	100 %
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	620.000.000	805.750.000	768.545.624	12 bulan	12 bulan	100 %
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan	81.000.000	81.000.000	80.893.250	12 bulan	12 bulan	100 %

	Gedung Kantor						
<b>3</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>						
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	553.850.000	218.850.000	118.120.000	12 bulan	12 bulan	100 %
2	Pengadaan mesin/kartu absensi	335.000.000	335.000.000	226.613.000	12 bulan	12 bulan	100 %
<b>4</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>						
1	Kepesertaan APKASI	25.000.000	25.000.000	25.000.000	12 bulan	12 bulan	100 %
2	Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/LP ND dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	4.500.000.00 0	4.060.000.000	3.975.527.35 0	12 bulan	12 bulan	100 %
<b>ORTALA</b>							
<b>1</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						
1	Penyusunan LAKIP Kabupaten	47.500.000	47.430.000	46.317.900	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2	Penyusunan LAKIP dan PK SETDA	3.000.000	3.000.000	2.879.400	1 dokumen	1 dokumen	100 %
3	Penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati	25.000.000	25.000.000	24.060.900	1 dokumen	1 dokumen	100 %
<b>2</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>						
1	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	50.000.000	49.700.000	49.419.750	54 dokumen	54 dokumen	100 %
2	Penyusunan Standar Operating Prosedur	100.000.000	139.980.000	138.860.400	150 dokumen	150 dokumen	100 %
3	Pembinaan Pelayanan Publik	90.000.000	80.490.000	62.875.000	3 dokumen	3 dokumen	100 %
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pelayanan	30.000.000	47.700.000	27.434.600	1 dokumen	1 dokumen	100 %

	Publik						
5	Partisipasi Lomba Pelayanan Publik	30.000.000	29.150.000	22.587.700	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
6	Penyusunan Perda SOTK dan Perbup SOTK	0	183.350.000	177.484.040	2 dokumen	2 dokumen	100 %
7	Review Roadmap reformasi birokrasi	15.000.000	10.240.000	7.146.400	1 dokumen	1 dokumen	100 %
<b>3</b>	<b>Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>						
1	Penanganan Pengaduan Pelayanan	40.000.000	58.110.000	53.285.000	73	Unit	100 %
2	Pelatihan Pelayanan Prima	120.000.000	148.855.000	146.465.360	81	SKPD	100 %
<b>4</b>	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH</b>						
1	Pengembangan Budaya Kerja dan Integritas Aparatur	25.000.000	25.000.000	20.077.900	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
2	Evaluasi Lima Hari Kerja	0	24.825.000	16.426.400	1 dokumen	1 dokumen	100 %
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>						
1	Penyusunan Buku Standar Indeks Harga	95.000.000	302.635.000	227.910.000	1 dokumen	1 dokumen	100 %
<b>6</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>						
1	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	125.000.000	174.490.000	125.154.700	150 unit kerja	150 unit kerja	100 %
2	Evaluasi Jabatan	100.000.000	49.515.000	23.984.900	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	<b>SANTELPDE</b>						
<b>1</b>	<b>Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Masa</b>						
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan	50.000.000	46.220.000	46.220.000	12 bulan	12 bulan	100 %

	Komunikasi dan Informasi						
2	Pengadaan Jaringan LPSE dan Online SKPD	850.000.000	500.000.000	490.673.995	50 mbps	50 mbps	100 %
2	<b>Pengembangan Komunikasi dan Informasi</b>						
1	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	75.000.000	70.886.000	63.635.000	12 bulan	12 bulan	100 %
2	Pengadaan Jaringan Komunikasi	650.000.000	601.848.000	583.561.053	1 pusat jaringan online	1 pusat jaringan online	100 %
3	Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, Alat Pengolah Data Elektronik dan Jaringan Komunikasi	100.000.000	50.000.000	49.563.400	100 %	100 %	100 %
4	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Berdaya Guna	15.000.000	15.000.000	15.000.000	5 operator	5 operator	100 %
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana alat pengolah data elektronik	50.000.000	48.900.000	46.699.000	3 unit	3 unit	100 %
6	Monitoring dan Evaluasi Penerapan e-Government Kabupaten Temanggung	15.000.000	9.325.000	2.552.500	35 skpd	35 skpd	100 %
7	Penataan Domain dan Subdomain SKPD	150.000.000	145.765.000	128.796.700	20 skpd	20 skpd	100 %
8	Koordinasi Penyusunan Asesment IT Kabupaten Temanggung	75.000.000	75.000.000	63.748.750	1 dok	1 dok	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang telah memenuhi target kinerja kegiatan (tercapai 100%) sebanyak 27 program dan 110 Kegiatan yaitu:

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
  1. Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah  
Pensertifikatan tanah pemerintah daerah dengan capaian indikator terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat sebanyak 65 bidang dari target 92 % telah tercapai.
2. Program Penyelesaian Konflik Konflik-Konflik Pertanahan
  1. Penanganan Permasalahan/Sengketa Tanah  
Penanganan permasalahan/sengketa tanah dengan capaian indikator terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pertanahan dengan target 100% telah tercapai
3. Program Pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
  1. Koordinasi Keamanan Daerah  
Koordinasi keamanan daerah dengan capaian indikator tercapainya keamanan daerah wilayah pada hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru dengan target 2 kegiatan telah tercapai
4. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
  1. Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
Monev Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan capaian indikator terlaksananya monev dan penerapan pada 15 bidang SPM di SKPD yang memiliki SPM dengan target 97 % telah tercapai.
  2. Inventarisasi dan serah terima P3D  
Inventarisasi dan Serah terima P3D dengan capaian indikator terwujudnya kepastian hukum pengalihan kewenangan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 dengan target 1 dokumen telah tercapai.
  3. Pembuatan dan Publikasi LPPD, LKPJ, AMJ dan memori jabatan  
Pembuatan dan publikasi LPPD, LKPJ, AMJ, dan Memori Jabatan Bupati dengan capaian indikator tersusunnya buku LPPD dan LKPJ Akhir Tahun Anggaran Bupati dan Draft ILPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 sebanyak 3 Dokumen.
  4. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan (Pengendalian Program) 12 bulan

- Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan (Pengendalian Program) dengan capaian kinerja Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan (RKPK) sebanyak 3 kegiatan; Penggunaan aplikasi pelaporan belum maksimal. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan dalam rangka Penggunaan Aplikasi Pelaporan.
5. Pengembangan Budaya Kerja dan Integritas Aparatur  
Pengembangan budaya kerja dan integritas aparatur dengan capaian kinerja terlaksana sosialisasi Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Budaya Kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
  6. Evaluasi Lima Hari Kerja 1 dokumen  
Evaluasi 5 hari kerja dengan capaian kinerja tersedianya dokumen Peraturan Bupati tentang penetapan 5 hari kerja. Untuk proses penetapannya pemerintah Kabupaten Temanggung telah mengusulkan lewat Gubernur yang diteruskan ke Kementrian Dalam Negeri setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementrian PAN dan RB.
  5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
    1. Fasilitasi Sosialisasi Batas Wilayah Hasil Pemetaan Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi batas wilayah hasil pemetaan Badan Informasi Gespasial (BIG) di desa dalam 20 wilayah Kecamatan.
    2. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa 15 Raperdes  
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dengan capaian kinerja teralaksanaaya evaluasi raperdes di 15 desa telah tercapai
    3. Penyusunan Perbup tentang Penyerahan Urusan kepada Desa  
Penyusunan Perbup tentang Penyerahan Urusan kepada Desa dengan capaian kinerja yaitu tercetaknya empat dokumen Peraturan Bupati
    4. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan  
Fasilitasi Sosialisai Peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja tersosialisasinya peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan masyarakat yang sadar hukum selama 12 bulan di 5 kecamatan telah tercapai;
    5. Dokumentasi dan informasi hukum 60 dokumen  
Dokumen dan Informasi Hukum dengan capaian kerja tercetaknya buku himpunan perundang-undangan daerah 225 Buku dan terhimpunya perundang-undangan daerah 225 buku;
    6. Pengelolaan SJDJ hukum dan pembinaan di 20 kecamatan

- Pengelolaan SJD hukum dan pembinaan di 20 kecamatan dengan capaian kerja tercatatnya dokumentasi dan informasi hukum 2 Dokumen;
7. Pelayanan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan  
Pelayan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan dengan capaian terselesaikanya permasalahan hukum Pemerintah kabupaten Temanggung sebanyak 10 Kasus dapat terselesaikan;
  8. Rencana aksi nasional hak asasi manusia sebanyak 1 kegiatan  
Rencana Aksi Nasional hak asasi manusia dengan capaian kinerja tersedianya laporan pelaksanaan RANHAM Kabupaten Temanggung Tahun 2016 dengan target 1 kegiatan dan terwujudnya pelaksanaan RANHAM Kabupaten Temanggung 2016 (21 POKSAR) telah terlaksana.
  9. Peningkatan kesadaran hokum di 20 kecamatan  
Peningkatan Kesadaran hukum dengan capaian kerja Lomba kadarkum antar TP-PKK kecamatan 20 Kecamatan dengan terseleksinya Kader TP-PKK sebagai penyuluh hukum sebanyak 5 Orang;
  10. Penyusunan Raperda Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal 1 dokumen  
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dengan capaian tersedianya raperda LPP TV Temanggung dan Peraturan Daerah Revisi LPP Radio Temanggung sebanyak 2 dokumen
  11. Penyusunan Perbup LPPL TV Temanggung dan Revisi Perbup LPPL Radio Temanggung 1 dokumen  
Kegiatan Penyusunan Ranvcangan Peraturan Daerah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV dan Radio Temanggung dengan capaian tersedianya Perbup LPP TV Temanggung dan Perbup Revisi LPP Radio Temanggung
  12. Penyusunan Standar Pelayanan Publik 54 dokumen  
Penyusunan standar pelayanan publik dengan capaian kinerja terlaksananya bimbingan teknis bagi 50 SKPD dan tersusunnya 54 dokumen Standar Pelayanan Publik.
  13. Penyusunan Standar Operating Prosedur 150 dokumen  
Penyusunan standar operasional prosedur dengan capaian kinerja terlaksananya bimbingan teknis bagi 150 SKPD dan tersusunnya 150 dokumen/Keputusan Bupati tentang SOP.
  14. Pembinaan Pelayanan Publik 3 dokumen



- Pembinaan pelayanan publik dengan capaian kinerja Peningkatan kapasitas pelayanan publik dengan tersedianya 3 dokumen Peraturan Bupati Temanggung tentang Standar Pelayanan, Penanganan Pengaduan, dan Survei Kepuasan Masyarakat.
15. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pelayanan Publik  
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelayanan publik di 24 puskesmas di seluruh Kabupaten Temanggung dan tersusunnya 1 (satu) dokumen laporan data tindak lanjut IKM dan aduan masyarakat.
  16. Partisipasi Lomba Pelayanan Publik 1 kegiatan  
Partisipasi lomba pelayanan publik dengan capaian kinerja terlaksananya terlaksananya kegiatan sosialisasi sistem informasi Inovasi pelayanan publik bagi seluruh organisasi perangkat daerah dan mengikutsertakan dalam kegiatan lomba SINOVIK
  17. Penyusunan Perda SOTK dan Perbup SOTK  
Penyusunan Perda SOTK dan Perbup SOTK dengan capaian kinerja tersedianya 2 dokumen Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60, 61, dan 62 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
  18. Review Roadmap reformasi birokrasi 1 dokumen  
Reviu road map reformasi birokrasi dengan capaian kinerja tersedianya dokumen Peraturan Bupati Temanggung tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2016 -2019 yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
    1. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan  
Pembinaan dan pengembangan Aparatur Kecamatan dengan capaian indikator peningkatan kapasitas aparatur kecamatan sebanyak 20 orang pada 20 Kecamatan dengan target 50% telah tercapai.
  7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
    1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan  
Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan capaian indikator tercapainya peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Capaian kinerja

terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan sebanyak 4 kali baik dengan dinas/instansi, pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa/kelurahan.

8. Program Kerjasama Daerah

1. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah melalui Fasilitasi dan Monev Kerjasama

Peningkatan kerjasama antar daerah melalui fasilitasi dan monitoring evaluasi kerjasama dengan capaian indikator terdokumentasinya dokumen naskah perjanjian kerjasama antar daerah dengan target 1 dokumen

9. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1. fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa 5 bidang

Fasilitasi Penyelesaian tanah kas desa dengan capaian kinerja terselesaikannya permasalahan tanah kas desa dengan target 5 bidang telah tercapai

2. Identifikasi Data Alih Fungsi dan Penyusunan Tataguna Tanah Kas Desa 266 desa

Identifikasi Data Alih Fungsi dan Penyusunan Tataguna Tanah Kas Desa dengan capaian kinerja terlaksananya identifikasi data pemanfaatan tataguna dan alih fungsi tanah kas desa dengan target 20 desa telah tercapai

10. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1. Pembinaan Administrasi Desa 266 desa

Pembinaan Administrasi Desa dengan capaian kinerja terlaksananya tertib administrasi bagi 266 desa dan telah terealisasi 266 desa. Dengan adanya dana desa membuat masyarakat menuntut pelayanan di desa juga meningkat, sehingga administrasi perlu ditingkatkan

2. Penguatan Kekayaan Desa 266 desa

Penguatan Kekayaan Desa dengan capaian kinerja Tertib administrasi pengelolaan Kekayaan Desa di 266 desa. Sampai dengan triwulan 4 telah terlaksana 266 desa. Aset desa menjadi perhatian yang serius, mengingat beberapa permasalahan di desa khususnya pertanahan sering menjadi batu sandungan bagi kepala desa

3. Fasilitasi Pendampingan dan Eksistensi APBDesa dan Barang Pengadaan Barang dan Jasa 266 desa

Fasilitasi Pendampingan dan Eksistensi APBDesa & Pengadaan Barang di Desa dengan capaian kinerja tertib APBdes, pelaksanaan dan pelaporan SPJ APBdes dan Pengadaan barang dan jasa dengan target 266 desa telah tercapai

4. Bintek Perangkat Desa 266 desa

Bintek perangkat desa dengan capaian kinerja Terlaksananya Bintek bagi Sekretaris Desa yang baru terpilih. Untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa khususnya Sekdes perlu mendapatkan bimtek terkait dengan peraturan – peraturan baru.

11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1. Penatausahaan Keuangan Desa 266 desa

Penatausahaan Keuangan Desa dengan capaian kinerja meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan desa dengan target sebanyak 266 Desa dan telah terealisasi 266 desa. Dengan adanya Undang-undang tentang Desa yang baru sehingga beberapa ketentuan tentang penatausahaan keuangan mengalami perubahan.

2. Penguatan Keuangan Desa 266 desa

Penguatan Keuangan Desa dengan capaian kinerja meningkatnya Pengelolaan Keuangan desa dengan target sebanyak 266 Desa dan telah terealisasi 266 desa. Dengan undang undang tentang Desa yang baru perlu adanya monitoring pembinaan kepada semua desa di Kabupaten Temanggung

12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

1. Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala 18.000 eksemplar

Kegiatan Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala, dengan capaian kinerja tersedianya media informasi majalah sejumlah 21.000 eksemplar yang diterbitkan setiap 4 bulan sekali;

2. Lembaga Penyiaran Publik Lokal 4 kegiatan

Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dengan capaian kinerja meningkatnya program siaran sejumlah 4 program acara;

3. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat (Press Tour) 1 kegiatan

Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (press tour) dengan capaian kinerja tercukupinya sarana prasarana pelayanan public sejumlah 1 kegiatan

4. Penyelenggaraan Kehumasan 700 kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan, dengan capaian kinerja tersedianya peralatan untuk mendukung kegiatan kehumasan, dan kegiatan Pemkab Temanggung baik berupa foto dan video kegiatan Pemkab Temanggung sebanyak 700 kegiatan.

5. Fasilitasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi dan Radio Lokal 1 paket

Fasilitasi Lembaga penyiaran publik Televisi dan Radio Lokal dengan capaian kinerja tercukupinya sarana prasarana pelayanan public 1 unit gedung yang berdiri di jalan lingkaran Maron Temanggung

6. Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

- Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan capaian kinerja terlaksananya pelelangan umum barang/jasa pemerintah dalam waktu 12 bulan;
7. Peningkatan Sarana LPSE 12 bulan  
Peningkatan Sarana LPSE dengan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan komputer LPSE dalam waktu 12 bulan;
  8. Peningkatan SDM Pengelola LPSE dan ULP  
Peningkatan SDM Pengelola LPSE dan ULP dengan capaian kinerja Sosialisasi LPSE dan ULP dalam waktu 12 bulan
  9. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 12 bulan  
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi dengan capaian kinerja:
    - i. Mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung di bidang persandian dan pengamanan data; dan
    - ii. Memberikan fasilitas jaringan telepon dan faximili untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung.
  10. Pengadaan Jaringan LPSE dan Online SKPD 50 mbps  
Pengadaan Jaringan Komunikasi dengan capaian kinerja:
    - i. Tersedianya jaringan komunikasi online antar SKPD;
    - ii. Tersedianya server aplikasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung; dan
    - iii. Pembangunan pusat jaringan online Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung secara terintegrasi dan bertahap.
  13. Pendidikan Non Formal
    1. Pemberian bantuan siswa dan masyarakat berprestasi  
Pemberian bantuan siswa dan masyarakat berprestasi dengan capaian kinerja terbantunya terbantunya 163 orang siswa dan masyarakat berprestasi di kabupaten Temanggung,dengan rincian tingkat kejuaraan sebagai berikut;
      - i. Tingkat Internasional
        - Juara II : 1 Orang
        - Juara III : 1 Orang
      - ii. Tingkat Nasional

- Juara I : 6 Orang
  - Juara II : 11 Orang
  - Juara III : 12 Orang
  - iii. Tingkat Propinsi
    - Juara I : 32 Orang
    - Juara II : 36 Orang
    - Juara III : 41 Orang
  - iv. Tingkat Propinsi Beregu
    - Juara I : 3 Regu
    - Juara II : 4 Regu
    - Juara III : 3 Regu
  - v. Pelatih
    - Pelatih Bersertifikat Nasional : 5 Orang
    - Pelatih Bersertifikat Daerah : 9 Orang
14. Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Kegiatan Rakor TP UKS Kabupaten Temanggung  
Rakor TP UKS Kabupaten Temanggung, dengan capaian kinerja terlaksananya rakor 2 kali, dan kunjungan kerja ke Kabupaten Tuban selama 2 hari, serta terlatih dan meningkatnya pemahaman 100 TP UKS
15. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2 kegiatan
1. Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan capaian kinerja pendampingan rapat koordinasi sebanyak 6 kali.
    - a) Memfasilitasi pemeriksaan kandungan penderita positif HIV /AID
    - b) Rakor perlindungan anak dan perempuan 5 kali.
    - c) Lomba Kreatifitas seni anak 1 kali dengan diikuti 40 kelompok / group se- Kabupaten Temanggung.
16. Pengembangan Nilai Keagamaan
1. Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1 kegiatan  
Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan capaian kinerja terselenggaranya manasik haji dan rangkaian kegiatan pelaksanaan pemberangkatan ibadah haji dengan capaian terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan Ibadah Haji dengan memberangkatkan calon jemaah haji sejumlah 581 Orang dan diberangkatkan TPHD sejumlah 5 Orang.

2. Penyelenggaraan MTQ 5 kegiatan

MTQ Pelajar, STQ, MHQ dan Seleksi Rebana, dengan capaian kinerja terselenggaranya 84 rori' dan qoriah dengan rincian :

- Terselenggara kegiatan MTQ pelajar tingkat Kabupaten dan terkirimnya kafilah MTQ pelajar tingkat Provinsi Jawa Tengah, mendapatkan juara I cabnag Murotal SLTP Putri, juara harapan III cabang Tahfidz 5 Jus putri, dan juara harapan III cabang Murotal SLTP Putri.
- Terselenggaranya kegiatan MHQ tingkat Kabupaten dan terkirimnya kafilah MHQ tingkat Provinsi Jawa Tengah.
- Terselenggaranya kegiatan STQ tingkat Kabupaten dan terkirimnya kafilah STQ tingkat Provinsi Jawa Tengah, mendapat juara I untuk cabang tilawah anak.

3. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 9 kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan penyelenggaraan Tarkhim ( Tarawih dan Silaturahmi ) dengan capaian kinerja :

- Terselenggaranya kegiatan di 20 Kecamatan.
- Terselenggaranya kegiatan pengajian rutin kamis legi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung 38 kali dan pengajian dalam rangka PHBI 3 Kali.
- Terwujudnya hubungan erat antara pemuka agama dan aparatur pemerintah serta masyarakat di 20 Kecamatan dan PNS di Lingkungan Setda dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

4. Pelatihan Guru TPQ dan Badan Koordinasi TPQ

Pelatihan Guru TPQ dan Badan Koordinasi TPQ dengan capaian kinerja, terlatihnya 220 guru TPQ Kabupaten Temanggung.

5. Pelatihan Manajemen Masjid

Pelatihan Manajemen Masjid, dengan capaian kinerja terlatihnya 60 orang takmir masjid Desa utusan Kecamatan se Kabupaten Temanggung dan kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan.

6. Fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan sosial/hibah 4 kegiatan

Fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan sosial/ hibah dengan capaian kinerja, terselenggaranya penyaluran bantuan kepada penerima bantuan sosial dan hibah sebanyak 6 kegiatan.;

- Terlaksananya survay 1 kali, monitoring 2 kali dan sosialisasi 1 kali. Sosialisasi dilaksanakan mengenai persyaratan pencairan dana hibah, dan kelengkapan surat pertanggungjawaban dana hibah.
  - Tersalurnya bantuan sosial dan penyandang cacat sejumlah 26 pemohon, dan dana bantuan hibah sejumlah 92 tempat ibadah.
7. Silaturahmi Aparatur bersama masyarakat 38 kegiatan
- Silaturahmi aparatur bersama masyarakat dengan capaian kinerja terwujudnya hubungan erat antara pemuka agama dan aparatur pemerintah serta masyarakat di 20 Kecamatan dan PNS di Lingkungan Setda Pemerintah Kabupaten Temanggung
17. Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi  
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan target 12 bulan, dengan capaian kinerja terlaksananya rapat koordinasi persiapan menghadapi hari raya keagamaan dan tahun baru, rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi, dan rapat koordinasi bidang ekonomi tertentu (KUR, LKM, ESDM);  
Permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi bidang ekonomi. Solusi untuk permasalahan ini yaitu dengan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi : Beberapa hal yang dirasakan perlu disampaikan ke SKPD disampaikan di forum rapat yang lain
  2. Koordinasi Pelaksanaan TPID  
Koordinasi Pelaksanaan TPID dengan target 2 kegiatan, dengan capaian kinerja terlaksananya rapat koordinasi dan pengendalian inflasi dengan SKPD terkait, BPS, dan Bank Indonesia;  
Permasalahan yang muncul yaitu Koordinasi Pelaksanaan TPID : Pantauan atas perkembangan harga bahan penyumbang inflasi belum secara rutin dilaksanakan tepat waktu. Hal ini dapat disiasati dengan cara menugaskan staf khusus di SKPD Perindagkop dan UMKM untuk bertanggungjawab atas pemantauan harga.
  3. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)  
Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai (DBHCHT) dengan target 5 kegiatan telah tercapai. Dengan capaian kinerja terpantaunya perubahan harga daun tembakau dan hasil olahan tembakau untuk tahun 2016, terpantaunya jumlah produksi tembakau di Kab. Temanggung dan jumlah olahan daun tembakau yang masuk di gudang Tembakau yang ada di Temanggung;

4. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan  
Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dengan capaian kinerja terlaksananya penyusunan dan pelaporan dokumen SKPD sebanyak 24 dokumen  
Pelaporan rutin kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan  
Menyelenggarakan pertemuan tatap muka (desk) dan menerbitkan surat teguran/peringatan agar menyampaikan Pelaporan kegiatan secara rutin dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan,
5. Fasilitasi Perencanaan Dana DAK, Tugas Pembantuan dan Bantuan Dana Pusat Lainnya kepada Kabupaten 12 bulan  
Fasilitasi perencanaan dana DAK, Tugas Pembantuan, dan bantuan dana dari pusat lainnya kepada Kabupaten dengan capaian kinerja tersusunnya laporan DAK, Tugas Pembantuan dan bantuan dana dari pusat lainnya kepada kabupaten sebanyak 4 dokumen  
Koordinasi dengan SKPD belum optimal, sehingga Fasilitasi perencanaan dana DAK, Tugas Pembantuan, dan bantuan dana dari pusat lainnya kepada Kabupaten kurang berjalan secara efektif. Meningkatkan dan mengoptimalkan Koordinasi dengan SKPD terkait, sehingga Fasilitasi perencanaan dana DAK, Tugas Pembantuan, dan bantuan dana dari pusat lainnya kepada Kabupaten dapat berjalan lebih efektif.
6. Penyusunan LAKIP Kabupaten  
Penyusunan LAKIP Kabupaten dengan capaian kinerja tersusunnya 1 (satu) dokumen LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2015. Untuk hasil penilaian LkjIP tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2016 belum ada hasil penilaian dari Kemenpan dan RB.
7. Penyusunan LAKIP dan PK SETDA 1 dokumen  
Penyusunan LAKIP dan PK Setda dengan capaian kinerja tersusunnya 1 (satu) dokumen LAKIP Setda Kab. Temanggung Tahun 201 dan 1 (satu) dokumen PK Sekda Tahun 2016 telah dibuat tepat waktu.
8. Penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati 1 dokumen  
Penyusunan penetapan kinerja Bupati dengan capaian kinerja tersusunnya 1 (satu) dokumen Penetapan Kinerja Bupati Temanggung Tahun 2016 telah dibuat sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan tepat waktu.
18. Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
  1. Monitoring Program Kredit Lunak 50 sasaran



Monitoring Program Kredit Lunak, dengan capaian kinerja termonitoringnya dan tertagihnya kredit lunak di 50 kelompok penerima;

Permasalahan yang terjadi yaitu sistem tanggung renteng dalam kelompok penerima kredit yang menyebabkan beberapa anggota kelompok penerima kredit enggan melunasi tagihannya karena merasa tidak menggunakan kredit (dipakai oleh anggota kelompok yang lain), disamping hal tersebut di atas juga ditemukan bubarnya beberapa kelompok yang sudah tidak produktif. Solusi dari permasalahan ini bisa dilakukan dengan cara pendekatan persuasif kepada kelompok penerima kredit agar berupaya untuk membayar tagihan kredit yang menjadi tanggung-jawabnya.

19. Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pembinaan & Evaluasi BUMD 5 kegiatan

Pembinaan dan Evaluasi BUMD, dengan capaian kinerja terlaksananya evaluasi semesteran kinerja BUMD dan terlaksananya target RKAT BUMD bagi 10 (sepuluh) BUMD yaitu :

BUMD Kab. Temanggung	BUMD milik bersama dengan Pemerintah Provinsi
PDAM Temanggung	Bank Jateng
Apotik Waringin Mulyo	BPR BKK Temanggung
Aneka Usaha	BPR BKK Pringsurat
Bhumiphala Wisata	PRPP
Bank Pasar	Jamkrida

2. Fasilitasi Manajemen Organisasi BUMD sejumlah 5 BUMD

Fasilitasi Manajemen Organisasi BUMD, dengan capaian kinerja terlaksananya pengisian pengurus BUMD dan terlaksananya kegiatan BUMD tingkat provinsi;

3. Fasilitasi Penyertaan Modal

Fasilitasi Penyertaan Modal, dengan capaian kinerja terlaksananya penyertaan modal BUMD sesuai aturan dengan kegiatan 12 distribusi;

4. Penyusunan Buku Standar Indeks Harga 1 dokumen

Penyusunan buku standar indeks harga dengan capaian kinerja tersusunnya 1 (satu) dokumen buku standar indeks harga tahun 2016 dan tersedianya Peraturan Bupati Temanggung tentang Tambahan Penghasilan Tetap bagi pegawai.

20. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1. Koordinasi Pengawasan Program LPG 3 KG

Koordinasi Pengawasan Program LPG 3 Kg dengan target 4 kegiatan, dengan capaian kinerja terpantaunya harga LPG khususnya LPG 3 Kg di masyarakat, terpantaunya kepatuhan pangkalan LPG atas harga eceran tertinggi, tercukupinya kebutuhan masyarakat atas LPG terutama pada periode perayaan hari raya keagamaan, bulan puasa, musim panen tembakau, dan liburan;

21. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung dalam waktu 12 bulan dengan capaian kinerja tersusunnya 300 Buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung;

2. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung Melebihi Tahun Anggaran 3 bulan

Penyusunan Pedoman pelaksanaan pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung Melebihi Tahun Anggaran dengan capaian kinerja tersusunnya Buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung Melebihi Tahun Anggaran sebanyak 1 dokumen

22. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan capaian kinerja berupa terbayarnya tagihan rekening listrik, PJU, telepon dan air selama 12 bulan telah terlaksana.

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, dengan capaian kinerja berupa tersedianya kendaraan dinas operasional yang siap pakai yakni kendaraan dinas roda empat sebanyak 44 unit, kendaraan dinas roda tiga sebanyak 1 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 60 unit.

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  
Penyediaan jasa kebersihan, peralatan & bahan pembersih kantor, dengan capaian kinerja berupa tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih dan jasa kebersihan selama 12 bulan.
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, dengan capaian kinerja berupa tersedianya peralatan kantor yang memadai termasuk kebutuhan perbaikan telepon, AC dan meubelair selama 12 bulan.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan  
Penyediaan ATK, dengan capaian kinerja berupa tersedianya perlengkapan Alat Tulis Kantor yang memadai selama 12 bulan.
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  
Penyediaan barang cetakan & penggandaan keperluan kantor, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kantor selama 12 bulan.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan selama 12 bulan.
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan capaian kinerja berupa tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar selama 12 bulan, yaitu Suara Merdeka sebanyak 10800 eksemplar, Kompas 1800 eksemplar, Wawasan 1800 eksemplar, Kedaulatan Rakyat 1800 eksemplar, Magelang Ekspres 1800 eksemplar, dan Jawa Pos 720 eksemplar.
9. Penyediaan Makanan dan Minuman  
Penyediaan makanan & minuman, dengan capaian kinerja berupa tersedianya kebutuhan makanan dan minuman selama 12 bulan untuk rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Pemerintah Daerah.
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan.

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan.

12. Jasa Pelayanan Perkantoran 12 bulan

terbayarnya honor pegawai Daerah/PTT sebanyak 4 orang, penjaga repeater dan meteor 3 orang, petugas pemelihara pendopo pengayoman, rumah dinas Bupati, Wabup, Sekda dan pemelihara listrik Setda 9 orang, petugas kebersihan dan penjaga malam Gedung Pemuda & Kebudayaan 3 orang, dan Pembantu rumah tangga Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Penyedia makan minum kantor Bupati dan wabup, 9 orang selama 12 bulan, Operator Santel dan petugas teknis peralatan kantor Setda 3 Orang, Petugas Keprotokolan, dan administrasi PKK 4 Orang, Petugas Pemelihara Taman Pendopo Pengayoman 2 orang dan tersedianya biaya untuk keperluan sewa-sewa meja kursi, soundsystem dan tenda.

13. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12 bulan

Penyediaan jasa pengamanan kantor, dengan capaian kinerja berupa tersedianya tenaga satuan pengamanan kantor di lingkungan kantor Setda, rumah dinas bupati, rumah dinas wakil bupati, dan rumah dinas Sekda, lingkungan kantor Sekretariat DPRD, dan lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung selama 12 bulan.

23. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 12 bulan

Pengadaan kendaraan dinas/operasional, dengan capaian kinerja tersedianya sarpras berupa kendaraan dinas operasional roda 4 sebanyak 5 unit Stasion Wagon, Mikro Bis 1 Unit, Mobil Box 1 unit dan 7 unit Kendaraan Roda 2 berupa 270 unit.

2. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas, dengan capaian kinerja berupa tersedianya perlengkapan/peralatan rumah jabatan/dinas yang memadai yaitu Pengadaan Rak TV, Meja Kursi Tamu Wisma Dirgahayu dan Pos Stpam Pendopo Pengayoman, Pengadaan Kitcen Set, Dispenser, Water Heater, Setrika, alat pembuat kopi mixer, jam dinding, Gordyn Rumah Dinas Bupati, penghias Ruangan dan Karpet Rumah Dinas Bupati.

3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor, dengan capaian kinerja berupa tersedianya sarana gedung kantor yaitu 1 unit Mesin Fotocopy Ruang Spri Kerja Bupati, Lemari Arsip, Filing

- Kabinet, Air Conditioner, 9 Unit Komputer PC, 5 Unit laptop, 6 unit Printer, 3 unit Mic, 3 Unit Stand mic.
4. Pengadaan Meubelair  
Pengadaan meubelair, dengan capaian kinerja berupa tersedianya sarana kantor meubelair yaitu 4 buah mimbar/podium, 2 Set Meja makan Pendopo jenar, 16 Kursi hadap, 80 Kursi Rapat, 6 Set Meja Kursi Tamu, 2 buah etalase.
  5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 12 bulan  
Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas, dengan capaian kinerja berupa terpeliharanya prasarana dan bangunan rumah dinas selama 12 bulan, yaitu penyediaan katul/dedak & rumput/hijauan untuk hewan ternak di Rumdin Bupati, Perbaikan atap Rumdin bupati, Perbaikan Lantai, Pintu dan jendela Rumdin Bupati, wabup dan sekda, Pemeliharaan kolam, air mancur dan pompa air, rehap gudang dan kamar mandi Rumdin Sekda, Pengecatan Pagar Tembok Rumdin, perbaikan dapur rumdin bupati, perbaikan kandang, pemasangan paving garasi rumdin bupati dan jasa servis.
  6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  
terpeliharanya prasarana dan bangunan gedung kantor selama 12 bulan, berupa perbaikan atap, perbaikan plafon, perbaikan lantai, perbaikan kamar mandi wc, perbaikan pintu dan jendela, pemeliharaan kolam, air mancur, kansteen, dan pompa air, pemeliharaan pagar-tembok-kansteen-pintu gerbang,, pengecatan Pintu Gerbang dan pagar tembok, pemeliharaan gedung pertemuan, pemeliharaan kantin & koperasi, pemeliharaan gedung PKK, Pemeliharaan Taman Setda, Perbaikan selatsar untuk mobil parkir setda, pemeliharaan Gedung Pemuda,
  7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 bulan  
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor, dengan capaian kinerja berupa terpeliharanya terpeliharanya sarana peralatan kantor yaitu soundsystem, komputer, LCD, dan alat kesenian selama 12 bulan.
24. Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan peralatan mesin absen dengan capaian kinerja berupa meningkatnya disiplin dan kinerja Pegawai pegawai, tersedianya mesin absen pegawai sejumlah 38 unit untuk SKPD dan 2 unit computer server,

2. pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan pakaian tertentu lainnya yaitu PDH Bupati, PDH Wakil Bupati, PDU Bupati, PDU Wakil Bupati, Batik Lengan Panjang Bupati, Batik Lengan Panjang Wakil Bupati, PSR Bupati, PSR Wakil Bupati, PDH Kheky Wakil Bupati, PSL Bupati, PSL Wakil Bupati, PDL Wakil Bupati, Korpri Wakil Bupati, baju Pramuka Wakil Bupati, PSL Protokol, PSL Sekda, Batik Tradisional.
25. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1. Kepesertaan APKASI  
APKASI, dengan capaian kinerja berupa terbayarnya iuran APKASI. Baik bagi Kepala Daerah maupun untuk iuran Sekretaris Daerah selama 12 bulan
  2. Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah 12 bulan  
Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/LPND dan peringatan hari besar nasional dan daerah, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya kegiatan kunjungan kerja pejabat di Kabupaten Temanggung serta terlaksananya kegiatan peringatan hari besar tingkat nasional dan daerah di Kabupaten Temanggung selama 12 bulan.
26. Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1. Penanganan Pengaduan Pelayanan  
Penanganan pengaduan masyarakat dengan capaian kinerja menindaklanjuti aduan dari masyarakat, dan tersedianya kotak saran sejumlah 73 buah yang sudah diberikan ke SKPD. Untuk Tahun 2016 juga telah dilaksanakan penilaian dari ombusmen dimana Kabupaten Temanggung telah memperoleh penilaian dengan kategori warna kuning.
  2. Pelatihan Pelayanan Prima  
Pelatihan pelayanan prima dengan capaian terselesaikannya kegiatan bimbingan teknis bagi pimpinan SKPD. Dalam kegiatan ini juga terdapat acara penandatanganan perjanjian Kinerja Bupati kepada semua pimpinan SKPD secara langsung.
  3. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik  
Survey indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik dengan capaian kinerja tersusunnya 150 dokumen laporan survey kepuasan masyarakat dari satuan pendidikan yang dilakukan secara mandiri. Dan tersusunnya 1 dokumen laporan survei kepuasan

masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Untuk Tahun 2016 pelaksanaan survei yang dilakukan oleh pihak ketiga dilakukan pada SKPD Dindukcapil, Kecamatan Teemanggung dan Puskesmas Ngadirejo.

4. Evaluasi Jabatan

Evaluasi jabatan dengan capaian tersedianya 1 dokumen Evaluasi jabatan. Untuk tahun 2016 evaluasi dilakukan pada semua jabatan fungsional umum.

27. Pengembangan Komunikasi dan Informasi

1. Pembinaan Pengembangan Sumber dan Daya Komunikasi dan Informasi

Pembinaan Pengembangan Sumber dan Daya Komunikasi dan Informasi dengan capaian Pemantauan jaringan komunikasi secara online, Penanganan troubleshooting, Mengatur lalu lintas jaringan online antar SKPD Kabupaten Temanggung selama 12 bulan

2. Pengadaan Jaringan Komunikasi 1 pusat jaringan online

Pengadaan Jaringan Komunikasi pusat jaringan online dengan capaian Penyediaan Bandwidth untuk memfasilitasi aplikasi online milik Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung; Mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui LPSE; dan Penyediaan jaringan komunikasi Online SKPD sampai ke Kecamatan.

3. Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, Alat Pengolah Data Elektronik dan Jaringan Komunikasi  
Terpeliharanya peralatan telekomunikasi, alat pengolah data dan elektronik serta jaringan komunikasi yang dikelola oleh Bagian Santel dan PDE.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Berdaya Guna 5 operator

- Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam pengelolaan jaringan komunikasi online SKPD;
- Kegiatan pengelolaan jaringan komunikasi online SKPD dapat berjalan dengan lebih baik.

5. Pengadaan Sarana dan Prasarana alat pengolah data elektronik 3 unit

6. Monitoring dan Evaluasi Penerapan e-Government Kabupaten Temanggung 35 skpd

Monitoring dan Evaluasi Penerapan e-Government Kabupaten Temanggung dengan capaian kinerja :

- Terpantaunya pemanfaatan e-Government dan akses internet dari Bagian Santel dan PDE untuk akses aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Temanggung, antara lain Ipse, absensi, sibangda, smpeda, p2kp, jdih, dll;
  - Terpantaunya pengelolaan website Kecamatan yang disediakan oleh Bagian Santel dan PDE;
7. Penataan Domain dan Subdomain SKPD capaian kinerja
- Pembangunan website kecamatan sebagai media komprehensif dan terpercaya sebagai sumber informasi berita seputar informasi pemerintahan dan pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
  - Tersedianya media penyaluran aspirasi masyarakat Kabupaten Temanggung pada umumnya dan wilayah kecamatan yang bersangkutan pada khususnya;
  - Tersedianya media pengembangan wilayah kecamatan dan daerah di kabupaten Temanggung;
  - Tersedianya alat control dan media penyebar luasan informasi bagi instansi penyelenggara negara terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Koordinasi Penyusunan Assement IT Kabupaten Temanggung 1 dokumen
- Tersedianya Data dan Peta tentang Akses jaringan yang dapat dijangkau oleh Internet dengan sistem WAN maupun LAN;
  - Tersedianya data kebutuhan sarana dan prasarana Data Centre.

Dari beberapa program yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah, terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang dapat tercapai melebihi target sebanyak 5 program dan 9 kegiatan, yaitu:

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
  1. Fasilitasi lelang sawah bekas bengkok kelurahan  
Fasilitasi lelang sawah bekas bengkok kelurahan dengan capaian indikator terpenuhinya target PAD dari lelang tanah eks bengkok kelurahan dari target Rp. dengan target Rp. 1.050.000.000,- telah tercapai di 13 Kelurahan dengan pemasukan PAD sebesar Rp. 1.379.510.000;.
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
  1. Pembekalan Tugas Kepala Desa, dari target 35 orang telah tercapai 36 orang atau 102 %  
Pembekalan Tugas Kepala Desa dengan capaian kinerja terselenggaranya pebekalan bagi 35 Kepala Desa dan telah terealisasi 36 Kepala Desa. Kepala Desa yang baru terpilih perlu



- diberikan bekal baik kedisiplinan maupun pengetahuan tentang desa seperti peraturan desa, keuangan desa, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
2. Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa dari target 75 orang telah tercapai 190 orang atau 253 %  
Fasilitasi pengisian perangkat desa dengan capaian kinerja terlaksananya pengisian perangkat desa yang kosong dengan target sebanyak 75 orang sampai dengan triwulan IV telah tercapai 190 orang. Dengan semangat reformasi birokrasi, pemerintah desa juga mengalami efisiensi dalam hal pengisian kekosongan perangkat desa. Sehingga hanya jabatan-jabatan pokok yang diisi.
  3. Fasilitasi Pengisian Kepala Desa dari target 35 orang telah tercapai 36 orang atau 102 %  
Fasilitasi Pengisian Kepala Desa dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan Pemilihan Kepala Desa di 36 desa dengan aman dan lancar tanpa eksek.
3. Penataan peraturan perundang-undangan
    1. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan  
Legislasi rancangan peraturan Perundang-undangan dengan capaian kinerja terbahasnya Raperda menjadi Perda hasil pembahasan Pansus dari target 10 dokumen Raperda telah terealisasi 11 dokumen atau 110 %
    2. Kajian peraturan perundang-undangan daerah  
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah dengan capaian kerja tercapainya Raperbub dan terkajinya Rakerpub dengan target 15 dokumen telah terealisasi 26 dokumen atau 173 %.
  4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
    1. Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi dan Media Massa Bagi Masyarakat dari target 20 kegiatan tercapai 31 kegiatan atau 155 %  
Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi dan Media Massa Bagi Masyarakat, dengan capaian kinerja tersedianya sarana informasi kegiatan Pemkab bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung
    2. Pembuatan Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung dari target 1000 eksemplar telah tercapai 1500 eksemplar atau 150 %
  5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
    1. Koordinasi Pendampingan Program Raskin,

Koordinasi Pendampingan Program Raskin dengan capaian kinerja terlaksananya distribusi raskin kepada RTS penerima manfaat Raskin di 20 Kecamatan, sejumlah 14 kali distribusi melebihi target yang sejumlah 12 kali distribusi atau 116%;

Sedangkan program dan kegiatan yang tidak memenuhi target di tahun 2016 sebanyak 5 program dan 7 Kegiatan, yaitu:

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
  1. Pengadaan Tanah Pemerintah dari target 38.426 M2 hanya tercapai 37.218 M2 atau 96 %  
Pengadaan tanah pemerintah untuk kepentingan umum dengan capaian indikator tersedianya tanah milik Pemerintah Daerah yang siap dibangun dengan target 37.218 m2 yang digunakan untuk
    - Pelebaran jalan dan jembatan Kali Jambe, Kelurahan Madureso Kec. Temanggung;
    - Mata Air PDAM di Desa Tegalrejo Kecamatan Bulu;
    - Pembangunan jalan masuk calon gudang DPU di Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung;
    - Penguat Mata Air PDAM di desa Tlahap Kecamatan Kledung;
    - Pembangunan Puskesmas Banjarsari, Puskesmas Bulu dan Puskesmas Selopampang;
    - Pembangunan Pasar Hewan di Desa Ngaren Kecamatan Ngadirejo
  2. Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum, dari target 56 m2 tidak dapat tercapai atau 0 %.  
Kegiatan dimaksud untuk membeli tanah yang akan digunakan untuk pelebaran jalan di depan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Untuk tahapan proses pengadaan telah dilakukan, akan tetapi pemilik tanah yang akan dibeli dimaksud mengalami sakit sehingga tidak terjadi kesepakatan harga antara penjual dengan pemerintah.
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
  3. Pengelolaan Webside Kabupaten Temanggung dengan target 5.200 kegiatan terealisasi 5.142 kegiatan atau 98,8 %. Kegiatan Pengelolaan Website Kabupaten Temanggung, dengan capaian kinerja tersedianya sarana teknologi informasi melalui website dan peningkatan performa Website dengan sewa hosting, domain dan maintenance serta tersedianya layanan SMS GATEWAY dengan nomor 085-878-600-900 guna layanan informasi kepada masyarakat luas;

1. Pengisian Materi Videotron, indikator kegiatan ini tidak dapat tercapai karena meskipun telah direncanakan dalam Renja akan tetapi tidak teranggarkan di APBD tahun 2016, karena tidak ada titik temu/ kerjasama antara pemerintah dengan pihak ketiga penyedia materi video tron sehingga tidak dapat diteruskan.
2. Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah dari target 5.400 kegiatan tercapai 4.816 kegiatan atau 89,1 %. Hal ini disebabkan kurangnya suplay berita yang dikarenakan ada satu media cetak rakyat Jawa Tengah yang tidak terbit lagi (tutup produksi)
3. Peningkatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  1. Pemberian Bantuan Kesejahteraan Wiyata Bhakti Pendidikan dari target 1.680 orang hanya tercapai 560 orang atau 33 %. Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran kegiatan fasilitasi dana hibah yang semula ditangani secara langsung oleh Bagian Kesra berpindah ke Dinas Pendidikan.
4. Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
  1. Fasilitasi Olahraga di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Fasilitasi olahraga di lingkungan Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja 20 kali, terselenggaranya kegiatan olahraga bagi karyawan Setda dan Pemkab sebanyak 16 Kali target 20 kali terealisasi 16 kali atau 80 %. Hal ini disebabkan kegiatan olahraga tidak dilaksanakan pada bulan puasa, sebagian diambil alih untuk kegiatan Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, dan sebagian bergantian tempat dengan olahraga yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Kabupaten dengan sasaran peserta sama.

Dengan melihat data kegiatan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 118 indikator kinerja kegiatan, 6 % tidak dapat tercapai, dan 9 indikator kinerja atau 7,6 % yang telah mencapai melebihi target 100% dan 86 indikator atau 86% telah tercapai sesuai dengan target.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Setda**

### **2.2.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten

merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati serta mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Staf Ahli, 3 (tiga) Asisten, dan 10 (sepuluh) Bagian yaitu :

**Sekretaris Daerah;**

**a. Asisten ;**

Asisten terdiri dari :

- 1). **Asisten Pemerintahan**, mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan strategis dan pelaporan bidang pemerintahan, pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah, penyelenggaraan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi bidang pemerintahan umum maupun pemerintahan desa, hukum, hubungan masyarakat, perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan keagrariaan.
- 2). **Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat**, mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, perencanaan strategis, sistem informasi, pelaporan bidang ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, pengoordinasian

perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan administrasi, pengoordinasian fasilitasi, pengoordinasian pemantauan dan evaluasi bidang perekonomian daerah, pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat, melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan program pembangunan, perekonomian daerah, dan kesejahteraan rakyat.

- 3). **Asisten Administrasi**, mempunyai tugas melaksanakan dan membina serta mengoordinasikan urusan rumah tangga, tata usaha dan keuangan Pimpinan, umum, organisasi dan tata laksana, sandi dan telekomunikasi, serta pengolahan data elektronik.

#### **b. Bagian**

Bagian terdiri dari :

1. **Bagian Pemerintahan Umum**, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan umum pemerintah daerah, rencana dan program bidang pemerintahan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi bidang pemerintahan umum, perangkat daerah dan pertanahan.
2. **Bagian Pemerintahan Desa**, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis untuk pembinaan tata pemerintahan desa, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pengembangan desa, pembinaan dan pengembangan kelembagaan desa, pembinaan aparatur desa, pembinaan administrasi desa, serta pengelolaan kekayaan dan keuangan desa.
3. **Bagian Hukum**, mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang hukum, penyelenggaraan sistem informasi, pelaporan bidang hukum, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, informasi dan dokumentasi hukum.
4. **Bagian Hubungan Masyarakat**, mempunyai tugas pokok melaksanakan serta membina hubungan kemasyarakatan guna memperjelas kebijakan Bupati.
5. **Bagian Perekonomian**, mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang perekonomian, perencanaan strategis dan pelaporan bidang perekonomian, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi bidang ekonomi daerah, produksi daerah, energi sumber daya mineral, BUMD, dan pembinaan terhadap lembaga keuangan mikro.
6. **Bagian Pembangunan**, mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang pembangunan, perencanaan strategis bidang pembangunan

daerah, pelaksanaan sistem informasi, pelaporan bidang pembangunan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi bidang penyusunan program dan pengendalian pembangunan, analisis dan pengkajian pembangunan, pelaksanaan dan pelayanan teknis bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan.

7. **Bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat)**, mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan umum Pemerintah Daerah, perencanaan strategis, sistem informasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat, melaksanakan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi bidang sosial, agama, pemberdayaan perempuan, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga.
8. **Bagian Umum**, mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata usaha Pimpinan, kearsipan dan keuangan, administrasi keuangan Pimpinan dan Sekretariat Daerah, mengelola rumah tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah, mengelola pemeliharaan dan perawatan gedung Sekretariat Daerah, kantor/rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta urusan keprotokolan dan perjalanan dinas.
9. **Bagian Organisasi Dan Tata Laksana**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah, pelaksanaan teknis Analisis dan formasi Jabatan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja, analisis kebijakan kepegawaian serta mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan SETDA.
10. **Bagian Sandi dan Telekomunikasi**, dan Pengolahan Data Elektronik, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi pengembangan dan pengendalian bidang komputerisasi dan informatika, pengembangan sistem jaringan dan informasi elektronik pemerintahan, pengumpulan, pengolahan, akses pelayanan data dan informasi serta pengelolaan sandi dan telekomunikasi.

### 2.2.2 Susunan Kepegawaian

Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2016, dapat dirinci sebagai berikut :

#### a. Menurut Jenis Jabatan :

Instansi	Eselon							Fungsional Umum	Jml
	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a		
SEKRETARIAT	1	3	9	0	27	0	0	104	144

DAERAH									
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>144</b>

## b. Menurut Jenis Pendidikan:

Status Kepeg	LAKI-LAKI												
	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	SNK	SAK	S1	S2	S3	jml Lk
<b>PNS</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
<b>CPNS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>103</b>

Status Kepeg	PEREMPUAN												
	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	SNK	SAK	S1	S2	S3	jml Pr
<b>PNS</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
<b>CPNS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>41</b>

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana terlampir.

### 2.2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas di Sekretariat Daerah, adanya sarana dan prasarana yang memadai dan mengikuti perkembangan jaman sangat dibutuhkan. Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Daerah diperlengkapi dengan areal tanah yang luas, gedung perkantoran yang memadai, serta sarana prasarana lain diantaranya:

No	Kib	Jumlah

1	KIB A	45 bidang tanah
2	KIB B	1.837 peralatan dan mesin
3	KIB C	40 gedung dan bangunan
4	KIB D	19 jalan, irigasi, dan jembatan
5	KIB E	338 aset tetap lainnya
6	ASET LAINNYA	38 aset
7	BARANG EKSTRAKOMPETEBEL	434 jenis

#### 2.2.4. Capaian Kinerja Pelayanan Setda

Berdasarkan tugas pokok fungsi dan sumber daya yang dimiliki, Sekretariat Daerah dituntut untuk mampu meningkatkan capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Realisasi kinerja pelayanan pada tahun 2016 yang telah sesuai target diharapkan dapat terulang pada tahun-tahun berikutnya, sehingga target kinerja pertahun selalu dapat tercapai. Adapun capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daeah Tahun 2016 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 2.2

#### Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja	satuan	Target					Realisasi			Capaian sd 2016	status
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016		
1	Besaran kerjasama daerah	dokumen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	akan tercapai



2	Cakupan Pelaksanaan SPM	%	72,4	91,7	96,8	96,8	96,8	52,9	86,5	51,9	54	Perlu upaya keras
3	Tersedianya lahan untuk persiapan pembangunan jalan lingkar Kota Parakan	hektar	-	2	6	11	19	0	0	0	0	Perlu upaya keras
4	Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai	Unit	1	-	1	1	1	3	4	6	150	Telah tercapai
5	Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara	unit	-	0	0	1	1	0	0	0	0	Perlu upaya keras
6	Persentase Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat	%	84,5	88,4	92,3	96,13	100	83,6	92	94	98	Akan tercapai
7	Persentase Penggantian Tanah Pemerintah Desa yang Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten	%	7,5	12,5	15	17,5	20	0	7,5	7,5	37,5	Akan tercapai
8	Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah tercapai
9	Persentase Tertib Administrasi di tingkat Kelurahan	%	10	25	50	75	100	10	12,5	50	100	Telah tercapai
10	Cakupan Pembinaan Administrasi Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah tercapai
11	Persentase Penanganan Kepala Desa dan Perangkat Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah tercapai

	yang Mengalami Kasus											
12	Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong	%	92.2	100	100	100	100	0	0	103	103	Telah tercapai
13	Persentase Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong	%	97	97	97	97	97	0	100	103	106	Telah tercapai
14	Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti Terhadap Jumlah Total Peraturan Daerah dalam 1 (Satu) Tahun	%	100	100	100	100	100	45	79	100	100	Akan tercapai
15	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Luar Ruang	kali	2	4	6	8	10	4	24	23	383	Telah tercapai
16	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa	kali	2	4	6	8	10	7	226	13	217	Telah tercapai
17	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui media baru	hari	2	4	6	8	10	2	490	626	10433	Telah tercapai
18	Persentase Perlindungan Sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah tercapai
19	Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang Menyusun Standar Pelayanan Publik	%	7	15	45	70	100	7	15	23	52	Perlu upaya keras

20	Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang telah Memiliki SOP	%	8	25	50	75	100	6	14	40	80	Perlu upaya keras
21	Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	kriteria	CC	B	B	B	B	C	C	CC	85	Perlu upaya keras
22	Persentase Ketepatan Waktu SKPD dalam Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIP dan TAPKIN)	%	70	80	90	95	95	63	100	100	111	Telah tercapai
23	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	kriteria	B	B	B	B	B	B	B	B	100	Telah tercapai
24	Persentase Keberhasilan pengadaan barang/jasa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	99,6	Akan tercapai
25	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Akan tercapai
26	Persentase Jumlah SKPD yang Menyampaikan DURP dengan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	68	93	89	89	Akan tercapai
27	Besaran Ketersediaan sarana dan prasarana kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah tercapai

28	Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government	%	15	35	55	75	100	15	20	20	20	Perlu upaya keras
29	Cakupan terbangunnya Integrasi Jaringan Informasi dan Komunikasi	%	15	35	55	75	100	15	35	35	35	Perlu upaya keras
30	Rasio Akses Internet di Ruang Publik	%	15	35	55	75	100	15	35	35	35	Perlu upaya keras
31	Cakupan Pemberian Bantuan Tempat Ibadah	%	100	100	100	100	100		75	54	72	Akan tercapai
32	Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Pondok Pesantren	%	100	100	100	100	100		5	3	60	Akan tercapai
33	Cakupan Pemberian Bantuan Kepada TPQ	%	100	100	100	100	100		20	18	90	Akan tercapai
34	Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Madrasah Diniyah	%	100	100	100	100	100		16	16	100	Akan tercapai

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda

Realisasi target indikator kinerja program/ kegiatan di Setda setiap tahun dapat tercapai hampir 100%. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari hasil kerja keras dari seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya.

Namun demikian masih ditemui beberapa permasalahan yang muncul dalam pencapaian kinerja di Sekretariat Daerah. Beberapa kendala dan hambatan yang ditemui dan dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Perencanaan kegiatan pembangunan masih belum optimal yaitu dalam penetapan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan, sehingga belum mampu sebagai alat pengendali agar kegiatan

pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

2. Ketersediaan anggaran dan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang cukup terbatas sehingga mempengaruhi capaian hasil kegiatan;
3. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, telah mengurangi tingkat pencapaian target kegiatan.
4. SDM pelaksana kegiatan yang terbatas baik kuantitas maupun kualitas, menyebabkan hasil beberapa pelaksanaan kegiatan belum maksimal.
5. Pelibatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih perlu ditingkatkan agar hasil beberapa kegiatan lebih optimal.

Adapun strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah:

1. Perencanaan kegiatan dilaksanakan secara lebih matang, yang dimulai pada saat pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
2. Meningkatkan kegiatan pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga dapat secara dini mengetahui permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul serta segera dilaksanakan upaya pemecahan masalah.
3. Perencanaan tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan lebih awal dan cermat, segera setelah APBD ditetapkan sehingga waktu yang tersedia relatif lebih leluasa dalam menyelesaikan kegiatan pembangunan;
4. Kegiatan diarahkan untuk tercapainya output dan standar mutu yang jelas sehingga penggunaan anggaran yang terbatas tetap efektif dan efisien menghasilkan capaian yang ditargetkan.
5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal antar SKPD, serta komunikasi/koordinasi eksternal ke Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Tidak kalah strategis pula untuk meningkatkan dan memperluas kerja sama dengan pihak perguruan tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun non pemerintah guna mendukung pencapaian sasaran;
6. Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana kegiatan secara berkesinambungan baik melalui sosialisasi, bintek, maupun diklat. Pembekalan tentang peraturan-peraturan yang selalu berkembang, termasuk didalamnya pembekalan terkait dengan penguasaan Teknologi Informasi, sangat dibutuhkan oleh SDM pelaksana kegiatan.

7. Meningkatkan sosialisasi program dan kegiatan kepada masyarakat guna meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai strategi guna meningkatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada awal tahun 2017, masing-masing Bagian di Setda telah menyusun rancangan awal rencana kerja untuk tahun 2018. Rancangan awal tersebut disusun secara cermat guna pencapaian target indikator kinerja Setda dan Kabupaten. Selanjutnya, rancangan awal tersebut masih perlu di bahas dalam Musrenbang guna dilakukan penyempurnaan setelah mencatat dan mengkaji aspirasi dan kebutuhan dari para pemangku kepentingan.

Berikut kami sampaikan data perbandingan sebelum dan sesudah dilaksanakan desk dan Musrenbang.

Tabel 2.3

Data Perbandingan sebelum dan sesudah Desk Musrenbang

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	
					sebelum desk	setelah desk
					8	9
1	2	3	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>				<b>27,792,000,000</b>	<b>24,345,000,000</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>26,600,000,000</b>	<b>23,400,000,000</b>
	<b>Belanja Hibah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>				<b>26,600,000,000</b>	<b>23,400,000,000</b>
1	Kegiatan belanja Hibah kepada KPU	Tersalurkannya belanja hibah kepada KPU	1	Kegiatan	20,000,000,000	19,000,000,000
2	Kegiatan belanja Hibah kepada Panwaslu	Tersalurkannya belanja hibah kepada panwaslu	1	Kegiatan	6,600,000,000	4,400,000,000

	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>1,192,000,000</b>	<b>945,000,000</b>
<b>I</b>	<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					
<b>A</b>	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>				<b>140,000,000</b>	<b>140,000,000</b>
	Koordinasi Keamanan Daerah	Terlaksananya pengamanan daerah dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan Natal	2	Keg	140,000,000	140,000,000
<b>II</b>	<b>FUNGSI LAINNYA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					
<b>B</b>	<b>Program Pendidikan dan Politik Dalam Negeri</b>				<b>175,000,000</b>	<b>100,000,000</b>
1	Kegiatan Desk Pemilihan Umum	Terfasilitasinya pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum	2	Keg	175,000,000	100,000,000
<b>III</b>	<b>FUNGSI LAINNYA SEKRETARIAT DAERAH</b>					
<b>C</b>	<b>Program Kerjasama Daerah</b>				<b>155,000,000</b>	<b>190,000,000</b>
1	Kegiatan Peningkatan Kerjasama antar Daerah melalui fasilitasi dan monitoring evaluasi kerjasama	Terfasilitasinya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan daerah lain atau pihak ketiga sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	1	Dok	50,000,000	50,000,000
2	Kegiatan Pemeliharaan Pilar Batas daerah di Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonosobo	Terlaksananya pemeliharaan, perbaikan dan penanaman kembali pilar batas yang rusak, hilang atau bergeser	1	Paket	105,000,000	140,000,000

		Tersusunnya Perbup tentang batas Desa/Kelurahan	1	Dok		
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah</b>					
1	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM)	Tercapainya indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	96,8	%	42,000,000	40,000,000
2	Kegiatan Pembuatan dan Publikasi LPPD, LKPJ, AMJ dan Memori Jabatan Bupati	Tersusunnya pelaporan pemerintah daerah (LPPD, LKPJ, AMJ dan Memori Jabatan Bupati)	5	Dok	170,000,000	300,000,000
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur kecamatan	20	Kec	140,000,000	25,000,000
<b>F</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>					
1	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	2	Keg	325,000,000	150,000,000
<b>2</b>	<b>BAGIAN PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>1,065,000,000</b>	<b>905,000,000</b>
	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>1,065,000,000</b>	<b>905,000,000</b>
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>0</b>	<b>240,000,000</b>
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>1,065,000,000</b>	<b>665,000,000</b>
<b>Sumber Dana : DAU</b>					<b>0</b>	<b>665,000,000</b>



<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>						<b>665,000,000</b>
<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa</b>						
1	Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pelaksanaan Pilkades		12	Desa	0	240,000,000
<b>BELANJA LANGSUNG</b>					<b>1,065,000,000</b>	<b>665,000,000</b>
<b>1.</b>	<b>fungsi penunjang setda</b>					
<b>A.</b>	<b>Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah</b>					<b>100,000,000</b>
1.	Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa	Jumlah tukar menukar tanah kas desa yang dan alih fungsi tanah kas desa	10	Bidang	50,000,000	45,000,000
2.	identifikasi data alih fungsi dan Penyusunan tataguna tanah kas Desa	Terlaksananya inventarisasi data pemanfaatan dan alih fungsi tanah kas desa	20	kecamatan	55,000,000	55,000,000
<b>B</b>	<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemeritahan desa</b>					<b>385,000,000</b>
1.	Pengisian kekosongan perangkat Desa	Persentase pengisian jabatan perangkat desa yang kosong	77	Orang	40,000,000	40,000,000
2.	Pembinaan Administrasi	Meningkatnya tertibnya administrasi	266	Desa	50,000,000	50,000,000
3.	Bintek BPD	Terlaksananya bintek bagi Anggota BPD se Kabupaten Temanggung	266	Orang	100,000,000	100,000,000
4.	Penguatan Kekayaan Desa	Penguatan Kekayaan Desa	266	Desa	95,000,000	95,000,000
5.	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa	12	Desa		100,000,000
<b>C.</b>	<b>Program penataan peraturan perundang-undangan</b>					<b>180,000,000</b>

1.	Evaluasi rancangan Peraturan Desa	Evaluasi rancangan Peraturan Desa	266	Desa	20,000,000	20,000,000
2.	Penyusunan Raperda tentang Desa	Tersusunnya Raperda tentang Desa	2	Perda	30,000,000	50,000,000
3.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Desa	Tercetaknya buku Perbup tentang Desa	4	Perbup	45,000,000	60,000,000
4.	Sosialisasi Perda dan perbub desa	Tersosialisasinya perda dan Perbub serta Tercetaknya jenis buku kumpulan perundang – undangan	1	Kegiatan	45,000,000	50,000,000
<b>3</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>				<b>2,209,235,000</b>	<b>2,399,000,000</b>
	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>2,209,235,000</b>	<b>2,399,000,000</b>
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG				-	-
B.	BELANJA LANGSUNG				2,209,235,000	2,399,000,000
<b>Sumber Dana : DAU</b>					<b>2,209,235,000</b>	<b>2,399,000,000</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>					<b>2,209,235,000</b>	<b>2,399,000,000</b>
<b>2.</b>	<b>Fungsi penunjang Sekretariat Daerah</b>					
<b>A.</b>	<b>Program penataan peraturan perundang-undangan</b>					<b>2,399,000,000</b>
1.	legislasi peraturan perundang undangan	Terbahasnya raperda	15	Perda	126,410,000	135,000,000
2.	fasilitasi sosialisasi Per UU	Tersosialisasinya peraturan perundang-	35	Desa	125,000,000	140,000,000

		undangan				
3.	Kajian peraturan undang-undangan thd per UU yang berlaku lbh tinggi & keserasian antar per UU an	terkajinya produk hukum sesuai peaturan perundang-undangan	20	Raperbu p	110,000,000	118,000,000
4.	Dokumentasi dan informasi hukum	Terdokumentasinya informasi hukum	120	Buku	51,055,000	85,000,000
5.	PengelilaanSJDJ Hukum	Terkelolalnya kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum	100	Persen	50,000,000	65,000,000
6.	Peningkatan KAdarkum	Meningkatnya kesadaran hukum kader TP-PKK melalui kadarkum	20	kecamatan	60,000,000	68,000,000
7.	Rencana aksi nasional HAM	Terlaksananya RANHAM	4	Kali	35,000,000	38,000,000
8.	Pelayanan bantuan hukum didalam dan di luar pengadilan	Tertanganinya sengketa Datun Pemkab Temanggung	26	NL	1,651,770,000	1,750,000,000
			6	L		
<b>4</b>	<b>BAGIAN KESRA</b>				<b>10,715,850,000</b>	<b>10,102,000,000</b>
	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>10,715,850,000</b>	<b>10,102,000,000</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>3,940,000,000</b>	<b>6,800,000,000</b>
<b>A.</b>	<b>BELANJA HIBAH</b>				<b>3,825,000,000</b>	<b>6,650,000,000</b>
a	Hibah kepada PMI	Tersalaurkannyahibah kepada PMI	1	Lembaga	100,000,000	100,000,000
b	Hibah kepada Kwardcab Pramuka 11.23 Temanggung (ke dindik)	Tersalaurkannyahibah kepada Kwardcab	1	Lembaga	130,000,000	200,000,000

c	Hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung (ke dindik, 2018 anggaran tidak ada)	Tersalurkannya hibah Dewan Pendidikan	1	Lembaga	120,000,000	0
d	Hibah kepada Lembaga Keagamaan	Tersalurkannya hibah kepada Lembaga Keagamaan (MUI)	1	Lembaga	475,000,000	500,000,000
e	Hibah kepada BAZ	Tersalurkannya hibah kepada BAZ	1	Lembaga	-	200,000,000
f	Belanja Hibah Tempat Ibadah, Sarpras Pendidikan dan Sarpras Lembaga Keagamaan Lainnya	Tersalurkannya hibah kepada tempat ibadah, Sarpras, Pendidikan dan sarpras lembaga lainnya	250	Lembaga	3,000,000,000	1,650,000,000
g	Belanja hibah kepada PD Muhammadiyah	tersalurkannya hibah kepada PD Muhammadiyah	1	Lembaga		2,000,000,000
h	Belanja hibah kepada PC NU	tersalurkannya hibah kepada PC NU	1	Lembaga		2,000,000,000
<b>B</b>	<b>BELANJA SOSIAL</b>				<b>115,000,000</b>	<b>150,000,000</b>
a	Bantuan kepada anak yatim pada acara buka puasa bersama	Tersalurkannya bantuan kepada Yatim Piatu pada acara buka bersama	200	Orang	40,000,000	50,000,000
b.	Bantuan Penyantunan Sosial	Tersalurkannya biaya pendampingan keluarga td mampu dalam proses pengobatan.	40	Orang	75,000,000	100,000,000
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>6,775,850,000</b>	<b>3,302,000,000</b>
<b>I</b>	<b>PENDIDIKAN</b>					
<b>1</b>	<b>Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan</b>					
a	Pemberian bantuan Kesejahteraan Wiyata Bhakti	Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan				

	Pendidikan	kependidikan lingkup kemenag.				
<b>2</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>				<b>150,000,000</b>	<b>250,000,000</b>
a	Pemberian bantuan siswa dan masyarakat berprestasi	Meningkatnya prestasi siswa dan masyarakat Temanggung di berbagai bidang	150	Orang	150,000,000	250,000,000
<b>II</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				<b>30,000,000</b>	<b>50,000,000</b>
<b>1</b>	<b>Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga</b>					
a	Keg. Fasilitas Olahraga di lingkungan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya kegiatan olahraga bagi karyawan Setda dan Pemkab	30	Kali	30,000,000	50,000,000
<b>III</b>	<b>KESEHATAN</b>					
<b>1</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>				<b>50,000,000</b>	<b>100,000,000</b>
a	Kegiatan Rakor TP UKS Kab. Temanggung	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa tingkat dasar.	2	Keg	50,000,000	100,000,000
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Nilai Keagamaan</b>				<b>1,257,000,000</b>	<b>2,777,000,000</b>
a	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah haji	Terselenggaranya kegiatan Ibadah Haji	1	Keg	570,000,000	950,000,000
b.	MTQ Pelajar, STQ, MHQ dan seleksi Rebana (Realisasi Keg menyesuaikan Provinsi)	Terselenggaranya MTQ, STQ, MHQ Tk Kabupaten dan pengiriman ke Provins, MAPSI, dan LPTQ	5	Keg	327,000,000	450,000,000
c.	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Penyelenggaraan Tarkhim ( Tarwih dan Silatiurohm)	Terlaksanya Kegiatan Keagamaan : Tarkhim, PHBI, Jumat Legi, Sholawatan Siduduro, .... )	60	Keg	300,000,000	850,000,000

d.	Pelatihan Guru TPQ dan Badan Koordinasi TPQ	Meningkatnya kapasitas guru TPQ dan Batko TPQ	260	Orang	25,000,000	57,000,000
e.	Pelatihan Managemen Masjid	Meningkatnya pemahaman takmir masjid dalam pengelolaan masjid.	200	Orang	35,000,000	50,000,000
f.	Fasilitasi pensertifikatan tanah wakaf tempat ibadah dan sarana (tempat) pendidikan keagamaan	Terbantunya pensertifikatan tanah wakaf tempat ibadah dan sarana (tempat) pendidikan keagamaan	75		0	50,000,000
g.	Fasilitasi AGAPAI (Asosiasi Guru Agama Pendidikan Agama Islam)					370,000,000
<b>IV</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					
<b>1</b>	<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>				<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
a.	Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya kualitas anak dan perempuan	10	Keg	15,000,000	0
<b>V</b>	<b>FUNGSI LAINNYA</b>					
<b>1</b>	<b>Program penyaluran bantuan hibah</b>					<b>125,000,000</b>
a.	Kegiatan fasilitas kegiatan penyaluran bantuan/ hibah	Terfasilitasinya penyaluran bantuan hibah	12	Bulan		125,000,000
<b>5</b>	<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>				<b>1,267,000,000</b>	<b>11,705,000,000</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>1,267,000,000</b>	<b>11,705,000,000</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>					1,267,000,000	11,705,000,000

<b>I</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>						
<b>A</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						
a.	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan bidang ekonomi	5	kegiatan	90,000,000	100,000,000	
b.	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan TPID	Terkoordinasi pengendalian inflasi di daerah kabupaten	3	kegiatan	30,000,000	55,000,000	
<b>B</b>	<b>Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM</b>						<b>20,000,000</b>
a.	Kegiatan Monitoring Program Kredit Lunak	Terlaksananya monitoring ke penerima Kredit Lunak dan LED	60	Kelompok	18,000,000	20,000,000	
<b>C</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>						<b>10,245,000,000</b>
a.	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi BUMD	Terlaksananya pembinaan & evaluasi BUMD	4	kegiatan	75,000,000	75,000,000	
b.	Kegiatan Fasilitasi Manajemen Organisasi BUMD	Terlaksananya kegiatan fasilitas manajemen organ dan pengelolaan BUMD	1	kegiatan	18,000,000	150,000,000	
c.	Kegiatan Fasilitasi Penyertaan Modal	Terlaksananya penyusunan Raperda Penyertaan Modal	1	RAT	18,000,000	20,000,000	
d.	Penyertaan modal BUMD					10,000,000,000	
<b>D</b>	<b>Program peningkatan ketahanan pangan</b>						
a.	Kegiatan Pendampingan Program RASKIN	Terkoordinasinya penyaluran program RASKIN sesuai RTS/RTM	12	Bulan	1,000,000,000	1,250,000,000	
<b>E</b>	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>						
a.	Kegiatan Pengawasan Program LPG 3 KG	Terkoordinasinya penyaluran LPG 3 KG	12	Bulan	18,000,000	35,000,000	

		sesuai kuota					
<b>F</b>	<b>DBHCHT</b>						
<b>1</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>						
a	Kegiatan sosialisasi ketentuan bidang cukai	Terkoordinasinya penggunaan dana DBHCHT sesuai peraturan	3	kegiatan		200,000,000	
<b>6</b>	<b>BAGIAN PEMBANGUNAN</b>				<b>730,000,000</b>	<b>755,000,000</b>	
	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>730,000,000</b>	<b>755,000,000</b>	
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG						
B.	BELANJA LANGSUNG				730,000,000	755,000,000	
<b>Sumber Dana : DAU</b>					<b>730,000,000</b>	<b>755,000,000</b>	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>					<b>730,000,000</b>	<b>755,000,000</b>	
<b>I</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>						
<b>A.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						
1.	Fasilitasi Pelaksanaan DAK, dan bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan DAK dan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota	4	laporan	50,000,000	50,000,000	
<b>II</b>	<b>Fungsi lainnya Setda</b>						
<b>B.</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah</b>						
1.	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung	Tersusunnya Buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung	1	dokumen	83,000,000	85,000,000	
<b>C.</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah</b>						



1.	Pengendalian pelaksanaan kegiatan (Pengendalian Program)	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan dan terverifikasinya dokumen kontrak pengadaan barang/jasa SKPD	3	kegiatan	143,000,000	145,000,000
<b>D</b>	<b>Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa</b>					
1.	Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Terlaksananya pelelangan umum barang/jasa pemerintah	1	kegiatan	306,000,000	365,000,000
2.	Peningkatan SDM Pengelola ULP	Sosialisasi LPSE dan ULP serta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2	kegiatan	84,000,000	85,000,000
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana LPSE	Pengadaan sarana dan prasarana LPSE	1	Paket	62,000,000	25,000,000
<b>7</b>	<b>BAGIAN UMUM</b>				<b>33,235,970,000</b>	<b>39,567,231,508</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>33,235,970,000</b>	<b>39,567,231,508</b>
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG				0	<b>12,212,231,508</b>
B.	BELANJA LANGSUNG				33,235,970,000	<b>27,355,000,000</b>
<b>Sumber Dana : DAU</b>					<b>33,235,970,000</b>	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
A.	Belanja Pegawai	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	12	Bulan		8,551,231,508
b	TPP	Tersedianya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	12	Bulan		3,661,000,000
<b>BELANJA LANGSUNG</b>					<b>33,235,970,000</b>	

<b>2.</b>	<b>Pendukung operasional PD</b>						
<b>A.</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>					<b>18,195,000,00</b>	
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening listrik, PJU, telpon, dan air	12	Bulan	12,000,000,000	2,000,000,000	
2.	Penyediaan jasa pemel. dan perijinan kendaraan dinas/ops	Tersedianya jasa service untuk kendaraan dinas, penggantian suku cadang, tersedianya BBM/gas dan pelumas, KIR, dan STNK	12	Bulan	800,000,000	1,000,000,000	
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih, dan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	800,000,000	1,100,000,000	
4.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kantor berupa telpon, AC dan meubelair yang memadai, dan jasa perbaikan alat kerja	12	Bulan	100,000,000	150,000,000	
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	12	Bulan	100,000,000	200,000,000	
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	12	Bulan	200,000,000	250,000,000	
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat listrik dan elektronika	12	Bulan	100,000,000	200,000,000	
8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Wawasan, dan Kompas, dan referensi perundang-undangan dan peraturan lainnya	12	Bulan	98,000,000	150,000,000	

9.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan rumah tangga Bupati dan Wabup	12	Bulan	2,250,000,000	2,500,000,000
10.	Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain dan dengan pemerintah pusat	12	Bulan	3,000,000,000	3,000,000,000
11.	Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah	Tercukupinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi antar instansi, SKPD	12	Bulan	40,000,000	45,000,000
12.	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya honor tenaga honorer, penjaga repeater, dan petugas kebersihan rumah dinas, dan pembantu rumah dinas	12	Bulan	550,000,000	900,000,000
13.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	12	Bulan	4,500,000,000	6,700,000,000
<b>B.</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>					<b>6,575,000,000</b>
1.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	450,000,000	4,700,000,000
2.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas yang memadai	12	Bulan	600,000,000	350,000,000
3.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	12	Bulan	1,550,000,000	275,000,000
4.	Pengadaan meubelair	Tersedianya sarana dan prasarana kantor berupa meubelair yang memadai	12	Bulan	275,000,000	275,000,000

5.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpenuhinya kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan rumah dinas	12	Bulan	547,970,000	400,000,000
6.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor	12	Bulan	1,100,000,000	400,000,000
7.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan Perbaikan dan pemeliharaan komputer, LCD, mesin ketik, alat kesenian	12	Bulan	90,000,000	175,000,000
<b>C.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>					
1	Pengadaan pakaian Dinas dan atributnya	Terpenuhinya kebutuhan pakain dinas bupati, Wabup, Sekda,pejabat eselon, staf	35 stel PSL, 2 stel PDU & Atribut, 16 stel PSR, 12 stel PDH Bupati & Wabup, 25 stel PDH Spri, 16 stel Batik Bupati & Wabup, PSL kabag dan Asisten, PDH Karyawan karyawati setda		250,000,000	300,000,000
<b>D.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>					
1.	Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia)	kepesertaan kabupaten temanggung sebagai anggota APKASI dan FORSESDASI	12	Bulan	35,000,000	35,000,000
2.	Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ LPND dan peringatan hari besar nasional dan daerah	12	Bulan	3,000,000,000	2,250,000,000

<b>9</b>	<b>BAGIAN ORTALA</b>				<b>1,550,000,00</b>	<b>1,515,000,00</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>1,550,000,00</b>	<b>1,515,000,00</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
B.	BELANJA LANGSUNG				1,550,000,00	1,515,000,00
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sumber Dana : DAU</b>					<b>1,550,000,00</b>	<b>1,515,000,00</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BELANJA LANGSUNG					1,550,000,00	1,515,000,00
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN</b>					
<b>A.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					
1.	Penyusunan Perjanjian Kerja Bupati Tahun 2018 dan Penyusunan Ikjip Bupati Tahun 2017	Dokumen Penetapan Kinerja Bupati 2018 dan laporan kinerja Bupati Tahun 2017	2	Dokumen	30,000,000	85,000,000
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	3	Dokumen	5,000,000	5,000,000
3	Penyusunan LKjIP Kabupaten	Dokumen laporan kinerja Bupati Tahun 2017				
<b>2</b>	<b>FUNGSI LAINNYA SETDA</b>					
<b>B.</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah</b>					
1.	Pengembangan Budaya Kerja dan Integritas Aparatur	Sosialisasi dan penerapan pengembangan budaya kerja dan integritas aparatur	1	Kegiatan	75,000,000	75,000,000
<b>C.</b>	<b>Program pembinaan dan pengembangan aparatur</b>					
1.	Analisis Beban Kerja	Dokumen ABK	1	Dokumen	150,000,000	150,000,000
2.	Survey IKM atas Pelayanan	Data IKM	150	Satuan	100,000,000	100,000,000

	Publik			pendidikan			
3.	Penyusunan Standar kompetensi manajerial	Dokumen SKM	1	Dokumen	150,000,000	150,000,000	
4.	Pelatihan Pelayanan Prima	Terlaksananya kegiatan bimtek pelayanan Prima	100	SKPD	100,000,000	100,000,000	
<b>D.</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>						
1.	Penyusunan Buku Standar Indeks Harga	Buku Standar Indeks Harga Tahun 2018 dan dokumen perbup TPP	1	Dokumen	200,000,000	200,000,000	
<b>E.</b>	<b>Program penataan peraturan perundang-undangan</b>						<b>650,000,000</b>
1.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersusunnya Dokumen SOP AP untuk seluruh Perangkat Daerah / Unit Kerja	150	Dokumen	300,000,000	300,000,000	
2.	Penyusunan Standar Pelayanan	Dokumen Standar Pelayanan	150	Dokumen	150,000,000	150,000,000	
3.	Partisipasi Lomba Pelayanan Publik	Partisipasi penilaian lomba kinerja pelayanan public	1	Kegiatan	140,000,000	50,000,000	
4	Pembangunan Zona Integritas	terwujudnya komitmen pencegahan korupsi yang nyata	1	Kegiatan	150,000,000	150,000,000	
<b>4</b>	<b>BAGIAN HUMAS</b>				<b>6,542,638,000</b>	<b>7,256,500,000</b>	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>					6,542,638,000	7,256,500,000	
<b>1</b>	<b>KOMUNIKASI dan INFORMATIKA</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A.</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	

1	Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala	Tersedianya informasi melalui Majalah Gema Bhumi Phala	12,000,000	eksemplar MGBP	213,900,000	225,000,000
2	Pengelolaan Website Kab. Temanggung	Tersedianya informasi melalui website dan sms gateway	1200	informasi/berita/sms	161,850,000	200,000,000
3	Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi dan media massa bagi masyarakat	Meningkatnya informasi tentang kegiatan Pemkab di Temanggung	7	Penyebaran informasi di media massa dan luar ruang	200,000,000	170,000,000
4	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya informasi kepada masyarakat	500	Release	175,000,000	160,000,000
			3000	berita dimedia massa		
			28	kerjasama dengan wartawan		
5	Penyebaran Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (press tour)	Terselenggaranya kegiatan press tour	1	kegiatan	350,000,000	350,000,000
6	Penyelenggaraan Kehumasan	Tersebarluaskanya informasi kegiatan Pemkab	720	dokumentasi kegiatan pemkab	250,000,000	250,000,000
7	Pembuatan buku dan video profil Kab. Temanggung	Tersedianya buku profil dan video prof Kab. Temanggung	300/200	buku/video profil	27,000,000	75,000,000
8	Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Temanggung	Terselenggaranya kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Temanggung	1800	Program acara siaran	3,843,000,000	5,500,000,000

---

9	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio ERTE FM	Terselenggaranya siaran di Radio ERTE FM Temanggung	1800	program acara siaran	325,000,000	326,500,000
	<b>DBHCHT</b>					
1	Pengisian Materi Tayang Videotron / Pengadaan LED Videotron	Tersedianya informasi melalui videotron	240	menit SPOT	996,888,000	500,000,000



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2018

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Guna menyusun rencana kerja SKPD, maka perlu menelaah kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Alinea berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui terkait dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Bidang pembangunan yang digariskan RPJPN 2005-2025, yaitu bidang pembangunan:

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Ekonomi
3. Sarana dan Prasarana
4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6. Politik
7. Pertahanan dan Keamanan
8. Hukum dan Aparatur
9. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

Adapun arah pembangunan nasional tahun 2018 secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN

2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Isu-isu strategis pada masing-masing bidang Pembangunan adalah:

1. Makro
  - a. Pembangunan manusia dan masyarakat
2. Pembangunan manusia dan masyarakat
  - a. Kependudukan dan KB
  - b. Pendidikan
  - c. Kesehatan
  - d. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
  - e. Perlindungan anak
  - f. pembangunan masyarakat
3. Pembangunan sektor unggulan
  - a. Kedaulatan pangan
  - b. Kedaulatan energi

- c. Maritim dan kelautan
  - d. Pariwisata dan industri manufaktur
  - e. Ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas
4. Pembangunan dimensi pemerataan
- a. Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi
  - b. Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu
5. Pembangunan kewilayahan dan antar wilayah
- a. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah
6. Pembangunan politik hukum pertahanan dan keamanan
- a. Politik dan Demokrasi
  - b. Penegakan Hukum
  - c. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
  - d. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah
  - e. Pertahanan dan Keamanan

Setelah menyimak beberapa hal yang berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional tersebut diatas, terkait bidang pembangunan Hukum dan Aparatur, maka Setda telah menetapkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayan publik sebagai program yang diprioritaskan dalam Renstra.

Reformasi birokrasi atau perubahan secara sungguh-sungguh terhadap tatanan birokrasi menuju tatanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, telah menjadi keharusan di era pasar bebas

dunia saat ini.

Guna memberi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Sebagai tindaklanjutnya pemerintah juga telah menerbitkan beberapa regulasi sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi baik bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, salah satu diantaranya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.

Pemerintah Kabupaten Temanggung tentu saja tidak lepas dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan birokrasi yang ada.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan reformasi birokrasi tercermin dari visi Kabupaten Temanggung: “Pemerintahan yang bersih” dan misi keenam “Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik”. Visi dan misi terkait reformasi birokrasi tersebut, oleh Sekretariat Daerah berusaha diwujudkan melalui rencana kerja dari tahun ke tahun termasuk di tahun 2018.

### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan, merupakan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki posisi penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Kab. Temanggung 2013-2018. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2018, dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018:

- a. Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum.
- b. Terwujudnya hasil kajian dan rumusan kebijakan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Terwujudnya hubungan kelembagaan yang harmonis dan sinergis antara Eksekutif dan Legislatif.
- d. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan fasilitasi kehidupan keagamaan.
- e. Meningkatkan sinergi koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan disetiap bidang.
- f. Meningkatkan sinergi koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum.
- g. Mewujudkan kualitas dan kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah, termasuk didalamnya Perangkat Desa/Kelurahan.
- h. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi aparatur pemerintah daerah.
- i. Meningkatkan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, Produktif dan bertanggung jawab.
- j. Mewujudkan pelayanan administrasi umum dan keuangan secara cepat dan tepat, baik kepada pimpinan maupun kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
- k. Mewujudkan pengembangan dan pengelolaan aset pemerintah khususnya asset/barang inventaris yang dikelola oleh Sekretariat Daerah secara benar, tertib, dan tepat guna.
- l. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- m. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan umum dan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah.
- n. Mewujudkan ruang pengawasan masyarakat dengan membangun kotak pos pengawas dan penyediaan SMS gateway.
- o. Mengembangkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain re-design situs/web Pemkab [www.Temanggungkab.go.id](http://www.Temanggungkab.go.id), pengembangan Sistem Informasi on line antar SKPD.

Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018:

- a. Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik lokal.
- b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
- c. Terlaksananya seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam setiap bidang secara baik, terpadu, dan terkoordinir.
- d. Terwujudnya advokasi hukum bagi pemerintah daerah.
- e. Terwujudnya komunikasi yang baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- f. Terjalinnnya hubungan kelembagaan yang harmonis antara Eksekutif (SKPD) dengan Legislatif.
- g. Terlaksananya kerjasama antar daerah.
- h. Terciptanya koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum.
- i. Terciptanya lembaga pemerintah yang hemat struktur dan kaya fungsi sesuai dengan kondisi dan kepentingan daerah.
- j. Tersedianya sumberdaya aparatur yang berkualitas dan proporsional.
- k. Terwujudnya peningkatan system kelembagaan, kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintaha Desa/Kelurahan.
- l. Terwujudnya tertib pelayanan administrasi yang memadai.
- m. Terlaksananya tertib administrasi umum.
- n. Terwujudnya tertib administrasi asset pemerintah.
- o. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan.
- p. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan.
- q. Meningkatnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.
- r. Tercukupinya sarana prasarana pelayanan publik.
- s. Meningkatnya pengetahuan masyarakat soal hukum.
- t. Terwujudnya pengawasan masyarakat melalui kotak pos pengawas maupun sms gateway.
- u. Terwujudnya pengembangan sistem informasi online antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- v. Tersebar nya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui situs/website Pemerintah Kabupaten Temanggung.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dimunculkan dalam perencanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada tahun 2018, mempertimbangkan berbagai faktor pencapaian target baik secara langsung maupun tidak langsung, atas:

- a. Pencapaian visi dan misi Sekretaris Daerah

Visi Setda yang ditetapkan dalam Renstra Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 adalah :

**“TERWUJUDNYA SEKRETARIAT DAERAH YANG HANDAL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK FUNGSINYA YANG MAMPU Mendukung TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah merumuskan 6 (enam) misi daerah, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Setda dan SKPD
2. Membangun sinergi koordinasi antar SKPD dan lembaga lain guna mendorong terwujudnya regulasi dibidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesra dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan
3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur (pegawai daerah);
4. Meningkatkan pelayanan administrasi dan menjadi jembatan yang baik antara SKPD dengan Bupati;
5. Mendorong regulasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, mudah dan terjangkau serta mendukung iklim yang kondusif bagi investasi;
6. Membangun e-government untuk mempercepat pelayanan dan memberi akses pelayanan informasi kepada masyarakat;

Visi dan Misi Setda Kabupaten Temanggung tersebut menjadi pedoman utama bagi setiap Bagian dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan. Segala sumber

daya yang dimiliki Bagian akan diarahkan dan dikelola dalam rangka pencapaian visi dan misi Setda Kabupaten Temanggung tersebut.

b. Pencapaian MDGs

Target utama dari MDGs adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3, dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih. Secara keseluruhan terdapat 8 butir tujuan pembangunan milenium yaitu:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Menurunkan angka kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

c. Pengentasan kemiskinan

Masih adanya lapisan masyarakat di Kabupaten Temanggung yang berkategori belum sejahtera, menjadi perhatian dan diupayakan untuk ditanggulangi oleh semua OPD baik secara langsung maupun tidak langsung melalui rencana program dan kegiatan di OPD.

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Angka IPM merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesehatan (angka usia harapan hidup), aspek pendidikan (angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah), dan aspek ekonomi (rata-rata pengeluaran riil per kapita dalam paritas daya beli masyarakat).



Dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Sekretariat Daerah, maka pengentasan kemiskinan telah menjadi perhatian dan diupayakan melalui rencana kerja yang disusun setiap tahunnya.

d. Pencapaian SPM

Keberhasilan penerapan SPM di daerah menjadi hal yang sangat penting agar tercapai pemberian pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Rencana pencapaian SPM yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menjadi dasar perencanaan program dan kegiatan setiap tahun oleh OPD.

Guna tercapainya indikator SPM, maka Sekretariat Daerah melalui Bagian Pemerintahan Umum setiap tahun melakukan pembinaan dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal di beberapa SKPD yang memiliki SPM seperti Dinas Kesehatan, KP3M, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;

Kabupaten Temanggung merupakan daerah agraris, memiliki berbagai potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan terutama di sektor pertanian, industri pengolahan, dan sebagainya.

Dalam rangka pendayagunaan potensi ekonomi daerah, maka Sekretariat Daerah memiliki peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan ekonomi, peningkatan iklim investasi daerah, fasilitasi kemitraan petani dengan industri, monitoring program kredit lunak, serta pembinaan dan evaluasi BUMD.

Secara keseluruhan rincian program dan kegiatan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Bagian Pemerintahan**

**Belanja tidak langsung**

**FUNGSI PENUNJANG SEKRETARIAT DAERAH**

**Belanja Hibah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**

1. kegiatan belanja hibah kepada KPU

Dengan indikator tersalurkannya belanja hibah kepada KPU dengan target kinerja 1 kegiatan.

2. kegiatan belanja hibah kepada Panwaslu

Dengan indikator tersalurkannya belanja hibah kepada panwaslu dengan target kinerja 1 kegiatan.

**BELANJA LANGSUNG**

**I. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**1. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**

a. Koordinasi Keamanan Daerah

Dengan capaian indikator terlaksananya pengamanan daerah dalam rangka hari raya idul fitri dan Natal dengan target 2 kegiatan.

**II. FUNGSI LAINNYA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**2. Program pendidikan politik dalam negeri**

a. Kegiatan desk Pemilihan Umum

Dengan capaian indikator terfasilitasinya pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan target 1 kegiatan.

**III. FUNGSI LAINNYA SEKRETARIAT DAERAH**

**1. Program Kerjasama Daerah**

a. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah melalui Fasilitasi dan Monev Kerjasama

Dengan capaian indikator terfasilitasinya kerjasama antara pemerintahan

kabupaten Temanggung dengan daerah lain/ pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebanyak 1 dokumen.

- b. Kegiatan pemeliharaan pilar batas daerah di Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonosobo

Terlaksananya pemeliharaan, perbaikan dan penanaman kembali pilar batas yang rusak, hilang atau bergeser antara Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonosobo dengan target 1 paket.

**2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah**

- a. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan target 96,80 %.

- b. Kegiatan Pembuatan dan Publikasi LPPD, LKPJ, AMJ dan memori jabatan Bupati

Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator Tersusunya pelaporan pemerintah daerah (LPPD dan LKPJ akhir tahun dan AMJ dan Memori Jabatan Bupati) dengan target 5 dokumen.

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan

Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur kecamatan dan Perbup ADKEL dengan target 20 Kecamatan.

**4. Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan Pemerintah**

- a. Kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintah

Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator tercapainya peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah dibidang penyelenggaraan pemerintahan dengan target 2 kegiatan.

Di tahun 2018, Bagian Pemerintahan telah merencanakan 1 belanja hibah dengan 2

kegiatan dengan anggaran Rp. 23.400.000.000,- (belanja tidak langsung) dan 3 urusan, 4 program dan 8 kegiatan untuk belanja langsung sebesar Rp. 945.000.000,-. Sehingga total belanja pada Bagian Pemerintahan tahun 2018 sebesar Rp. 24.345.000.000,-

## **BAGIAN PEMERINTAHAN DESA**

### **BELANJA TIDAK LANGSUNG**

#### **Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa**

- a. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pelaksanaan Pilkades  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator terlaksananya kegiatan pilkades dengan tertib, lancar dan aman di 12 desa.

### **BELANJA LANGSUNG**

#### **I. FUNGSI PENUNJANG**

##### **1. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah**

- a. Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator terlaksananya tukar menukar tanah kas desa dan alih fungsi tanah kas desa sebanyak 10 bidang.
- b. Identifikasi data alih fungsi dan Penyusunan tataguna tanah kas Desa  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator terlaksananya inventarisasi data pemanfaatan dan alih fungsi tanah kas desa dengan target 20 kecamatan.

##### **2. Program peningkatan kapasitas aparatur pemeritahan desa**

- a. Pengisian kekosongan perangkat Desa  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator terlaksananya pengisian jabatan perangkat desa yang kosong sebanyak 77 orang.
- b. Pembinaan Administrasi  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator meningkatnya tertib administrasi di 266 desa.
- c. Bintek BPD  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator terlaksananya bintek bagi anggota BPD se Kabupaten Temanggung dengan target 266 orang.

d. Penguatan kekayaan Desa

Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator penguatan kekayaan Desa di 266 Desa.

e. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator terfasilitasinya kegiatan pemilihan Kepala Desa di 12 desa.

**3. Program penataan peraturan perundang-undangan**

a. Evaluasi rancangan Peraturan Desa

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terevaluasinya Rancangan Peraturan Desa bagi 266 desa

b. Penyusunan Perda tentang Desa

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang Desa dengan target 2 dokumen Perda.

c. Penyusunan Perbup tentang Desa

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersusunnya dokumen Peraturan Bupati tentang Desa dengan target 4 dokumen Perda.

d. Sosialisasi Perda dan Perbup Desa

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersosialisasinya Perda dan Perbup serta tercetaknya dokumen kumpulan peraturan perundang-undangan dengan target 1 kegiatan

Bagian Pemerintahan desa telah merencanakan 1 kegiatan dengan anggaran Rp 240.000.000,- untuk belanja tidak langsung. Dan untuk belanja langsung terdiri dari 1 urusan, 3 program 11 kegiatan dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 665.000.000,-. Sehingga total belanja pada Bagian Pemerintahan Desa tahun 2018 sebesar Rp. 905.000.000,-

**BAGIAN HUKUM**

**BELANJA LANGSUNG**

**I. FUNGSI PENUNJANG SEKRETARIAT DAERAH**

**1. Program penataan peraturan perundang-undangan**

a. Legislasi peraturan perundang undangan

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terbahasnya Raperda sebanyak 15 Perda

b. Fasilitasi sosialisasi Peraturan perundang-undangan

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan di 35 desa

c. Kajian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang undangan

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terkajinya produk hukum daerah sesuai peraturan perundang-undangan dengan target 20 Raperbup

d. Dokumentasi dan informasi hukum

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terdokumentasikannya informasi hukum sebanyak 120 buku

e. Pengelolaan SJD Hukum

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terkelolanya kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum dengan target 100 %

f. Peningkatan kesadaran hukum

Kegiatan dimaksud memiliki capaian meningkatnya kesadaran hukum kader TP-PKK melalui kadarkum di 20 kecamatan

g. Rencana aksi nasional HAM

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya RANHAM dengan target 4 kali

h. Pelayanan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tertanganinya sengketa Datun Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan target 26 perkara NL dan Perkara L

Di tahun 2018 Bagian Hukum telah merencanakan 1 Urusan, 1 program dan 8 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.399.000.000,-.

## **BAGIAN KESRA**

### **(BELANJA TIDAK LANGSUNG)**

#### **I. Belanja hibah**

1. Hibah kepada PMI

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersalurkannya Hibah kepada PMI dengan target 1 lembaga

2. Hibah kepada PMI.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersalurkannya Hibah kepada Kwarcab Pramuka 11.23 Temanggung dengan target 1 lembaga.

3. Hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung (ke dindik, 2018 anggaran tidak ada).

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersalurkannya Hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung dengan target 1 lembaga.

4. Hibah kepada lembaga Keagamaan.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersalurkannya Hibah kepada lembaga Keagamaan (MUI) dengan target 1 lembaga.

5. Hibah kepada BAZ.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersalurkannya Hibah kepada BAZ dengan target 1 lembaga.

6. Hibah tempat ibadah, sarpras pendidikan dan sarpras lembaga keagamaan lainnya.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersalurkannya hibah tempat ibadah sarpras pendidikan dan sarpras lembaga keagamaan lainnya dengan target 250 lembaga.

7. Belanja hibah kepada PD Muhammadiyah.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersalurkannya hibah kepada PD Muhammadiyah dengan target 1 lembaga.

8. Belanja hibah kepada PC NU.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersalurkannya hibah kepada PC NU dengan target 1 lembaga.

## **II. Belanja sosial**

1. Bantuan kepada anak yatim pada acara buka puasa bersama.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersalurkannya bantuan sosial kepada anak yatim pada acara buka bersama dengan target kinerja 200 Orang.

2. Bantuan penyantunan sosial.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersalurkannya bantuan penyantunan sosial dengan target 40 Orang.

## **BELANJA LANGSUNG**

### **I. URUSAN PENDIDIKAN**

**1. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan**

- a. Pemberian bantuan Kesejahteraan Wiyata Bhakti Pendidikan.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan lingkup kemenag.

**2. Program pendidikan non formal**

- a. Pemberian bantuan siswa dan masyarakat berprestasi.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Meningkatnya prestasi siswa dan masyarakat Temanggung di berbagai bidang dengan target 150 orang.

**II.URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

**3. Program pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**

- a. Kegiatan fasilitasi olahraga di lingkungan Sekretariat Setda.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terfasilitasinya kegiatan olahraga bagi karyawan Setda dan Pemkab dengan target 30 kegiatan.

**III.URUSAN KESEHATAN**

**4. Program Upaya kesehatan masyarakat**

- a. Kegiatan Rakor TP UKS Kab. Temanggung.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Cakupan penjangkaran kesehatan siswa tingkat dasar dengan target 2 kegiatan.

**IV.URUSAN SOSIAL**

**5. Program pengembangan nilai keagamaan**

- a. Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terselenggaranya kegiatan Ibadah Haji dengan target 1 kegiatan.

- b. MTQ Pelajar, STQ, MHQ dan seleksi Rebana (Realisasi Keg menyesuaikan Provinsi).

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terselenggaranya MTQ, STQ, MHQ Tk Kabupaten dan pengiriman ke Provins, MAPSI, dan LPTQ dengan target 5 kegiatan.

- c. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Penyelenggaraan Tarkhim (Tarwih dan Silaturahmi).

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya kegiatan Keagamaan : Tarkhim, PHBI, Jumat Legi, Sholawatan Siduduro) dengan target 60 kegiatan.



d. Pelatihan Guru TPQ dan badan koordinasi TPQ.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian meningkatnya kapasitas guru TPQ dan Batko TPQ sejumlah 260 orang.

e. Pelatihan Manajemen Masjid

Kegiatan dimaksud memiliki capaian meningkatnya pemahaman takmir masjid dalam pengelolaan Masjid dengan target 260 orang.

f. Fasilitasi AGAPAI (Asosiasi Guru Agama Pendidikan Agama Islam)

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terfasilitasinya guru agama pendidikan agama Islam.

g. Fasilitasi pensertifikatan tanah wakaf tempat ibadah dan sarana (tempat) pendidikan keagamaan.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terbantunya pensertifikatan tanah wakaf tempat ibadah dan sarana (tempat) pendidikan keagamaan dengan target 75.

## **V. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak**

### **6. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**

a. Kegiatan Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Cakupan Meningkatnya kualitas anak dan perempuan dengan target 10 kegiatan.

## **VI. Fungsi Lainnya**

### **7. Program penyaluran bantuan hibah**

a. Kegiatan fasilitas kegiatan penyaluran bantuan/ hibah.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Cakupan Terfasilitasinya penyaluran bantuan hibah dengan target 12 bulan.

Di tahun 2018 Bagian Kesejahteraan Rakyat telah merencanakan 2 belanja bantuan hibah untuk belanja tidak langsung dengan total anggaran Rp. 6.800.000.000,-. Sedangkan untuk belanja langsung terdiri dari 6 urusan, 7 program, 13 kegiatan dengan jumlah belanja langsung sebanyak Rp. 3.302.000.000,-. Sehingga total belanja Bagian Kesra di tahun 2018 sebesar Rp. 10.102.000.000,-

## **BAGIAN PEREKONOMIAN**

## **BELANJA LANGSUNG**

### **I. FUNGSI LAINNYA SEKRETARIAT SETDA**

#### **1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

- a. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan target 5 kegiatan.

- b. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan TPID.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya koordinasi pengawasan inflasi di daerah Kabupaten dengan target 3 kegiatan.

#### **2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM**

- a. Kegiatan Monitoring Program Kredit Lunak.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terlaksananya monitoring ke penerima Kredit Lunak dan LED dengan target 60 kelompok.

#### **3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**

- a. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi BUMD.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terlaksananya pembinaan & evaluasi BUMD dengan target 4 kegiatan.

- b. Kegiatan Fasilitasi Manajemen Organisasi BUMD.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya kegiatan fasilitas manajemen organ dan pengelolaan BUMD dengan target 5 Perda.

- c. Kegiatan Fasilitasi Penyertaan Modal.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya penyusunan Raperda penyertaan modal dengan target 1 kegiatan.

#### **4. Program peningkatan ketahanan pangan**

- a. Kegiatan Pendampingan Program RASKIN.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terkoordinasinya penyaluran program Raskin sesuai RTS/RTM dengan target 12 bulan.

#### **5. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**

- a. Kegiatan Pengawasan Program LPG 3 KG.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya distribusi LPG 3 KG sesuai kuota dengan target 12 bulan.

Bagian Perekonomian juga memiliki 1 program dengan 1 kegiatan yang bersumber dari DBHCT.

#### **6. Program perencanaan pembangunan daerah**

##### **a. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCT).**

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terkoordinasinya penggunaan dana DBHCT sesuai peraturan dengan target 3 kegiatan.

Untuk tahun 2018 Bagian Perekonomian telah merencanakan 1 urusan, 6 program, 9 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung Rp. 11.705.000.000,-.

### **BAGIAN PEMBANGUNAN**

#### **I. FUNGSI PENUNJANG**

##### **1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

###### **a. Fasilitasi pelaksanaan DAK dan bantuan keuangan kepada Kabupaten.**

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersusunnya laporan DAK dan bantuan keuangan kepada Kabupaten sebanyak 4 dokumen laporan.

#### **II. FUNGSI LAINNYA SETDA**

##### **2. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah**

###### **a. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung.**

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersusunnya buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung sebanyak 1 dokumen Perbup.

##### **3. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah**

###### **a. Pengendalian pelaksanaan kegiatan (Pengendalian Program).**

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan dan terverifikasinya dokumen kontrak pengadaan dengan target 3 kegiatan.

#### **III. Urusan komunikasi dan informatika**

#### **4. Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa**

##### **a. Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE.**

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya pelelangan umum barang/jasa pemerintah dengan target 1 kegiatan.

##### **b. Peningkatan SDM Pengelola ULP.**

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya Sosialisasi LPSE dan ULP serta pelatihan pengadaan barang/ jasa pemerintah dengan target 2 kegiatan.

##### **c. Peningkatan Sarana dan Prasarana LPSE.**

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor dengan target 1 paket.

Untuk tahun 2018 Bagian Pembangunan telah merencanakan 3 urusan, 4 program, dan 6 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung Rp. 755.000.000,-.

### **BAGIAN UMUM**

#### **BELANJA TIDAK LANGSUNG**

##### **I. Belanja Pegawai**

###### **1. Gaji**

Dengan capaian indikator kinerja tersedianya gaji dan tunjangan PNS Setda selama 12 bulan.

###### **2. TPP**

Dengan capaian indikator kinerja tersedianya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja selama 12 bulan.

#### **BELANJA LANGSUNG**

##### **I. URUSAN PENDUKUNG OPERASIONAL PD**

###### **1. Program pelayanan administrasi perkantoran**

###### **a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.**

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terbayarnya tagihan rekening listrik, PJU, telephone, dan air dengan target 12 bulan.

###### **b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ops.**

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Tersedianya jasa service untuk kendaraan

dinas, penggantian suku cadang, tersedianya BBM/ gas dan pelumas, KIR dan STNK dengan targe 12 bulan.

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya peralatan kebersihan, bahan pebersih, dan jasa kebersihan kantor dengan target 12 bulan.

d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya peralatan kantor berupa telephone, AC, dan meubelair yang memadai, dan jasa perbaikan alat kerja dengan target 12 bulan.

e. Penyediaan alat tulis kantor.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya alat tulis kantor dengan target 12 bulan.

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor dengan target 12 bulan.

g. Penyediaan komponen instalasi litrik/penerangan bangunan kantor.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya komponen alat listrik dan elektronika dengan target 12 bulan.

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya referensi guna mendukung kelancaran pelaksanaan kerja dengan target 12 bulan.

i. Penyediaan makanan dan minuman.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya makan minum rapat, tamu, dan Rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati dengan target 12 bulan.

j. Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah.

Kegiatan dimaksud memiliki capai tercukupinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain dan dengan pemerintah pusat dengan target 12 bulan.

k. Rapat- rapat dan konsultasi ke dalam daerah.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Tercukupinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi antar instansi dan organisasi pemerintah daerah dengan target 12 bulan.

l. Jasa Pelayanan Perkantoran.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tterbayarnya honor tenaga honorer, penjaga repeater, sewa tenda sewa sound system, dekorasi dan publikasi denngan target 12 bulan.

m. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedanya jasa pengamanan kantor OPD dan rumah dinas dengan target 12 bulan.

**2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kegiatan dimaksud memiliki capaian teredianya kendaraan dnas/ operasional dengan target kendaraan roda 2 (150 cc) 43 unit, kendaraan roda 2

b. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas yang memadai dengan target lemari arsip bupati 1 unit, tempat tidur sopir 2 unit, kompor gas besar

c. Pengadaan peralatan gedung kantor

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor dengan target almari arsip 8 unit, filing kabinet 4 unit, meja komputer 2 unit

d. Pengadaan mebeleur

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Tersedianya sarana dan prasarana kantor berupa meubelair yang memadai dengan target 1 meja kerja eselon 2, meja kerja eselon 3

e. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terpenuhinya kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan rumah dinas dengan target pemeliharaan atap, lantai, kamar mandi/ WC

- f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terpenuhinya kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor dengan target pemeliharaan atap, perbaikan lantai, perbaikan pintu dan jendela, pemeliharaan kolam air mancur

- g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terpenuhinya kebutuhan Perbaikan dan pemeliharaan komputer, LCD, mesin ketik, alat kesenian selama 12 bulan.

### **3. Program peningkatan disiplin aparatur**

- a. Pengadaan pakaian Dinas dan atributnya.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terpenuhinya 35 stel PSL, 2 stel PDU & Atribut, 16 stel PSR, 12 stel PDH Bupati & Wabup, 25 stel PDH Spri, 16 stel Batik Bupati & Wabup, PSL kabag dan Asisten, PDH Karyawan karyawan setda.

### **4. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**

- a. Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia).

Kegiatan dimaksud memiliki capaian keikutsertaan kabupaten Temanggung sebagai anggota APKASI dan FORSESDASI dengan target 12 bulan.

- b. Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ LPND dan peringatan hari besar dengan target 12 bulan.

Untuk tahun 2018 Bagian Umum telah merencanakan 1 Urusan, 4 program, 23 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung Rp. 27.355.000.000,-. Sedangkan untuk belanja tidak langsung yang terdiri dari gaji dan TPP sebesar Rp. 12.212.231.508, sehingga total anggaran pada Bagian Umum sejumlah Rp. 39.567.231.508,-

## **BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA**

### **BELANJA LANGSUNG**

#### **I. FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN**

##### **1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

- a. Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kerja Bupati Tahun 2018 dan Penyusunan Ikjip Bupati Tahun 2017.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya dokumen Penetapan Kinerja Bupati 2018 dan laporan kinerja Bupati Tahun 2017 dengan target 2 dokumen.

- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD dengan target 3 dokumen.

#### **II. FUNGSI LAINNYA SETDA**

##### **2. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah**

- a. Pengembangan budaya kerja dan integritas aparatur.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya sosialisasi dan penerapan pengembangan budaya kerja dan integritas aparatur dengan target 1 kegiatan.

##### **3. Program pembinaan dan pengembangan aparatur**

- a. Analisis Beban Kerja.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersusunnya dokumen Analisis Beban Kerja dengan target 1 dokumen.

- b. Survey IKM atas pelayanan publik.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya dokumen pelaporan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat di 150 Satuan pendidikan.

- c. Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya 1dokumenn Standar Kompetensi Manajerial untuk seluruh jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten Temanggung.



- d. pelatihan pelayanan prima.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terlaksananya kegiatan bimtek pelayanan Prima dengan target 100 organisasi perangkat daerah.

#### **4. program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**

- a. Penyusunan buku Standar Indeks Harga.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya 1 dokumen Standar Biaya Tahun 2018.

#### **5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**

- a. Penyusunan SOP.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya kegiatan bimbingan teknis penyusunan dokumen SOP dan tersedianya 150 dokumen SOP pada satuan pendidikan.

- b. Penyusunan Standar Pelayanan.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya kegiatan bimbingan teknis penyusunan dokumen Standar Pelayanan dan tersedianya 150 dokumen SPP pada satuan pendidikan.

- c. Partisipasi Lomba Pelayanan Publik.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Partisipasi penilaian lomba kinerja pelayanan publik dengan target 1 kegiatan.

- d. Pembangunan Zona Integritas.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terwujudnya komitmen pencegahan korupsi yang nyata dengan target 1 kegiatan.

Untuk tahun 2018 Bagian Organisasi dan Tatalaksana telah merencanakan 2 urusan, 5 program, dan 12 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung Rp. 1.515.000.000,-.

### **BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

#### **BELANJA LANGSUNG**

## **I. FUNGSI LAINNYA SEKRETARIAT DAERAH**

### **1. Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media massa**

a. Kegiatan Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Tersedianya informasi melalui Majalah Gema Bhumi Phala dengan target 12.000 eksemplar MGBP.

b. Pengisian materi Website Kab. Temanggung.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Tersedianya informasi melalui website dan sms gateway serta pengelolaan konten website PD dengan target 1.200 informasi/berita/sms.

c. Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi dan media massa bagi masyarakat.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Meningkatnya informasi tentang kegiatan Pemkab di Temanggung dengan target 7 Penyebaran informasi di media massa dan luar ruang.

d. Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Meningkatnya informasi kepada masyarakat dengan target 500 release, 3.000 berita di media massa, 28 kerjasama dengan wartawan

e. Penyebaran Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (press tour).

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terselenggaranya kegiatan press tour dengan target 1 kegiatan.

f. Penyelenggaraan Kehumasan.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Tersebarluaskanya informasi kegiatan Pemkab dengan target 720 dokumentasi kegiatan Pemerintah Kabupaten.

g. Pembuatan buku dan video profil Kab. Temanggung.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Tersedianya buku profil dan video prof Kab. Temanggung dengan target 300/200 buku/video profil.

h. Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Temanggung.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terselenggaranya kegiatan Lembaga

Penyiaran Publik Televisi Temanggung dengan target 1.800 program acara siaran.

- i. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio ERTE FM.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terselenggaranya siaran di Radio ERTE FM Temanggung dengan target 1.800 program acara siaran.

Selain kegiatan diatas, pada Bagian Humas juga terdapat kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT yaitu:

- j. Pengisian Materi Tayang Videotron / Pengadaan LED Videotron.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Tersedianya informasi melalui videotron dengan target 240 menit SPOT.

Untuk tahun 2018 Bagian Hubungan Masyarakat telah merencanakan 1 urusan, 1 program, dan 10 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung Rp. 7.256.500.000,-.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Program dan Kegiatan yang dimunculkan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada tahun 2018, mempertimbangkan berbagai faktor pencapaian target baik secara langsung maupun tidak langsung, atas Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Percepatan reformasi birokrasi, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan lainnya.

Renja tahun 2018 ini juga disusun atas dasar evaluasi Renja tahun sebelumnya. Karena sangat penting untuk diketahui program/ kegiatan apa saja yang telah dan tidak memenuhi target kinerja yang telah direncanakan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan yang telah direncanakan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD, dan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja tahun lalu.

Di dalam Rencana Kerja Setda ini terkandung sasaran, kebijakan, 35 program dan 100 kegiatan dengan anggaran Rp. 42.652.231.508,- (belanja tidak langsung) serta Rp. 55.897.500.000,- sehingga total pagu anggaran sebesar Rp. 98.549.731.508,- yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 tahun. Perlu kami sampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sifatnya masih indikatif. Sehingga dalam pelaksanaannya masih disesuaikan dengan pembiayaan/ anggaran ataupun keuangan daerah yang tersedia.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rencana kerja ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan guna perbaikan dokumen tersebut. Lebih lanjut kami berharap, agar rencana kerja Sekretariat daerah kabupaten Temanggung Tahun 2018 yang tersusun untuk dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam waktu satu tahun kedepan.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. BAMBANG AROCHMAN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19580628 198703 1 005

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018. Rencana Kerja (RENJA) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Rencana Kinerja Tahunan ini juga merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2013–2018. Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2018 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan. Pada tahun 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung merencanakan 35 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 100 kegiatan baik belanja langsung maupun tidak langsung untuk mencapai 12 urusan dengan total anggaran sebesar Rp 98.549.731.508,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 42.652.231.508,- dan belanja langsung sebesar Rp 55.897.500.000,-.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah ini dibuat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. BAMBANG AROCHMAN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19580628 198703 1 005

## **Tabel Usulan Program dan Kegiatan Setda kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019**





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Undang-undang ini juga mengamanatkan penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk didalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi:

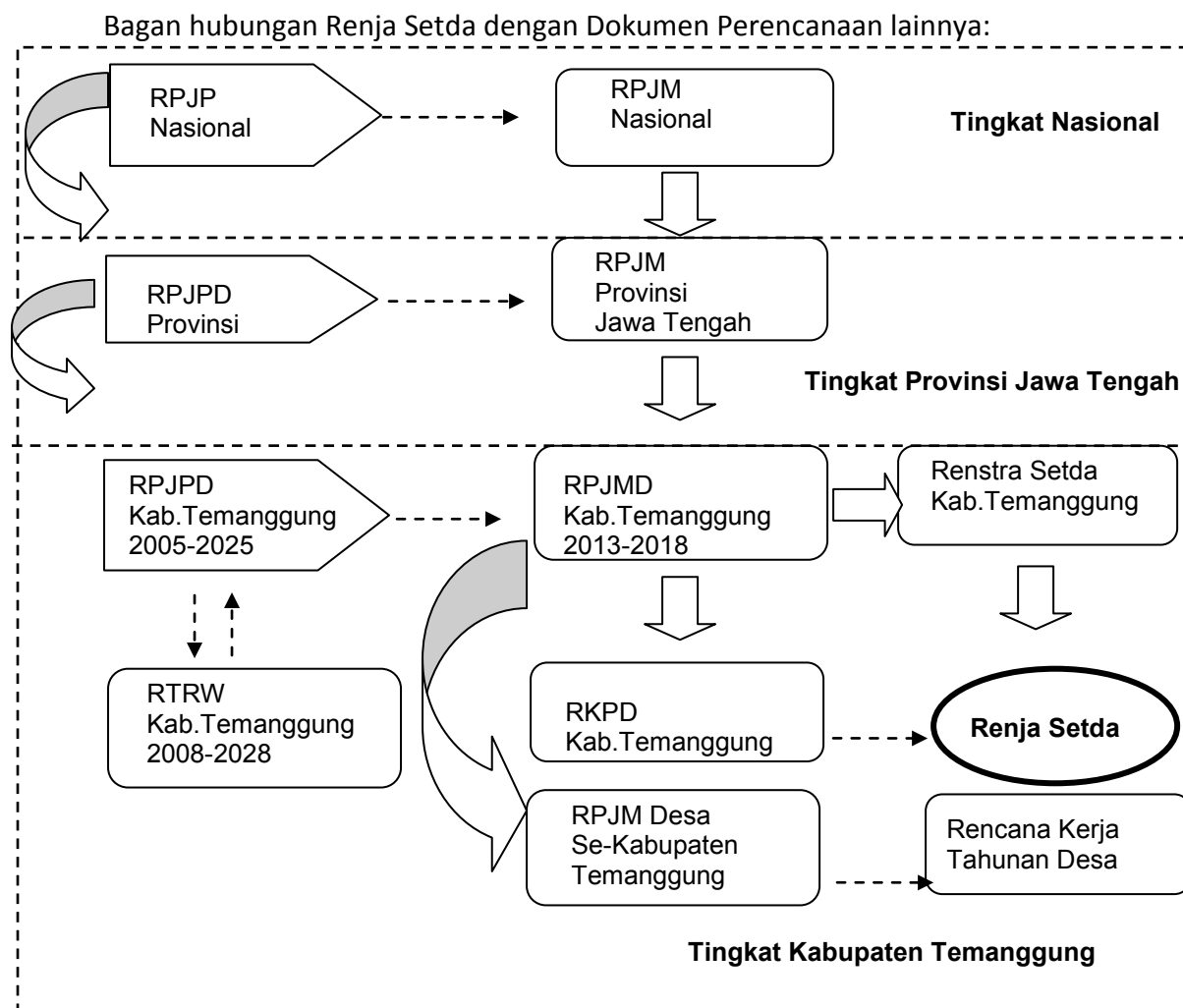
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman RPJMD Daerah setiap 5 tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berfungsi sebagai penjabaran RPJP daerah dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal arah kebijakan strategi dan indikasi program 5 tahun secara lintas pembiayaan.
3. Rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahunnya.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sehingga sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Penyusunan rencana pembangunan daerah tersebut selain mengacu kepada perencanaan pembangunan nasional juga wajib memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya RPJMD Kab. Temanggung akan menjadi dasar bagi penyusunan RKPD Kab. Temanggung setiap tahunnya, Renstra SKPD untuk periode 5 tahun kedepan, dan Renja SKPD setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah Kabupaten Temanggung yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 dimana

setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi dan juga partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan di daerah. Koordinasi perencanaan pembangunan daerah sebagai awal dari proses penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai kedudukan strategis dan fungsi yang penting dalam optimalisasi perencanaan guna meningkatkan sinkronisasi dan konsistensi dalam mencapai tujuan.

Perangkat Daerah menyusun 2 dokumen perencanaan yaitu Perencanaan Strategis (Renstra) perangkat daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan jangka waktu satu tahun pada tahun 2018. Dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018, maka penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 dilaksanakan secara matang dengan memperhatikan prinsip prioritas dan efisiensi anggaran, tetap memperhatikan alokasi anggaran tahun 2018 dan kinerja anggaran tahun 2017.



Rencana Kerja/ Kegiatan yang akan dilaksanakan disusun secara terperinci sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018 sebagai berikut:

1. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
2. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efektif dan efisiensi serta menjamin adanya kesinambungan program dari waktu ke waktu.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2016
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2018**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV PENUTUP**

##### **LAMPIRAN**

## BAB II

## EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2016

Tahun 2016 merupakan tahun ke tujuh dari pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung. Secara keseluruhan tahun anggaran 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang lalu memperoleh alokasi dana APBD sebesar Rp. 95.037.052.750,- yang terbagi dalam kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja langsung : Rp. 81.655.934.650,-
2. Belanja tidak langsung : Rp. 13.381.118.100,-

Perlu dijelaskan disini bahwa komponen belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai. Sedangkan komponen belanja langsung berbentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat daerah, sehingga anggaran tersebut diupayakan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang diemban Sekretariat Daerah.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2016, dapat dilihat beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya telah memenuhi target, melebihi target, dan yang tidak memenuhi target sebagaimana table sebagai berikut.

Tabel 2.1

## Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi Keuangan	Target	Realisasi Kinerja	%
		Pagu Renja	Pagu DPA				
	<b>PEMUM</b>						
<b>1</b>	<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah</b>						
1	Pengadaan Tanah Pemerintah	8.925.000.000	18.546.074.500	16.839.401.167	38.426 M2	37.218 M2	96 %
2	Pensertifikatan Tanah Pemda	250.000.000	244.468.500	179.149.740	92 %	92 %	100 %
3	Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum	0	485.000.000	24.722.000	56 M2	0	0
<b>2</b>	<b>Program Penyelesaian Konflik Konflik-Konflik Pertanahan</b>						
1	Penanganan Permasalahan/Sengketa Tanah	30.000.000	27.405.000	23.865.000	100 %	100 %	100 %
<b>3</b>	<b>Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>						
1	Koordinasi Keamanan Daerah	130.000.000	126.946.500	124.846.500	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %

<b>4</b>	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>						
1	Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal	35.000.000	18.839.600	18.679.600	97 %	97 %	100 %
2	Inventarisasi dan serah terima P3D	0	100.000.000	95.950.000	1 dokumen	1 dokumen	100 %
3	Pembuatan dan Publikasi LPPD, LKPJ, AMJ dan memori jabatan	170.000.000	154.860.000	153.330.000	100 %	100 %	100 %
<b>5</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>						
1	Fasilitasi Sosialisasi Batas Wilayah Hasil Pemetaan Badan Informasi Geospasial (BIG)	0	89.045.000	89.045.000	20 kecamatan	20 kecamatan	100 %
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>						
1	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan	25.000.000	113.430.000	113.047.500	50 %	50 %	100 %
<b>7</b>	<b>Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>						
1	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	0	316.386.000	250.197.000	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %
<b>8</b>	<b>Program Kerjasama Daerah</b>						
1	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah melalui Fasilitasi dan Monev Kerjasama	30.000.000	16.428.000	16.188.000	1 dokumen	1 dokumen	100 %
<b>9</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>						
1	Lelang tanah bekas bengkok kelurahan	50.000.000	41.329.000	41.254.000	1.050.000.000	1.377.804.000	131 %
	<b>BAGIAN PEMDES</b>						
<b>1</b>	<b>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>						
1	fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa	20.000.000	20.000.000	19.253.900	5 bidang	5 bidang	100 %
2	Identifikasi Data Alih Fungsi dan Penyusunan Tataguna Tanah Kas Desa	0	50.815.000	50.728.150	266 desa	266 desa	100 %
<b>2</b>	<b>Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>						
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa	20.000.000	14.125.000	14.125.000	15 Raperdes	15 Raperdes	100 %
2	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan Bupati kepada Desa	0	15.000.000	12.405.000	4 buku	4 buku	100 %



3	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>						
1	Pembekalan Tugas Kepala Desa	250.000.000	224.480.000	223.018.000	35 orang	36 orang	102 %
2	Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa	50.000.000	49.851.000	41.660.000	75 orang	190 orang	253 %
3	Pembinaan Adminitrasi Desa	6	54.340.000	39.925.000	266 desa	266 desa	100 %
4	Penguatan Kekayaan Desa	900.000.000	76.965.000	71.364.000	266 desa	266 desa	100 %
5	Fasilitasi Pendampingan dan Eksistensi APBDesa dan Barang Pengadaan Barang dan Jasa	400.000.000	358.214.000	323.437.190	266 desa	266 desa	100 %
6	Fasilitasi Pengisian Kepala Desa	250.000	248.943.750	230.746.750	35 orang	36 orang	102 %
7	Bintek Perangkat Desa	150.000.000	140.705.000	127.800.000	266 desa	266 desa	100 %
4	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>						
1	Penatausahaan Keuangan Desa	60.000.000	121.201.900	117.065.375	266 desa	266 desa	100 %
2	Penguatan Keuangan Desa	60.000.000	59.641.000	57.547.000	266 desa	266 desa	100 %
	<b>HUKUM</b>						
1	<b>Penataan peraturan perundang-undangan</b>						
1	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	65.000.000	64.997.000		10 dokumen	11 dokumen	110%
2	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	100.000.000	94.117.000	92.799.363	12	12	100 %
3	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	125.000.000	104.610.000		15 dokumen	26 dokumen	173 %
4	Dokumentasi dan informasi hukum	40.000.000	29.053.000		60	60	100%
5	Pengelolaan sjudi hukum dan pembinaan di 20 kecamatan	25.000.000	24.980.000		20 kecamatan	20 kecamatan	100 %
6	Pelayanan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan	334.698.000	334.698.000		10 kasus	10 kasus	100%

7	Rencana aksi nasional hak asasi manusia	18.000.000	17.999.000		1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
8	Peningkatan kesadaran hukum	41.899.500	41.988.500		20 kecamatan	20 kecamatan	100 %
<b>BAGIAN HUMAS</b>							
1	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>						
1	Penyusunan Raperda Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal	50.000.000	50.000.000	48.529.760	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2	Penyusunan Perbup LPPL TV Temanggung dan Revisi Perbup LPPL Radio Temanggung	25.000.000	25.000.000	24.845.000	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa</b>						
1	Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala	150.000.000	149.302.000	146.140.920	18.000 eksemplar	18.000 eksemplar	100 %
2	Lembaga Penyiaran Publik Lokal	225.000.000	245.315.300	231.703.895	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %
3	Pengelolaan Webside Kabupaten Temanggung	75.000.000	72.832.500	66.470.960	5.200 kegiatan	5.142 kegiatan	98,8 %
4	Pengisian Materi Videotron	10.000.000	0	0	0	0	0
5	Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi dan Media Massa Bagi Masyarakat	150.000.000	324.070.000	318.624.530	20 kegiatan	31 kegiatan	155 %
6	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	140.000.000	139.300.000	134.058.280	5.400 kegiatan	4.816 kegiatan	89,1 %
7	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat (Press Tour)	200.000.000	249.070.000	246.305.700	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
8	Penyelenggaraan Kehumasan	50.000.000	238.357.500	215.579.060	700 kegiatan	700 kegiatan	100 %
9	Pembuatan Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung	100.000.000	119.360.000	109.859.800	1.000 eksemplar	1.500 eksemplar	150 %
10	Fasilitasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi dan Radio Lokal	6.000.000.000	6.993.352.500	6.710.694.860	1 paket	1 paket	100 %
<b>KESRA</b>							
1	<b>Pendidikan Non Formal</b>						
	Pemberian bantuan siswa dan masyarakat berprestasi	150.000.000	150.000.000	147.434.200	150 orang	150 orang	100 %

	<b>Peningkatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>						
	Pemberian Bantuan Kesejahteraan Wiyata Bhakti Pendidikan	5.250.000.000	85.645.000	14.499.778	1.680 orang	560 orang	33 %
	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat</b>						
	Kegiatan Rakor TP UKS Kabupaten Temanggung	50.000.000	50.000.000	42.923.776	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
	<b>Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>						
	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.000.000	15.000.000	14.937.300	6 kegiatan	6 kegiatan	100 %
	<b>Pengembangan Nilai Keagamaan</b>						
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	570.000.000	569.530.000	527.788.560	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
	Penyelenggaraan MTQ	327.000.000	398.250.000	357.890.787	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	300.000.000	298.460.000	267.997.566	9 kegiatan	9 kegiatan	100 %
	Pelatihan Guru TPQ dan Badan Koordinasi TPQ	30.000.000	30.000.000	28.398.400	260 orang	260 orang	100 %
	Pelatihan Manajemen Masjid	50.000.000	48.760.000	37.209.450	200 orang	200 orang	100 %
	Fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan sosial/hibah	120.000.000	151.950.000	108.582.150	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %
	Silaturahmi Aparatur bersama masyarakat	0	561.185.000	479.834.572	38 kegiatan	38 kegiatan	100 %
	<b>Pembinaan dan Pemasaryakatan Olahraga</b>						
	Fasilitasi Olahraga di Lingkungan Pemerintah Daerah	50.000.000	46.950.000	35.471.830	20 kali	16 kali	80 %
	<b>PEREKONOMIAN</b>						
1	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						
1	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	129.810.800	129.810.800	105.556.443	12 bulan	12 bulan	100 %
2	Koordinasi Pelaksanaan TPID	44.997.000	44.997.000	37.590.328	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
3	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)	200.000.000	200.000.000	190.901.245	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %
2	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan &amp; Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>						
1	Monitoring Program Kredit Lunak	11.368.850	11.368.850	11.234.500	140 sasaran	140 sasaran	100 %

3	<b>Program Peningkatan &amp; Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>						
1	Pembinaan & Evaluasi BUMD	119.943.500	119.943.500	112.861.684	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %
2	Fasilitasi Manajemen Organisasi BUM	23.785.000	23.785.000	22.841.680	5 BUMD	5 BUMD	100 %
3	Fasilitasi Penyertaan Modal	21.647.500	21.647.500	20.902.654	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
4	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>						
1	Koordinasi Pendampingan Program RASKIN	900.000.000	899.547.600	827.789.419	12 distribusi	14 distribusi	116 %
5	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>						
1	Koordinasi Pengawasan Program LPG 3 KG	24.999.500	24.999.500	21.016.500	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %
	<b>PEMBANGUNAN</b>						
1	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						
1	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	750.000,00	690.000,00	689.750	12 bulan	12 bulan	100%
2	Fasilitasi Perencanaan Dana DAK, Tugas Pembantuan dan Bantuan Dana Pusat Lainnya kepada Kabupaten	16.500.000,00	16.939.000,00	13.450.900	12 bulan	12 bulan	100%
2	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>						
1	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan (Pengendalian Program)	66.000.000,00	124.982.500,00	66.117.100	12 bulan	12 bulan	100%
3	<b>Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>						
1	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung	66.000.000,00	72.556.000,00	67.523.750	12 bulan	12 bulan	100%
2	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung Melebihi Tahun Anggaran	0,00	14.934.000,00	10.822.500	3 bulan	3 bulan	100%
4	<b>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>						
1	Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	223.300.000,00	631.686.500,00	474.341.895	12 bulan	12 bulan	100%
2	Peningkatan Sarana LPSE	53.895.000,00	184.675.000,00	171.718.320	12 bulan	12 bulan	100%
3	Peningkatan SDM	60.500.000,00	65.350.000,00	37.044.400	12 bulan	12 bulan	100%

	Pengelola LPSE dan ULP						
				<b>UMUM</b>			
<b>1</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000.00 0	13.366.464.000	13.318.296.08 4	12 bulan	12 bulan	100 %
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	800.000.000	818.000.000	771.959.028	12 bulan	12 bulan	100 %
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	797.000.000	797.000.000	735.571.500	12 bulan	12 bulan	100 %
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	95.000.000	95.000.000	94.294.000	12 bulan	12 bulan	100 %
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	94.300.000	94.300.000	89.743.530	12 bulan	12 bulan	100 %
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	198.750.000	203.750.000	182.106.237	12 bulan	12 bulan	100 %
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95.000.000	100.000.000	99.995.000	12 bulan	12 bulan	100 %
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	98.000.000	98.000.000	86.485.800	12 bulan	12 bulan	100 %
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	2.250.000.000	2.535.000.000	2.461.336.969	12 bulan	12 bulan	100 %
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2.850.000.000	3.924.500.000	3.771.017.396	12 bulan	12 bulan	100 %
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	40.000.000	40.000.000	37.950.000	12 bulan	12 bulan	100 %
12	Jasa Pelayanan Perkantoran	586.000.000	663.000.000	576.606.890	12 bulan	12 bulan	100 %
13	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	4.500.000.00 0	4.500.000.000	3.912.188.00 0	12 bulan	12 bulan	100 %
<b>2</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	7.619.987.00 0	7.619.987.000	7.584.113.39 0	12 bulan	12 bulan	100 %
2	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	467.810.000	866.210.000	807.332.500	12 bulan	12 bulan	100 %
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	258.700.000	342.800.000	319.019.200	12 bulan	12 bulan	100 %
4	Pengadaan Meubelair	178.675.000	188.675.000	185.675.000	12 bulan	12 bulan	100 %

5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	671.910.000	778.910.000	713.732.642	12 bulan	12 bulan	100 %
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	620.000.000	805.750.000	768.545.624	12 bulan	12 bulan	100 %
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	81.000.000	81.000.000	80.893.250	12 bulan	12 bulan	100 %
<b>3</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>						
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	553.850.000	218.850.000	118.120.000	12 bulan	12 bulan	100 %
2	Pengadaan mesin/kartu absensi	335.000.000	335.000.000	226.613.000	12 bulan	12 bulan	100 %
<b>4</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>						
1	Kepesertaan APKASI	25.000.000	25.000.000	25.000.000	12 bulan	12 bulan	100 %
2	Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/LP ND dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	4.500.000.000	4.060.000.000	3.975.527.350	12 bulan	12 bulan	100 %
<b>ORTALA</b>							
<b>1</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						
1	Penyusunan LAKIP Kabupaten	47.500.000	47.430.000	46.317.900	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2	Penyusunan LAKIP dan PK SETDA	3.000.000	3.000.000	2.879.400	1 dokumen	1 dokumen	100 %
3	Penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati	25.000.000	25.000.000	24.060.900	1 dokumen	1 dokumen	100 %
<b>2</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>						
1	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	50.000.000	49.700.000	49.419.750	54 dokumen	54 dokumen	100 %
2	Penyusunan Standar Operating Prosedur	100.000.000	139.980.000	138.860.400	150 dokumen	150 dokumen	100 %
3	Pembinaan Pelayanan Publik	90.000.000	80.490.000	62.875.000	3 dokumen	3 dokumen	100 %
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pelayanan Publik	30.000.000	47.700.000	27.434.600	1 dokumen	1 dokumen	100 %
5	Partisipasi Lomba Pelayanan Publik	30.000.000	29.150.000	22.587.700	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
6	Penyusunan Perda SOTK dan Perbup SOTK	0	183.350.000	177.484.040	2 dokumen	2 dokumen	100 %
7	Review Roadmap reformasi birokrasi	15.000.000	10.240.000	7.146.400	1 dokumen	1 dokumen	100 %
<b>3</b>	<b>Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>						
1	Penanganan Pengaduan	40.000.000	58.110.000	53.285.000	73	Unit	100 %

	Pelayanan						
2	Pelatihan Pelayanan Prima	120.000.000	148.855.000	146.465.360	81	SKPD	100 %
<b>4</b>	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH</b>						
1	Pengembangan Budaya Kerja dan Integritas Aparatur	25.000.000	25.000.000	20.077.900	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
2	Evaluasi Lima Hari Kerja	0	24.825.000	16.426.400	1 dokumen	1 dokumen	100 %
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>						
1	Penyusunan Buku Standar Indeks Harga	95.000.000	302.635.000	227.910.000	1 dokumen	1 dokumen	100 %
<b>6</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>						
1	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	125.000.000	174.490.000	125.154.700	150 unit kerja	150 unit kerja	100 %
2	Evaluasi Jabatan	100.000.000	49.515.000	23.984.900	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	<b>SANTELPDE</b>						
<b>1</b>	<b>Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Masa</b>						
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	50.000.000	46.220.000	46.220.000	12 bulan	12 bulan	100 %
2	Pengadaan Jaringan LPSE dan Online SKPD	850.000.000	500.000.000	490.673.995	50 mbps	50 mbps	100 %
<b>2</b>	<b>Pengembangan Komunikasi dan Informasi</b>						
1	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	75.000.000	70.886.000	63.635.000	12 bulan	12 bulan	100 %
2	Pengadaan Jaringan Komunikasi	650.000.000	601.848.000	583.561.053	1 pusat jaringan online	1 pusat jaringan online	100 %
3	Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, Alat Pengolah Data Elektronik dan Jaringan Komunikasi	100.000.000	50.000.000	49.563.400	100 %	100 %	100 %
4	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Berdaya Guna	15.000.000	15.000.000	15.000.000	5 operator	5 operator	100 %
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana alat pengolah data elektronik	50.000.000	48.900.000	46.699.000	3 unit	3 unit	100 %

6	Monitoring dan Evaluasi Peneratpan e-Government Kabupaten Temanggung	15.000.000	9.325.000	2.552.500	35 skpd	35 skpd	100 %
7	Penataan Domain dan Subdomain SKPD	150.000.000	145.765.000	128.796.700	20 skpd	20 skpd	100 %
8	Koordinasi Penyusunan Assement IT Kabupaten Temanggung	75.000.000	75.000.000	63.748.750	1 dok	1 dok	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang telah memenuhi target kinerja kegiatan (tercapai 100%) sebanyak 27 program dan 110 Kegiatan yaitu:

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
  1. Penswertifikatan Tanah Pemerintah Daerah  
Penswertifikatan tanah pemerintah daerah dengan capaian indikator terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat sebanyak 65 bidang dari target 92 % telah tercapai.
2. Program Penyelesaian Konflik Konflik-Konflik Pertanahan
  1. Penanganan Permasalahan/Sengketa Tanah  
Penanganan permasalahan/sengketa tanah dengan capaian indikator terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pertanahan dengan target 100% telah tercapai
3. Program Pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
  1. Koordinasi Keamanan Daerah  
Koordinasi keamanan daerah dengan capaian indikator tercapainya keamanan daerah wilayah pada hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru dengan target 2 kegiatan telah tercapai
4. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
  1. Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
Monev Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan capaian indikator terlaksananya monev dan penerapan pada 15 bidang SPM di SKPD yang memiliki SPM dengan target 97 % telah tercapai.
  2. Inventarisasi dan serah terima P3D  
Inventarisasi dan Serah terima P3D dengan capaian indikator terwujudnya kepastian hukum pengalihan kewenangan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 dengan target 1 dokumen telah tercapai.



3. Pembuatan dan Publikasi LPPD, LKPJ, AMJ dan memori jabatan  
Pembuatan dan publikasi LPPD, LKPJ, AMJ, dan Memori Jabatan Bupati dengan capaian indikator tersusunnya buku LPPD dan LKPJ Akhir Tahun Anggaran Bupati dan Draft ILPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 sebanyak 3 Dokumen.
4. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan (Pengendalian Program) 12 bulan  
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan (Pengendalian Program) dengan capaian kinerja Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan (RKPK) sebanyak 3 kegiatan; Penggunaan aplikasi pelaporan belum maksimal. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan dalam rangka Penggunaan Aplikasi Pelaporan.
5. Pengembangan Budaya Kerja dan Integritas Aparatur  
Pengembangan budaya kerja dan integritas aparatur dengan capaian kinerja terlaksana sosialisasi Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Budaya Kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
6. Evaluasi Lima Hari Kerja 1 dokumen  
Evaluasi 5 hari kerja dengan capaian kinerja tersedianya dokumen Peraturan Bupati tentang penetapan 5 hari kerja. Untuk proses penetapannya pemerintah Kabupaten Temanggung telah mengusulkan lewat Gubernur yang diteruskan ke Kementrian Dalam Negeri setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementrian PAN dan RB.
5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
  1. Fasilitasi Sosialisasi Batas Wilayah Hasil Pemetaan Badan Informasi Geospasial (BIG)  
dengan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi batas wilayah hasil pemetaan Badan Informasi Gespasial (BIG) di desa dalam 20 wilayah Kecamatan.
  2. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa 15 Raperdes  
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dengan capaian kinerja teralaksanaaya evaluasi raperdes di 15 desa telah tercapai
  3. Penyusunan Perbup tentang Penyerahan Urusan kepada Desa  
Penyusunan Perbup tentang Penyerahan Urusan kepada Desa dengan capaian kinerja yaitu tercetaknya empat dokumen Peraturan Bupati
  4. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan  
Fasilitasi Sosialisai Peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja tersosialisasinya peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan masyarakat yang sadar hukum selama 12 bulan di 5 kecamatan telah tercapai;

5. Dokumentasi dan informasi hukum 60 dokumen  
Dokumen dan Informasi Hukum dengan capaian kerja tercetaknya buku himpunan perundang-undangan daerah 225 Buku dan terhimpunya perundang-undangan daerah 225 buku;
6. Pengelolaan SJDJ hukum dan pembinaan di 20 kecamatan  
Pengelolaan SJDJ hukum dan pembinaan di 20 kecamatan dengan capaian kerja tercatatnya dokumentasi dan informasi hukum 2 Dokumen;
7. Pelayanan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan  
Pelayanan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan dengan capaian terselesaikannya permasalahan hukum Pemerintah kabupaten Temanggung sebanyak 10 Kasus dapat terselesaikan;
8. Rencana aksi nasional hak asasi manusia sebanyak 1 kegiatan  
Rencana Aksi Nasional hak asasi manusia dengan capaian kinerja tersedianya laporan pelaksanaan RANHAM Kabupaten Temanggung Tahun 2016 dengan target 1 kegiatan dan terwujudnya pelaksanaan RANHAM Kabupaten Temanggung 2016 (21 POKSAR) telah terlaksana.
9. Peningkatan kesadaran hukum di 20 kecamatan  
Peningkatan Kesadaran hukum dengan capaian kerja Lomba kadarkum antar TP-PKK kecamatan 20 Kecamatan dengan terseleksinya Kader TP-PKK sebagai penyuluh hukum sebanyak 5 Orang;
10. Penyusunan Raperda Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal 1 dokumen  
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dengan capaian tersedianya raperda LPP TV Temanggung dan Peraturan Daerah Revisi LPP Radio Temanggung sebanyak 2 dokumen
11. Penyusunan Perbup LPPL TV Temanggung dan Revisi Perbup LPPL Radio Temanggung 1 dokumen  
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV dan Radio Temanggung dengan capaian tersedianya Perbup LPP TV Temanggung dan Perbup Revisi LPP Radio Temanggung
12. Penyusunan Standar Pelayanan Publik 54 dokumen  
Penyusunan standar pelayanan publik dengan capaian kinerja terlaksananya bimbingan teknis bagi 50 SKPD dan tersusunnya 54 dokumen Standar Pelayanan Publik.

13. Penyusunan Standar Operating Prosedur 150 dokumen  
Penyusunan standar operasional prosedur dengan capaian kinerja terlaksananya bimbingan teknis bagi 150 SKPD dan tersusunnya 150 dokumen/Keputusan Bupati tentang SOP.
  14. Pembinaan Pelayanan Publik 3 dokumen  
Pembinaan pelayanan publik dengan capaian kinerja Peningkatan kapasitas pelayanan publik dengan tersedianya 3 dokumen Peraturan Bupati Temanggung tentang Standar Pelayanan, Penanganan Pengaduan, dan Survei Kepuasan Masyarakat.
  15. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pelayanan Publik  
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelayanan publik di 24 puskesmas di seluruh Kabupaten Temanggung dan tersusunnya 1 (satu) dokumen laporan data tindak lanjut IKM dan aduan masyarakat.
  16. Partisipasi Lomba Pelayanan Publik 1 kegiatan  
Partisipasi lomba pelayanan publik dengan capaian kinerja terlaksananya terlaksananya kegiatan sosialisasi sistem informasi Inovasi pelayanan publik bagi seluruh organisasi perangkat daerah dan mengikutsertakan dalam kegiatan lomba SINOVIK
  17. Penyusunan Perda SOTK dan Perbup SOTK  
Penyusunan Perda SOTK dan Perbup SOTK dengan capaian kinerja tersedianya 2 dokumen Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60, 61, dan 62 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
  18. Review Roadmap reformasi birokrasi 1 dokumen  
Reviu road map reformasi birokrasi dengan capaian kinerja tersedianya dokumen Peraturan Bupati Temanggung tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2016 -2019 yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan  
Pembinaan dan pengembangan Aparatur Kecamatan dengan capaian indikator peningkatan kapasitas aparatur kecamatan sebanyak 20 orang pada 20 Kecamatan dengan target 50% telah tercapai.

7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
  1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan  
Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan capaian indikator tercapainya peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Capaian kinerja terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan sebanyak 4 kali baik dengan dinas/instansi, pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa/kelurahan.
8. Program Kerjasama Daerah
  1. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah melalui Fasilitasi dan Monev Kerjasama  
Peningkatan kerjasama antar daerah melalui fasilitasi dan monitoring evaluasi kerjasama dengan capaian indikator terdokumentasinya dokumen naskah perjanjian kerjasama antar daerah dengan target 1 dokumen
9. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
  1. fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa 5 bidang  
Fasilitasi Penyelesaian tanah kas desa dengan capaian kinerja Terselesaikannya permasalahan tanah kas desa dengan target 5 bidang telah tercapai
  2. Identifikasi Data Alih Fungsi dan Penyusunan Tataguna Tanah Kas Desa 266 desa  
Identifikasi Data Alih Fungsi dan Penyusunan Tataguna Tanah Kas Desa dengan capaian kinerja Terlaksananya identifikasi data pemanfaatan tataguna dan alih fungsi tanah kas desa dengan target 20 desa telah tercapai
10. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
  1. Pembinaan Adminitrasi Desa 266 desa  
Pembinaan Administrasi Desa dengan capaian kinerja terlaksananya tertib administrasi bagi 266 desa dan telah terealisasi 266 desa. Dengan adanya dana desa membuat masyarakat menuntut pelayanan di desa juga meningkat, sehingga administrasi perlu ditingkatkan
  2. Penguatan Kekayaan Desa 266 desa  
Penguatan Kekayaan Desa dengan capaian kinerja Tertib administrasi pengelolaan Kekayaan Desa di 266 desa. Sampai dengan triwulan 4 telah terlaksana 266 desa. Aset desa menjadi perhatian yang serius, mengingat beberapa permasalahan didesa khususnya pertanahan sering menjadi batu sandungan bagi kepala desa
  3. Fasilitasi Pendampingan dan Eksistensi APBDesa dan Barang Pengadaan Barang dan Jasa 266 desa  
Fasilitasi Pendampingan dan Eksistensi APBDesa & Pengadaan Barang di Desa dengan capaian kinerja tertib APBdes, pelaksanaan dan pelaporan SPJ APBdes dan Pengadaan barang dan jasa dengan target 266 desa telah tercapai

4. Bintel Perangkat Desa 266 desa

Bintel perangkat desa dengan capaian kinerja Terlaksananya Bintel bagi Sekretaris Desa yang baru terpilih. Untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa khususnya Sekdes perlu mendapatkan bimtek terkait dengan peraturan – peraturan baru.

11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1. Penatausahaan Keuangan Desa 266 desa

Penatausahaan Keuangan Desa dengan capaian kinerja meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan desa dengan target sebanyak 266 Desa dan telah terealisasi 266 desa. Dengan adanya Undang-undang tentang Desa yang baru sehingga beberapa ketentuan tentang penatausahaan keuangan mengalami perubahan.

2. Penguatan Keuangan Desa 266 desa

Penguatan Keuangan Desa dengan capaian kinerja meningkatnya Pengelolaan Keuangan desa dengan target sebanyak 266 Desa dan telah terealisasi 266 desa. Dengan undang undang tentang Desa yang baru perlu adanya monitoring pembinaan kepada semua desa di Kabupaten Temanggung

12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

1. Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala 18.000 eksemplar

Kegiatan Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala, dengan capaian kinerja tersedianya media informasi majalah sejumlah 21.000 eksemplar yang diterbitkan setiap 4 bulan sekali;

2. Lembaga Penyiaran Publik Lokal 4 kegiatan

Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dengan capaian kinerja meningkatnya program siaran sejumlah 4 program acara;

3. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat (Press Tour) 1 kegiatan

Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (press tour) dengan capaian kinerja tercukupinya sarana prasarana pelayanan public sejumlah 1 kegiatan

4. Penyelenggaraan Kehumasan 700 kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan, dengan capaian kinerja tersedianya peralatan untuk mendukung kegiatan kehumasan, dan kegiatan Pemkab Temanggung baik berupa foto dan video kegiatan Pemkab Temanggung sebanyak 700 kegiatan.

5. Fasilitasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi dan Radio Lokal 1 paket

Fasilitasi Lembaga penyiaran publik Televisi dan Radio Lokal dengan capaian kinerja tercukupinya sarana prasarana pelayanan public 1 unit gedung yang berdiri di jalan lingkaran Maron Temanggung

6. Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)  
Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan capaian kinerja terlaksananya pelelangan umum barang/jasa pemerintah dalam waktu 12 bulan;
7. Peningkatan Sarana LPSE 12 bulan  
Peningkatan Sarana LPSE dengan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan komputer LPSE dalam waktu 12 bulan;
8. Peningkatan SDM Pengelola LPSE dan ULP  
Peningkatan SDM Pengelola LPSE dan ULP dengan capaian kinerja Sosialisasi LPSE dan ULP dalam waktu 12 bulan
9. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 12 bulan  
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi dengan capaian kinerja:
  - i. Mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung di bidang persandian dan pengamanan data; dan
  - ii. Memberikan fasilitas jaringan telepon dan faximili untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung.
10. Pengadaan Jaringan LPSE dan Online SKPD 50 mbps  
Pengadaan Jaringan Komunikasi dengan capaian kinerja:
  - i. Tersedianya jaringan komunikasi online antar SKPD;
  - ii. Tersedianya server aplikasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung; dan
  - iii. Pembangunan pusat jaringan online Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung secara terintegrasi dan bertahap.
13. Pendidikan Non Formal
  1. Pemberian bantuan siswa dan masyarakat berprestasi  
Pemberian bantuan siswa dan masyarakat berprestasi dengan capaian kinerja terbantunya terbantunya 163 orang siswa dan masyarakat berprestasi di kabupaten Temanggung,dengan rincian tingkat kejuaraan sebagai berikut;
    - i. Tingkat Internasional
      - Juara II : 1 Orang
      - Juara III : 1 Orang

- ii. Tingkat Nasional
    - Juara I : 6 Orang
    - Juara II : 11 Orang
    - Juara III : 12 Orang
  - iii. Tingkat Propinsi
    - Juara I : 32 Orang
    - Juara II : 36 Orang
    - Juara III : 41 Orang
  - iv. Tingkat Propinsi Beregu
    - Juara I : 3 Regu
    - Juara II : 4 Regu
    - Juara III : 3 Regu
  - v. Pelatih
    - Pelatih Bersertifikat Nasional : 5 Orang
    - Pelatih Bersertifikat Daerah : 9 Orang
14. Upaya Kesehatan Masyarakat
- 1. Kegiatan Rakor TP UKS Kabupaten Temanggung

Rakor TP UKS Kabupaten Temanggung, dengan capaian kinerja terlaksananya rakor 2 kali, dan kunjungan kerja ke Kabupaten Tuban selama 2 hari, serta terlatih dan meningkatnya pemahaman 100 TP UKS
15. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2 kegiatan
- 1. Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan capaian kinerja pendampingan rapat koordinasi sebanyak 6 kali.

    - a) Memfasilitasi pemeriksaan kandungan penderita positif HIV /AID
    - b) Rakor perlindungan anak dan perempuan 5 kali.
    - c) Lomba Kreatifitas seni anak 1 kali dengan diikuti 40 kelompok / group se- Kabupaten Temanggung.
16. Pengembangan Nilai Keagamaan
- 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1 kegiatan

Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan capaian kinerja terselenggaranya manasik haji dan rangkaian kegiatan pelaksanaan pemberangkatan ibadah haji dengan capaian terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan Ibadah Haji dengan memberangkatkan calon jemaah haji sejumlah 581 Orang dan diberangkatkan TPHD sejumlah 5 Orang.

2. Penyelenggaraan MTQ 5 kegiatan

MTQ Pelajar, STQ, MHQ dan Seleksi Rebana, dengan capaian kinerja terselenggaranya 84 rori' dan qoriah dengan rincian :

- Terselenggara kegiatan MTQ pelajar tingkat Kabupaten dan terkirimnya kafilah MTQ pelajar tingkat Provinsi Jawa Tengah, mendapatkan juara I cabnag Murotal SLTP Putri, juara harapan III cabang Tahfidz 5 Jus putri, dan juara harapan III cabang Murotal SLTP Putri.
- Terselenggaranyakegiatan MHQ tingkat Kabupaten dan terkirimnya kafilah MHQ tingkat Provinsi Jawa Tengah.
- Terselenggaranya kegiatan STQ tingkat Kabupaten dan terkirimnya kafilah STQ tingkat Provinsi Jawa Tengah, mendapat juara I untuk cabang tilawah anak.

3. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 9 kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan penyelenggaraan Tarkhim ( Tarawih dan Silaturahmi ) dengan capaian kinerja :

- Terselenggaranya kegiatan di 20 Kecamatan.
- Terselenggaranya kegiatan pengajian rutin kamis legi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung 38 kali dan pengajian dalam rangka PHBI 3 Kali.
- Terwujudnya hubungan erat antara pemuka agama dan aparatur pemerintah serta masyarakat di 20 Kecamatan dan PNS di Lingkungan Setda dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

4. Pelatihan Guru TPQ dan Badan Koordinasi TPQ

Pelatihan Guru TPQ dan Badan Koordinasi TPQ dengan capaian kinerja, terlatihnya 220 guru TPQ Kabupaten Temanggung.

5. Pelatihan Manajemen Masjid

Pelatihan Managemen Masjid, dengan capaian kinerja terlatihnya 60 orang takmir masjid Desa utusan Kecamatan se Kabupaten Temanggung dan kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan.

6. Fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan sosial/hibah 4 kegiatan

Fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan sosial/ hibah dengan capaian kinerja, terselenggaranya penyaluran bantuan kepada penerima bantuan sosial dan hibah sebanyak 6 kegiatan.;



- Terlaksananya survay 1 kali, monitoring 2 kali dan sosialisasi 1 kali. Sosialisasi dilaksanakan mengenai persyaratan pencairan dana hibah, dan kelengkapan surat pertanggungjawaban dana hibah.
  - Tersalurnya bantuan sosial dan penyandang cacat sejumlah 26 pemohon, dan dana bantuan hibah sejumlah 92 tempat ibadah.
7. Silaturahmi Aparatur bersama masyarakat 38 kegiatan
- Silaturahmi aparaturnya bersama masyarakat dengan capaian kinerja terwujudnya hubungan erat antara pemuka agama dan aparaturnya pemerintah serta masyarakat di 20 Kecamatan dan PNS di Lingkungan Setda Pemerintah Kabupaten Temanggung
17. Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi  
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan target 12 bulan, dengan capaian kinerja terlaksananya rapat koordinasi persiapan menghadapi hari raya keagamaan dan tahun baru, rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi, dan rapat koordinasi bidang ekonomi tertentu (KUR, LKM, ESDM);  
Permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi bidang ekonomi. Solusi untuk permasalahan ini yaitu dengan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi : Beberapa hal yang dirasakan perlu disampaikan ke SKPD disampaikan di forum rapat yang lain
  2. Koordinasi Pelaksanaan TPID  
Koordinasi Pelaksanaan TPID dengan target 2 kegiatan, dengan capaian kinerja terlaksananya rapat koordinasi dan pengendalian inflasi dengan SKPD terkait, BPS, dan Bank Indonesia;  
Permasalahan yang muncul yaitu Koordinasi Pelaksanaan TPID : Pantauan atas perkembangan harga bahan penyumbang inflasi belum secara rutin dilaksanakan tepat waktu. Hal ini dapat disiasati dengan cara menugaskan staf khusus di SKPD Perindagkop dan UMKM untuk bertanggungjawab atas pemantauan harga.
  3. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)  
Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai (DBHCHT) dengan target 5 kegiatan telah tercapai. Dengan capaian kinerja terpantaunya perubahan harga daun tembakau dan hasil olahan tembakau untuk tahun 2016, terpantaunya jumlah produksi tembakau di Kab. Temanggung dan jumlah olahan daun tembakau yang masuk di gudang Tembakau yang ada di Temanggung;

4. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan  
Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dengan capaian kinerja terlaksananya penyusunan dan pelaporan dokumen SKPD sebanyak 24 dokumen  
Pelaporan rutin kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan  
Menyelenggarakan pertemuan tatap muka (desk) dan menerbitkan surat teguran/peringatan agar menyampaikan Pelaporan kegiatan secara rutin dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan,
5. Fasilitasi Perencanaan Dana DAK, Tugas Pembantuan dan Bantuan Dana Pusat Lainnya kepada Kabupaten 12 bulan  
Fasilitasi perencanaan dana DAK, Tugas Pembantuan, dan bantuan dana dari pusat lainnya kepada Kabupaten dengan capaian kinerja tersusunnya laporan DAK, Tugas Pembantuan dan bantuan dana dari pusat lainnya kepada kabupaten sebanyak 4 dokumen  
Koordinasi dengan SKPD belum optimal, sehingga Fasilitasi perencanaan dana DAK, Tugas Pembantuan, dan bantuan dana dari pusat lainnya kepada Kabupaten kurang berjalan secara efektif. Meningkatkan dan mengoptimalkan Koordinasi dengan SKPD terkait, sehingga Fasilitasi perencanaan dana DAK, Tugas Pembantuan, dan bantuan dana dari pusat lainnya kepada Kabupaten dapat berjalan lebih efektif.
6. Penyusunan LAKIP Kabupaten  
Penyusunan LAKIP Kabupaten dengan capaian kinerja tersusunnya 1 (satu) dokumen LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2015. Untuk hasil penilaian LkjIP tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2016 belum ada hasil penilaian dari Kemenpan dan RB.
7. Penyusunan LAKIP dan PK SETDA 1 dokumen  
Penyusunan LAKIP dan PK Setda dengan capaian kinerja tersusunnya 1 (satu) dokumen LAKIP Setda Kab. Temanggung Tahun 201 dan 1 (satu) dokumen PK Sekda Tahun 2016 telah dibuat tepat waktu.
8. Penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati 1 dokumen  
Penyusunan penetapan kinerja Bupati dengan capaian kinerja tersusunnya 1 (satu) dokumen Penetapan Kinerja Bupati Temanggung Tahun 2016 telah dibuat sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan tepat waktu.
18. Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
  1. Monitoring Program Kredit Lunak 50 sasaran

Monitoring Program Kredit Lunak, dengan capaian kinerja termonitoringnya dan tertagihnya kredit lunak di 50 kelompok penerima;

Permasalahan yang terjadi yaitu sistem tanggung renteng dalam kelompok penerima kredit yang menyebabkan beberapa anggota kelompok penerima kredit enggan melunasi tagihannya karena merasa tidak menggunakan kredit (dipakai oleh anggota kelompok yang lain), disamping hal tersebut di atas juga ditemukan bubarnya beberapa kelompok yang sudah tidak produktif. Solusi dari permasalahan ini bisa dilakukan dengan cara pendekatan persuasif kepada kelompok penerima kredit agar berupaya untuk membayar tagihan kredit yang menjadi tanggung-jawabnya.

#### 19. Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

##### 1. Pembinaan & Evaluasi BUMD 5 kegiatan

Pembinaan dan Evaluasi BUMD, dengan capaian kinerja terlaksananya evaluasi semesteran kinerja BUMD dan terlaksananya target RKAT BUMD bagi 10 (sepuluh) BUMD yaitu :

BUMD Kab. Temanggung	BUMD milik bersama dengan Pemerintah Provinsi
PDAM Temanggung	Bank Jateng
Apotik Waringin Mulyo	BPR BKK Temanggung
Aneka Usaha	BPR BKK Pringsurat
Bhumiphala Wisata	PRPP
Bank Pasar	Jamkrida

##### 2. Fasilitasi Manajemen Organisasi BUMD sejumlah 5 BUMD

Fasilitasi Manajemen Organisasi BUMD, dengan capaian kinerja terlaksananya pengisian pengurus BUMD dan terlaksananya kegiatan BUMD tingkat provinsi;

##### 3. Fasilitasi Penyertaan Modal

Fasilitasi Penyertaan Modal, dengan capaian kinerja terlaksananya penyertaan modal BUMD sesuai aturan dengan kegiatan 12 distribusi;

##### 4. Penyusunan Buku Standar Indeks Harga 1 dokumen

Penyusunan buku standar indeks harga dengan capaian kinerja tersusunnya 1 (satu) dokumen buku standar indeks harga tahun 2016 dan tersedianya Peraturan Bupati Temanggung tentang Tambahan Penghasilan Tetap bagi pegawai.

20. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1. Koordinasi Pengawasan Program LPG 3 KG

Koordinasi Pengawasan Program LPG 3 Kg dengan target 4 kegiatan, dengan capaian kinerja terpantaunya harga LPG khususnya LPG 3 Kg di masyarakat, terpantaunya kepatuhan pangkalan LPG atas harga eceran tertinggi, tercukupinya kebutuhan masyarakat atas LPG terutama pada periode perayaan hari raya keagamaan, bulan puasa, musim panen tembakau, dan liburan;

21. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung dalam waktu 12 bulan dengan capaian kinerja tersusunnya 300 Buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung;

2. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung Melebihi Tahun Anggaran 3 bulan

Penyusunan Pedoman pelaksanaan pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung Melebihi Tahun Anggaran dengan capaian kinerja tersusunnya Buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung Melebihi Tahun Anggaran sebanyak 1 dokumen

22. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan capaian kinerja berupa terbayarnya tagihan rekening listrik, PJU, telepon dan air selama 12 bulan telah terlaksana.

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, dengan capaian kinerja berupa tersedianya kendaraan dinas operasional yang siap pakai yakni kendaraan dinas roda empat sebanyak 44 unit, kendaraan dinas roda tiga sebanyak 1 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 60 unit.

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan jasa kebersihan, peralatan & bahan pembersih kantor, dengan capaian kinerja berupa tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih dan jasa kebersihan selama 12 bulan.

4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, dengan capaian kinerja berupa tersedianya peralatan kantor yang memadai termasuk kebutuhan perbaikan telepon, AC dan meubelair selama 12 bulan.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan  
Penyediaan ATK, dengan capaian kinerja berupa tersedianya perlengkapan Alat Tulis Kantor yang memadai selama 12 bulan.
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  
Penyediaan barang cetakan & penggandaan keperluan kantor, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kantor selama 12 bulan.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan selama 12 bulan.
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan capaian kinerja berupa tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar selama 12 bulan, yaitu Suara Merdeka sebanyak 10800 eksemplar, Kompas 1800 eksemplar, Wawasan 1800 eksemplar, Kedaulatan Rakyat 1800 eksemplar, Magelang Ekspres 1800 eksemplar, dan Jawa Pos 720 eksemplar.
9. Penyediaan Makanan dan Minuman  
Penyediaan makanan & minuman, dengan capaian kinerja berupa tersedianya kebutuhan makanan dan minuman selama 12 bulan untuk rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Pemerintah Daerah.
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah  
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan.
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah  
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan.

12. Jasa Pelayanan Perkantoran 12 bulan

terbayarnya honor pegawai Daerah/PTT sebanyak 4 orang, penjaga repeater dan meteor 3 orang, petugas pemelihara pendopo pengayoman, rumah dinas Bupati, Wabup, Sekda dan pemelihara listrik Setda 9 orang, petugas kebersihan dan penjaga malam Gedung Pemuda & Kebudayaan 3 orang, dan Pembantu rumah tangga Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Penyedia makan minum kantor Bupati dan wabup, 9 orang selama 12 bulan, Operator Santel dan petugas teknis peralatan kantor Setda 3 Orang, Petugas Keprotokolan, dan pengadministrasi PKK 4 Orang, Petugas Pemelihara Taman Pendopo Pengayoman 2 orang dan tersedianya biaya untuk keperluan sewa-sewa meja kursi, soundsystem dan tenda.

13. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12 bulan

Penyediaan jasa pengamanan kantor, dengan capaian kinerja berupa tersedianya tenaga satuan pengamanan kantor di lingkungan kantor Setda, rumah dinas bupati, rumah dinas wakil bupati, dan rumah dinas Sekda, lingkungan kantor Sekretariat DPRD, dan lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung selama 12 bulan.

23. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 12 bulan

Pengadaan kendaraan dinas/operasional, dengan capaian kinerja tersedianya sarpras berupa kendaraan dinas operasional roda 4 sebanyak 5 unit Stasion Wagon, Mikro Bis 1 Unit, Mobil Box 1 unit dan 7 unit Kendaraan Roda 2 berupa 270 unit.

2. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas, dengan capaian kinerja berupa tersedianya perlengkapan/peralatan rumah jabatan/dinas yang memadai yaitu Pengadaan Rak TV, Meja Kursi Tamu Wisma Dirgahayu dan Pos Stpam Pendopo Pengayoman, Pengadaan Kitcen Set, Dispenser, Water Heater, Setrika, alt pembuat kopi mixer, jam dinding, Gordyn Rumah Dinas Bupati, penghias Ruangan dan Karpet Rumah Dinas Bupati.

3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor, dengan capaian kinerja berupa tersedianya sarana gedung kantor yaitu 1 unit Mesin Fotocopy Ruang Spri Kerja Bupati, Lemari Arsip, Filing Kabinet, Air Condisioner, 9 Unit Komputer PC, 5 Unit laptop, 6 unit Printer, 3 unit Mic, 3 Unit Stand mic.

4. Pengadaan Meubelair

Pengadaan meubelair, dengan capaian kinerja berupa tersedianya sarana kantor meubelair yaitu 4 buah mimbar/podium, 2 Set Meja makan Pendopo jenar, 16 Kursi hadap, 80 Kursi Rapat, 6 Set Meja Kursi Tamu, 2 buah etalase.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 12 bulan

Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas, dengan capaian kinerja berupa terpeliharanya prasarana dan bangunan rumah dinas selama 12 bulan, yaitu penyediaan katul/dedak & rumput/hijauan untuk hewan ternak di Rumdin Bupati, Perbaikan atap Rumdin bupati, Perbaikan Lantai, Pintu dan jendela Rumdin Bupati, wabup dan sekda, Pemeliharaan kolam, air mancur dan pompa air, rehap gudang dan kamar mandi Rumdin Sekda, Pengecatan Pagar Tembok Rumdin, perbaikan dapur rumdin bupati, perbaikan kandang, pemasangan paving garasi rumdin bupati dan jasa servis.

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

terpeliharanya prasarana dan bangunan gedung kantor selama 12 bulan, berupa perbaikan atap, perbaikan plafon, perbaikan lantai, perbaikan kamar mandi wc, perbaikan pintu dan jendela, pemeliharaan kolam, air mancur, kansteen, dan pompa air, pemeliharaan pagar-tembok-kansteen-pintu gerbang,, pengecatan Pintu Gerbang dan pagar tembok, pemeliharaan gedung pertemuan, pemeliharaan kantin & koperasi, pemeliharaan gedung PKK, Pemeliharaan Taman Setda, Perbaikan selatsar untuk mobil parkir setda, pemeliharaan Gedung Pemuda,

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 bulan

Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor, dengan capaian kinerja berupa terpeliharanya terpeliharanya sarana peralatan kantor yaitu soundsystem, komputer, LCD, dan alat kesenian selama 12 bulan.

24. Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan peralatan mesin absen dengan capaian kinerja berupa meningkatnya disiplin dan kinerja Pegawai pegawai, tersedianya mesin absen pegawai sejumlah 38 unit untuk SKPD dan 2 unit computer server,
2. pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan pakaian tertentu lainnya yaitu PDH Bupati, PDH Wakil Bupati, PDU Bupati, PDU Wakil Bupati, Batik Lengan Panjang Bupati, Batik Lengan Panjang Wakil Bupati, PSR Bupati, PSR Wakil Bupati, PDH Kheky Wakil Bupati, PSL Bupati, PSL Wakil Bupati, PDL Wakil Bupati, Korpri Wakil Bupati, baju Pramuka Wakil Bupati, PSL Protokol, PSL Sekda, Batik Tradisional.

25. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1. Kepesertaan APKASI

APKASI, dengan capaian kinerja berupa terbayarnya iuran APKASI. Baik bagi Kepala Daerah maupun untuk iuran Sekretaris Daerah selama 12 bulan

2. Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah 12 bulan

Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/LPND dan peringatan hari besar nasional dan daerah, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya kegiatan kunjungan kerja pejabat di Kabupaten Temanggung serta terlaksananya kegiatan peringatan hari besar tingkat nasional dan daerah di Kabupaten Temanggung selama 12 bulan.

26. Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Penanganan Pengaduan Pelayanan

Penanganan pengaduan masyarakat dengan capaian kinerja menindaklanjuti aduan dari masyarakat, dan tersedianya kotak saran sejumlah 73 buah yang sudah diberikan ke SKPD. Untuk Tahun 2016 juga telah dilaksanakan penilaian dari ombusmen dimana Kabupaten Temanggung telah memperoleh penilaian dengan kategori warna kuning.

2. Pelatihan Pelayanan Prima

Pelatihan pelayanan prima dengan capaian terselesainya kegiatan bimbingan teknis bagi pimpinan SKPD. Dalam kegiatan ini juga terdapat acara penandatanganan perjanjian Kinerja Bupati kepada semua pimpinan SKPD secara langsung.

3. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik

Survey indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik dengan capaian kinerja tersusunnya 150 dokumen laporan survey kepuasan masyarakat dari satuan pendidikan yang dilakukan secara mandiri. Dan tersusunnya 1 dokumen laporan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Untuk Tahun 2016 pelaksanaan survei yang dilakukan oleh pihak ketiga dilakukan pada SKPD Dindukcapil, Kecamatan Teemanggung dan Puskesmas Ngadirejo.

4. Evaluasi Jabatan

Evaluasi jabatan dengan capaian tersedianya 1 dokumen Evaluasi jabatan. Untuk tahun 2016 evaluasi dilakukan pada semua jabatan fungsional umum.



27. Pengembangan Komunikasi dan Informasi

1. Pembinaan Pengembangan Sumber dan Daya Komunikasi dan Informasi

Pembinaan Pengembangan Sumber dan Daya Komunikasi dan Informasi dengan capaian Pemantauan jaringan komunikasi secara online, Penanganan troubleshooting, Mengatur lalu lintas jaringan online antar SKPD Kabupaten Temanggung selama 12 bulan

2. Pengadaan Jaringan Komunikasi 1 pusat jaringan online

Pengadaan Jaringan Komunikasi pusat jaringan online dengan capaian Penyediaan Bandwidth untuk memfasilitasi aplikasi online milik Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung; Mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui LPSE; dan Penyediaan jaringan komunikasi Online SKPD sampai ke Kecamatan.

3. Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, Alat Pengolah Data Elektronik dan Jaringan Komunikasi

Terpeliharanya peralatan telekomunikasi, alat pengolah data dan elektronik serta jaringan komunikasi yang dikelola oleh Bagian Santel dan PDE.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Berdaya Guna 5 operator

- Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam pengelolaan jaringan komunikasi online SKPD;
- Kegiatan pengelolaan jaringan komunikasi online SKPD dapat berjalan dengan lebih baik.

5. Pengadaan Sarana dan Prasarana alat pengolah data elektronik 3 unit

6. Monitoring dan Evaluasi Penerapan e-Government Kabupaten Temanggung 35 skpd

Monitoring dan Evaluasi Penerapan e-Government Kabupaten Temanggung dengan capaian kinerja :

- Terpantaunya pemanfaatan e-Government dan akses internet dari Bagian Santel dan PDE untuk akses aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Temanggung, antara lain lpse, absensi, sibangda, smpeda, p2kp, jdih, dll;
- Terpantaunya pengelolaan website Kecamatan yang disediakan oleh Bagian Santel dan PDE;

7. Penataan Domain dan Subdomain SKPD capaian kinerja

- Pembangunan website kecamatan sebagai media komprehensif dan terpercaya sebagai sumber informasi berita seputar informasi pemerintahan dan pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;

- Tersedianya media penyaluran aspirasi masyarakat Kabupaten Temanggung pada umumnya dan wilayah kecamatan yang bersangkutan pada khususnya;
  - Tersedianya media pengembangan wilayah kecamatan dan daerah di kabupaten Temanggung;
  - Tersedianya alat control dan media penyebar luasan informasi bagi instansi penyelenggara negara terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Koordinasi Penyusunan Assement IT Kabupaten Temanggung 1 dokumen
- Tersedianya Data dan Peta tentang Akses jaringan yang dapat dijangkau oleh Internet dengan sistem WAN maupun LAN;
  - Tersedianya data kebutuhan sarana dan prasarana Data Centre.

Dari beberapa program yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah, terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang dapat tercapai melebihi target sebanyak 5 program dan 9 kegiatan, yaitu:

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
  1. Fasilitasi lelang sawah bekas bengkok kelurahan  
Fasilitasi lelang sawah bekas bengkok kelurahan dengan capaian indikator terpenuhinya target PAD dari lelang tanah eks bengkok kelurahan dari target Rp. dengan target Rp. 1.050.000.000,- telah tercapai di 13 Kelurahan dengan pemasukan PAD sebesar Rp. 1.379.510.000,;
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
  1. Pembekalan Tugas Kepala Desa, dari target 35 orang telah tercapai 36 orang atau 102 %  
Pembekalan Tugas Kepala Desa dengan capaian kinerja terselenggaranya pebekalan bagi 35 Kepala Desa dan telah terealisasi 36 Kepala Desa. Kepala Desa yang baru terpilih perlu diberikan bekal baik kedisiplinan maupun pengetahuan tentang desa seperti peraturan desa, keuangan desa, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
  2. Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa dari target 75 orang telah tercapai 190 orang atau 253 %  
Fasilitasi pengisian perangkat desa dengan capaian kinerja terlaksananya pengisian perangkat desa yang kosong dengan target sebanyak 75 orang sampai dengan triwulan IV telah tercapai 190 orang. Dengan semangat reformasi birokrasi, pemerintah desa juga mengalami efisiensi dalam hal pengisian kekosongan perangkat desa. Sehingga hanya jabatan-jabatan pokok yang diisi.

3. Fasilitas Pengisian Kepala Desa dari target 35 orang telah tercapai 36 orang atau 102 %  
Fasilitas Pengisian Kepala Desa dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan Pemilihan Kepala Desa di 36 desa dengan aman dan lancar tanpa eksekusi.
3. Penataan peraturan perundang-undangan
  1. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan  
Legislasi rancangan peraturan Perundang-undangan dengan capaian kinerja terbahasnya Raperda menjadi Perda hasil pembahasan Pansus dari target 10 dokumen Raperda telah terealisasi 11 dokumen atau 110 %
  2. Kajian peraturan perundang-undangan daerah  
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah dengan capaian kerja tercapainya Raperbub dan terkajinya Rakerpub dengan target 15 dokumen telah terealisasi 26 dokumen atau 173 %.
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
  1. Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi dan Media Massa Bagi Masyarakat dari target 20 kegiatan tercapai 31 kegiatan atau 155 %  
Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi dan Media Massa Bagi Masyarakat, dengan capaian kinerja tersedianya sarana informasi kegiatan Pemkab bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung
  2. Pembuatan Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung dari target 1000 eksemplar telah tercapai 1500 eksemplar atau 150 %
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
  1. Koordinasi Pendampingan Program Raskin,  
Koordinasi Pendampingan Program Raskin dengan capaian kinerja terlaksananya distribusi raskin kepada RTS penerima manfaat Raskin di 20 Kecamatan, sejumlah 14 kali distribusi melebihi target yang sejumlah 12 kali distribusi atau 116%;

Sedangkan program dan kegiatan yang tidak memenuhi target di tahun 2016 sebanyak 5 program dan 7 Kegiatan, yaitu:

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
  1. Pengadaan Tanah Pemerintah dari target 38.426 M2 hanya tercapai 37.218 M2 atau 96 %  
Pengadaan tanah pemerintah untuk kepentingan umum dengan capaian indikator tersedianya tanah milik Pemerintah Daerah yang siap dibangun dengan target 37.218 m2 yang digunakan untuk

- Pelebaran jalan dan jembatan Kali Jambe, Kelurahan Madureso Kec. Temanggung;
  - Mata Air PDAM di Desa Tegalrejo Kecamatan Bulu;
  - Pembangunan jalan masuk calon gudang DPU di Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung;
  - Penguat Mata Air PDAM di desa Tlahap Kecamatan Kledung;
  - Pembangunan Puskesmas Banjarsari, Puskesmas Bulu dan Puskesmas Selopampang;
  - Pembangunan Pasar Hewan di Desa Ngaren Kecamatan Ngadirejo
2. Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum, dari target 56 m2 tidak dapat tercapai atau 0 %. Kegiatan dimaksud untuk membeli tanah yang akan digunakan untuk pelebaran jalan di depan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Untuk tahapan proses pengadaan telah dilakukan, akan tetapi pemilik tanah yang akan dibeli dimaksud mengalami sakit sehingga tidak terjadi kesepakatan harga antara penjual dengan pemerintah.
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
3. Pengelolaan Webside Kabupaten Temanggung dengan target 5.200 kegiatan terealisasi 5.142 kegiatan atau 98,8 %. Kegiatan Pengelolaan Website Kabupaten Temanggung, dengan capaian kinerja tersedianya sarana teknologi informasi melalui website dan peningkatan performa Website dengan sewa hosting, domain dan maintenance serta tersedianya layanan SMS GATEWAY dengan nomor 085-878-600-900 guna layanan informasi kepada masyarakat luas;
1. Pengisian Materi Videotron, indikator kegiatan ini tidak dapat tercapai karena meskipun telah direncanakan dalam Renja akan tetapi tidak teranggarkan di APBD tahun 2016, karena tidak ada titik temu/ kerjasama antara pemerintah dengan pihak ketiga penyedia materi video tron sehingga tidak dapat diteruskan.
2. Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah dari target 5.400 kegiatan tercapai 4.816 kegiatan atau 89,1 %. Hal ini disebabkan kurangnya suplay berita yang dikarenakan ada satu media cetak rakyat Jawa Tengah yang tidak terbit lagi (tutup produksi)
3. Peningkatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1. Pemberian Bantuan Kesejahteraan Wiyata Bhakti Pendidikan dari target 1.680 orang hanya tercapai 560 orang atau 33 %. Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran kegiatan fasilitasi dana hibah yang semula ditangani secara langsung oleh Bagian Kesra berpindah ke Dinas Pendidikan.

#### 4. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

##### 1. Fasilitasi Olahraga di Lingkungan Pemerintah Daerah

Fasilitasi olahraga di lingkungan Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja 20 kali, terselenggaranya kegiatan olahraga bagi karyawan Setda dan Pemkab sebanyak 16 Kali target 20 kali terealisasi 16 kali atau 80 %. Hal ini disebabkan kegiatan olahraga tidak dilaksanakan pada bulan puasa, sebagian diambil alih untuk kegiatan Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, dan sebagian bergantian tempat dengan olahraga yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Kabupaten dengan sasaran peserta sama.

Dengan melihat data kegiatan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 118 indikator kinerja kegiatan, 6 % tidak dapat tercapai, dan 9 indikator kinerja atau 7,6 % yang telah mencapai melebihi target 100% dan 86 indikator atau 86% telah tercapai sesuai dengan target.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Setda

### 2.2.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati serta mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Staf Ahli, 3 (tiga) Asisten, dan 10 (sepuluh) Bagian yaitu :

**Sekretaris Daerah;**

**a. Asisten ;**

Asisten terdiri dari :

- 1). **Asisten Pemerintahan**, mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan strategis dan pelaporan bidang pemerintahan, pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah, penyelenggaraan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi bidang pemerintahan umum maupun pemerintahan desa, hukum, hubungan masyarakat, perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan keagrariaan.
- 2). **Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat**, mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, perencanaan strategis, sistem informasi, pelaporan bidang ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan administrasi, pengoordinasian fasilitasi, pengoordinasian pemantauan dan evaluasi bidang perekonomian daerah, pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat, melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan program pembangunan, perekonomian daerah, dan kesejahteraan rakyat.
- 3). **Asisten Administrasi**, mempunyai tugas melaksanakan dan membina serta mengoordinasikan urusan rumah tangga, tata usaha dan keuangan Pimpinan, umum, organisasi dan tata laksana, sandi dan telekomunikasi, serta pengolahan data elektronik.

**b. Bagian**

Bagian terdiri dari :

1. **Bagian Pemerintahan Umum**, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan umum pemerintah daerah, rencana dan program bidang pemerintahan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi bidang pemerintahan umum, perangkat daerah dan pertanahan.

2. **Bagian Pemerintahan Desa**, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis untuk pembinaan tata pemerintahan desa, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pengembangan desa, pembinaan dan pengembangan kelembagaan desa, pembinaan aparatur desa, pembinaan administrasi desa, serta pengelolaan kekayaan dan keuangan desa.
3. **Bagian Hukum**, mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang hukum, penyelenggaraan sistem informasi, pelaporan bidang hukum, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, informasi dan dokumentasi hukum.
4. **Bagian Hubungan Masyarakat**, mempunyai tugas pokok melaksanakan serta membina hubungan kemasyarakatan guna memperjelas kebijakan Bupati.
5. **Bagian Perekonomian**, mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang perekonomian, perencanaan strategis dan pelaporan bidang perekonomian, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi bidang ekonomi daerah, produksi daerah, energi sumber daya mineral, BUMD, dan pembinaan terhadap lembaga keuangan mikro.
6. **Bagian Pembangunan**, mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang pembangunan, perencanaan strategis bidang pembangunan daerah, pelaksanaan sistem informasi, pelaporan bidang pembangunan, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi bidang penyusunan program dan pengendalian pembangunan, analisis dan pengkajian pembangunan, pelaksanaan dan pelayanan teknis bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan.
7. **Bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat)**, mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan umum Pemerintah Daerah, perencanaan strategis, sistem informasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat, melaksanakan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi bidang sosial, agama, pemberdayaan perempuan, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga.
8. **Bagian Umum**, mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata usaha Pimpinan, kearsipan dan keuangan, administrasi keuangan Pimpinan dan Sekretariat Daerah, mengelola rumah tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah, mengelola pemeliharaan dan perawatan gedung Sekretariat Daerah, kantor/rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta urusan keprotokolan dan perjalanan dinas.

9. **Bagian Organisasi Dan Tata Laksana**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah, pelaksanaan teknis Analisis dan formasi Jabatan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja, analisis kebijakan kepegawaian serta mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan SETDA.
10. **Bagian Sandi dan Telekomunikasi**, dan Pengolahan Data Elektronik, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi pengembangan dan pengendalian bidang komputerisasi dan informatika, pengembangan sistem jaringan dan informasi elektronik pemerintahan, pengumpulan, pengolahan, akses pelayanan data dan informasi serta pengelolaan sandi dan telekomunikasi.

### 2.2.2 Susunan Kepegawaian

Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2016, dapat dirinci sebagai berikut :

#### a. Menurut Jenis Jabatan :

Instansi	Eselon							Fungsional Umum	Jml
	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a		
SEKRETARIAT DAERAH	1	3	9	0	27	0	0	104	144
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>144</b>

#### b. Menurut Jenis Pendidikan:

Status Kepeg	LAKI-LAKI												
	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	SNK	SAK	S1	S2	S3	jml Lk
PNS	11	2	46	0	0	3	4	1	1	21	14	0	103
CPNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>103</b>

Status Kepeg	PEREMPUAN												
	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	SNK	SAK	S1	S2	S3	jml Pr
PNS	3	0	12	0	0	4	4	0	0	10	7	0	41
CPNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>41</b>

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana terlampir.



### 2.2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas di Sekretariat Daerah, adanya sarana dan prasarana yang memadai dan mengikuti perkembangan jaman sangat dibutuhkan. Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Daerah diperlengkapi dengan areal tanah yang luas, gedung perkantoran yang memadai, serta sarana prasarana lain diantaranya:

No	Kib	Jumlah
1	KIB A	45 bidang tanah
2	KIB B	1.837 peralatan dan mesin
3	KIB C	40 gedung dan bangunan
4	KIB D	19 jalan, irigasi, dan jembatan
5	KIB E	338 aset tetap lainnya
6	ASET LAINNYA	38 aset
7	BARANG EKSTRAKOMPETEBEL	434 jenis

### 2.2.4. Capaian Kinerja Pelayanan Setda

Berdasarkan tugas pokok fungsi dan sumber daya yang dimiliki, Sekretariat Daerah dituntut untuk mampu meningkatkan capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Realisasi kinerja pelayanan pada tahun 2016 yang telah sesuai target diharapkan dapat terulang pada tahun-tahun berikutnya, sehingga target kinerja pertahun selalu dapat tercapai. Adapun capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2016 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja	satuan	Target					Realisasi			Capaian sd 2016	status
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016		
1	Besaran kerjasama daerah	dokumen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	akan tercapai
2	Cakupan Pelaksanaan SPM	%	72,4	91,7	96,8	96,8	96,8	52,9	86,5	51,9	54	Perlu upaya keras
3	Tersedianya lahan untuk persiapan pembangunan jalan lingkar Kota Parakan	hektar	-	2	6	11	19	0	0	0	0	Perlu upaya keras

4	Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai	Unit	1	-	1	1	1	3	4	6	150	Telah tercapai
5	Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara	unit	-	0	0	1	1	0	0	0	0	Perlu upaya keras
6	Persentase Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat	%	84,5	88,4	92,3	96,13	100	83,6	92	94	98	Akan tercapai
7	Persentase Penggantian Tanah Pemerintah Desa yang Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten	%	7.5	12.5	15	17.5	20	0	7,5	7,5	37,5	Akan tercapai
8	Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah tercapai
9	Persentase Tertib Administrasi di tingkat Kelurahan	%	10	25	50	75	100	10	12,5	50	100	Telah tercapai
10	Cakupan Pembinaan Administrasi Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah tercapai
11	Persentase Penanganan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Mengalami Kasus	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah tercapai
12	Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong	%	92.2	100	100	100	100	0	0	103	103	Telah tercapai
13	Persentase Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong	%	97	97	97	97	97	0	100	103	106	Telah tercapai
14	Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti Terhadap Jumlah Total Peraturan Daerah dalam 1 (Satu) Tahun	%	100	100	100	100	100	45	79	100	100	Akan tercapai
15	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Luar Ruang	kali	2	4	6	8	10	4	24	23	383	Telah tercapai
16	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa	kali	2	4	6	8	10	7	226	13	217	Telah tercapai

17	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui media baru	hari	2	4	6	8	10	2	490	626	10433	Telah tercapai
18	Persentase Perlindungan Sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah tercapai
19	Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang Menyusun Standar Pelayanan Publik	%	7	15	45	70	100	7	15	23	52	Perlu upaya keras
20	Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang telah Memiliki SOP	%	8	25	50	75	100	6	14	40	80	Perlu upaya keras
21	Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	kriteria	CC	B	B	B	B	C	C	CC	85	Perlu upaya keras
22	Persentase Ketepatan Waktu SKPD dalam Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIP dan TAPKIN)	%	70	80	90	95	95	63	100	100	111	Telah tercapai
23	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	kriteria	B	B	B	B	B	B	B	B	100	Telah tercapai
24	Persentase Keberhasilan pengadaan barang/jasa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	99,6	Akan tercapai
25	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Akan tercapai
26	Persentase Jumlah SKPD yang Menyampaikan DURP dengan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	68	93	89	89	Akan tercapai
27	Besaran Ketersediaan sarana dan prasarana kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah tercapai

28	Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government	%	15	35	55	75	100	15	20	20	20	Perlu upaya keras
29	Cakupan terbangunnya Integrasi Jaringan Informasi dan Komunikasi	%	15	35	55	75	100	15	35	35	35	Perlu upaya keras
30	Rasio Akses Internet di Ruang Publik	%	15	35	55	75	100	15	35	35	35	Perlu upaya keras
31	Cakupan Pemberian Bantuan Tempat Ibadah	%	100	100	100	100	100		75	54	72	Akan tercapai
32	Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Pondok Pesantren	%	100	100	100	100	100		5	3	60	Akan tercapai
33	Cakupan Pemberian Bantuan Kepada TPQ	%	100	100	100	100	100		20	18	90	Akan tercapai
34	Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Madrasah Diniyah	%	100	100	100	100	100		16	16	100	Akan tercapai

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda

Realisasi target indikator kinerja program/ kegiatan di Setda setiap tahun dapat tercapai hampir 100%. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari hasil kerja keras dari seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya.

Namun demikian masih ditemui beberapa permasalahan yang muncul dalam pencapaian kinerja di Sekretariat Daerah. Beberapa kendala dan hambatan yang ditemui dan dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Perencanaan kegiatan pembangunan masih belum optimal yaitu dalam penetapan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan, sehingga belum mampu sebagai alat pengendali agar kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.
2. Ketersediaan anggaran dan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang cukup terbatas sehingga mempengaruhi capaian hasil kegiatan;
3. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, telah mengurangi tingkat pencapaian target kegiatan.
4. SDM pelaksana kegiatan yang terbatas baik kuantitas maupun kualitas, menyebabkan hasil beberapa pelaksanaan kegiatan belum maksimal.

5. Pelibatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih perlu ditingkatkan agar hasil beberapa kegiatan lebih optimal.

Adapun strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah:

1. Perencanaan kegiatan dilaksanakan secara lebih matang, yang dimulai pada saat pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
2. Meningkatkan kegiatan pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga dapat secara dini mengetahui permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul serta segera dilaksanakan upaya pemecahan masalah.
3. Perencanaan tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan lebih awal dan cermat, segera setelah APBD ditetapkan sehingga waktu yang tersedia relatif lebih leluasa dalam menyelesaikan kegiatan pembangunan;
4. Kegiatan diarahkan untuk tercapainya output dan standar mutu yang jelas sehingga penggunaan anggaran yang terbatas tetap efektif dan efisien menghasilkan capaian yang ditargetkan.
5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal antar SKPD, serta komunikasi/koordinasi eksternal ke Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Tidak kalah strategis pula untuk meningkatkan dan memperluas kerja sama dengan pihak perguruan tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun non pemerintah guna mendukung pencapaian sasaran;
6. Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana kegiatan secara berkesinambungan baik melalui sosialisasi, bintek, maupun diklat. Pembekalan tentang peraturan-peraturan yang selalu berkembang, termasuk didalamnya pembekalan terkait dengan penguasaan Teknologi Informasi, sangat dibutuhkan oleh SDM pelaksana kegiatan.
7. Meningkatkan sosialisasi program dan kegiatan kepada masyarakat guna meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai strategi guna meningkatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Pada awal tahun 2017, masing-masing Bagian di Setda telah menyusun rancangan awal rencana kerja untuk tahun 2018. Rancangan awal tersebut disusun secara cermat guna pencapaian target indikator kinerja Setda dan Kabupaten. Selanjutnya, rancangan awal tersebut masih perlu di bahas dalam Musrenbang guna dilakukan penyempurnaan setelah mencatat dan mengkaji aspirasi dan kebutuhan dari para pemangku kepentingan.

Berikut kami sampaikan data perbandingan sebelum dan sesudah dilaksanakan desk dan Musrenbang.

Tabel 2.3  
Data Perbandingan sebelum dan sesudah Desk Musrenbang

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	
					sebelum desk	setelah desk
1	2	3	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>				<b>27,792,000,000</b>	<b>24,345,000,000</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>26,600,000,000</b>	<b>23,400,000,000</b>
	<b>Belanja Hibah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>				<b>26,600,000,000</b>	<b>23,400,000,000</b>
1	Kegiatan belanja Hibah kepada KPU	Tersalurkannya belanja hibah kepada KPU	1	Kegiatan	20,000,000,000	19,000,000,000
2	Kegiatan belanja Hibah kepada Panwaslu	Tersalurkannya belanja hibah kepada panwaslu	1	Kegiatan	6,600,000,000	4,400,000,000
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>1,192,000,000</b>	<b>945,000,000</b>
<b>I</b>	<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					
<b>A</b>	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>				<b>140,000,000</b>	<b>140,000,000</b>
	Koordinasi Keamanan Daerah	Terlaksananya pengamanan daerah dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan Natal	2	Keg	140,000,000	140,000,000
<b>II</b>	<b>FUNGSI LAINNYA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					
<b>B</b>	<b>Program Pendidikan dan Politik Dalam Negeri</b>				<b>175,000,000</b>	<b>100,000,000</b>
1	Kegiatan Desk Pemilihan Umum	Terfasilitasinya pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum	2	Keg	175,000,000	100,000,000
<b>III</b>	<b>FUNGSI LAINNYA SEKRETARIAT DAERAH</b>					
<b>C</b>	<b>Program Kerjasama Daerah</b>				<b>155,000,000</b>	<b>190,000,000</b>
1	Kegiatan Peningkatan Kerjasama antar Daerah melalui fasilitasi dan monitoring evaluasi kerjasama	Terfasilitasinya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan daerah lain atau pihak ketiga sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	1	Dok	50,000,000	50,000,000
2	Kegiatan Pemeliharaan Pilar Batas daerah di Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonosobo	Terlaksananya pemeliharaan, perbaikan dan penanaman kembali pilar batas yang rusak, hilang atau bergeser	1	Paket	105,000,000	140,000,000
		Tersusunnya Perbup tentang batas Desa/Kelurahan	1	Dok		

<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah</b>					
1	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM)	Tercapainya indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	96,8	%	42,000,000	40,000,000
2	Kegiatan Pembuatan dan Publikasi LPPD, LKPJ, AMJ dan Memori Jabatan Bupati	Tersusunya pelaporan pemerintah daerah (LPPD, LKPJ, AMJ dan Memori Jabatan Bupati)	5	Dok	170,000,000	300,000,000
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur kecamatan	20	Kec	140,000,000	25,000,000
<b>F</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>					
1	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	2	Keg	325,000,000	150,000,000
<b>2</b>	<b>BAGIAN PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>1,065,000,000</b>	<b>905,000,000</b>
	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>1,065,000,000</b>	<b>905,000,000</b>
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>0</b>	<b>240,000,000</b>
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>1,065,000,000</b>	<b>665,000,000</b>
<b>Sumber Dana : DAU</b>					<b>0</b>	<b>665,000,000</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>						<b>665,000,000</b>
	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa</b>					
1	Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pelaksanaan Pilkades		12	Desa	0	240,000,000
<b>BELANJA LANGSUNG</b>					<b>1,065,000,000</b>	<b>665,000,000</b>
<b>1.</b>	<b>fungsi penunjang setda</b>					
<b>A.</b>	<b>Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah</b>					<b>100,000,000</b>
1.	Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa	Jumlah tukar menukar tanah kas desa yang dan alih fungsi tanah kas desa	10	Bidang	50,000,000	45,000,000
2.	identifikasi data alih fungsi dan Penyusunan tataguna tanah kas Desa	Terlaksananya inventarisasi data pemanfaatan dan alih fungsi tanah kas desa	20	kecamatan	55,000,000	55,000,000
<b>B</b>	<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemeritahan desa</b>					<b>385,000,000</b>
1.	Pengisian kekosongan perangkat Desa	Persentase pengisian jabatan perangkat desa yang kosong	77	Orang	40,000,000	40,000,000
2.	Pembinaan Administrasi	Meningkatnya tertibnya administrasi	266	Desa	50,000,000	50,000,000
3.	Bintek BPD	Terlaksananya bintek bagi Anggota BPD se Kabupaten Temanggung	266	Orang	100,000,000	100,000,000
4.	Penguatan Kekayaan Desa	Penguatan Kekayaan Desa	266	Desa	95,000,000	95,000,000

5.	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa	12	Desa		100,000,000	
<b>C.</b>	<b>Program penataan peraturan perundang-undangan</b>						<b>180,000,000</b>
1.	Evaluasi rancangan Peraturan Desa	Evaluasi rancangan Peraturan Desa	266	Desa	20,000,000	20,000,000	
2.	Penyusunan Raperda tentang Desa	Tersusunnya Raperda tentang Desa	2	Perda	30,000,000	50,000,000	
3.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Desa	Tercetaknya buku Perbup tentang Desa	4	Perbup	45,000,000	60,000,000	
4.	Sosialisasi Perda dan perbub desa	Tersosialisasinya perda dan Perbub serta Tercetaknya jenis buku kumpulan perundang –undangan	1	Kegiatan	45,000,000	50,000,000	
<b>3</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>					<b>2,209,235,000</b>	<b>2,399,000,000</b>
	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>2,209,235,000</b>	<b>2,399,000,000</b>	
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG				-	-	
B.	BELANJA LANGSUNG				2,209,235,000	2,399,000,000	
<b>Sumber Dana : DAU</b>					<b>2,209,235,000</b>	<b>2,399,000,000</b>	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>					<b>2,209,235,000</b>	<b>2,399,000,000</b>	
<b>2.</b>	<b>Fungsi penunjang Sekretariat Daerah</b>						
<b>A.</b>	<b>Program penataan peraturan perundang-undangan</b>						<b>2,399,000,000</b>
1.	legislasi peraturan perundang undangan	Terbahasnya raperda	15	Perda	126,410,000	135,000,000	
2.	fasilitasi sosialisasi Per UU	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan	35	Desa	125,000,000	140,000,000	
3.	Kajian peraturan undang-undangan thd per UU yang berlaku lbh tinggi & keserasian antar per UU an	terkajinya produk hukum sesuai peaturan perundang-undangan	20	Raperbup	110,000,000	118,000,000	
4.	Dokumentasi dan informasi hukum	Terdokumentasinya informasi hukum	120	Buku	51,055,000	85,000,000	
5.	Pengelolaan SIDI Hukum	Terkelolanya kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum	100	Persen	50,000,000	65,000,000	
6.	Peningkatan KAdarkum	Meningkatnya kesadaran hukum kader TP-PKK melalui kadarkum	20	kecamatan	60,000,000	68,000,000	
7.	Rencana aksi nasional HAM	Terlaksananya RANHAM	4	Kali	35,000,000	38,000,000	
8.	Pelayanan bantuan hukum didalam dan di luar pengadilan	Tertanganinya sengketa Datun Pemkab Temanggung	26	NL	1,651,770,000	1,750,000,000	
			6	L			
<b>4</b>	<b>BAGIAN KESRA</b>					<b>10,715,850,000</b>	<b>10,102,000,000</b>
	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>10,715,850,000</b>	<b>10,102,000,000</b>	
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>3,940,000,000</b>	<b>6,800,000,000</b>	
<b>A.</b>	<b>BELANJA HIBAH</b>					<b>3,825,000,000</b>	<b>6,650,000,000</b>
a	Hibah kepada PMI	Tersalaurkannya hibah kepada PMI	1	Lembaga	100,000,000	100,000,000	



b	Hibah kepada Kwarcab Pramuka 11.23 Temanggung (ke dindik)	Tersalurkannya hibah kepada Kwarcab	1	Lembaga	130,000,000	200,000,000
c	Hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung (ke dindik, 2018 anggaran tidak ada)	Tersalurkannya hibah Dewan Pendidikan	1	Lembaga	120,000,000	0
d	Hibah kepada Lembaga Keagamaan	Tersalurkannya hibah kepada Lembaga Keagamaan (MUI)	1	Lembaga	475,000,000	500,000,000
e	Hibah kepada BAZ	Tersalurkannya hibah kepada BAZ	1	Lembaga	-	200,000,000
f	Belanja Hibah Tempat Ibadah, Sarpras Pendidikan dan Sarpras Lembaga Keagamaan Lainnya	Tersalurkannya hibah kepada tempat ibadah, Sarpras, Pendidikan dan sarpras lembaga lainnya	250	Lembaga	3,000,000,000	1,650,000,000
g	Belanja hibah kepada PD Muhammadiyah	tersalurkannya hibah kepada PD Muhammadiyah	1	Lembaga		2,000,000,000
h	Belanja hibah kepada PC NU	tersalurkannya hibah kepada PC NU	1	Lembaga		2,000,000,000
<b>B</b>	<b>BELANJA SOSIAL</b>				<b>115,000,000</b>	<b>150,000,000</b>
a	Bantuan kepada anak yatim pada acara buka puasa bersama	Tersalurkannya bantuan kepada Yatim Piatu pada acara buka bersama	200	Orang	40,000,000	50,000,000
b.	Bantuan Penyantunan Sosial	Tersalurkannya biaya pendampingan keluarga td mampu dalam proses pengobatan.	40	Orang	75,000,000	100,000,000
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>6,775,850,000</b>	<b>3,302,000,000</b>
<b>I</b>	<b>PENDIDIKAN</b>					
<b>1</b>	<b>Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan</b>					
a	Pemberian bantuan Kesejahteraan Wiyata Bhakti Pendidikan	Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan lingkup kemenag.				
<b>2</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>				<b>150,000,000</b>	<b>250,000,000</b>
a	Pemberian bantuan siswa dan masyarakat berprestasi	Meningkatnya prestasi siswa dan masyarakat Temanggung di berbagai bidang	150	Orang	150,000,000	250,000,000
<b>II</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				<b>30,000,000</b>	<b>50,000,000</b>
<b>1</b>	<b>Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga</b>					
a	Keg. Fasilitasi Olahraga di lingkungan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya kegiatan olahraga bagi karyawan Setda dan Pemkab	30	Kali	30,000,000	50,000,000
<b>III</b>	<b>KESEHATAN</b>					
<b>1</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>				<b>50,000,000</b>	<b>100,000,000</b>
a	Kegiatan Rakor TP UKS Kab. Temanggung	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa tingkat dasar.	2	Keg	50,000,000	100,000,000

<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Nilai Keagamaan</b>					<b>1,257,000,000</b>	<b>2,777,000,000</b>
a	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah haji	Terselenggaranya kegiatan Ibadah Haji	1	Keg		570,000,000	950,000,000
b.	MTQ Pelajar, STQ, MHQ dan seleksi Rebana (Realisasi Keg menyesuaikan Provinsi)	Terselenggaranya MTQ, STQ, MHQ Tk Kabupaten dan pengiriman ke Provins, MAPSI, dan LPTQ	5	Keg		327,000,000	450,000,000
c.	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Penyelenggaraan Tarkhim ( Tarwih dan Silatiurohm)	Terlaksanya Kegiatan Keagamaan : Tarkhim, PHBI, Jumat Legi, Sholawatan Siduduro, .... )	60	Keg		300,000,000	850,000,000
d.	Pelatihan Guru TPQ dan Badan Koordinasi TPQ	Meningkatnya kapasitas guru TPQ dan Batko TPQ	260	Orang		25,000,000	57,000,000
e.	Pelatihan Managemen Masjid	Meningkatnya pemahaman takmir masjid dalam pengelolaan masjid.	200	Orang		35,000,000	50,000,000
f	Fasilitasi pensertifikatan tanah wakaf tempat ibadah dan sarana (tempat) pendidikan keagamaan	Terbantunya pensertifikatan tanah wakaf tempat ibadah dan sarana (tempat) pendidikan keagamaan	75			0	50,000,000
g	Fasilitasi AGAPAI (Asosiasi Guru Agama Pendidikan Agama Islam)						370,000,000
<b>IV</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
<b>1</b>	<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>					<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
a	Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya kualitas anak dan perempuan	10	Keg		15,000,000	0
<b>V</b>	<b>FUNGSI LAINNYA</b>						
<b>1</b>	<b>Program penyaluran bantuan hibah</b>						<b>125,000,000</b>
a	Kegiatan fasilitas kegiatan penyaluran bantuan/ hibah	Terfasilitasinya penyaluran bantuan hibah	12	Bulan			125,000,000
<b>5</b>	<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>					<b>1,267,000,000</b>	<b>11,705,000,000</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>						<b>1,267,000,000</b>	<b>11,705,000,000</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>						1,267,000,000	11,705,000,000
<b>I</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>						
<b>A</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						
a.	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan bidang ekonomi	5	kegiatan		90,000,000	100,000,000
b.	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan TPID	Terkoordinasi pengendalian inflasi di daerah kabupaten	3	kegiatan		30,000,000	55,000,000
<b>B</b>	<b>Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM</b>						<b>20,000,000</b>
a.	Kegiatan Monitoring Program Kredit Lunak	Terlaksananya monitoring ke penerima Kredit Lunak dan LED	60	Kelompok		18,000,000	20,000,000

<b>C</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>					<b>10,245,000,000</b>
a.	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi BUMD	Terlaksananya pembinaan & evaluasi BUMD	4	kegiatan	75,000,000	75,000,000
b.	Kegiatan Fasilitasi Manajemen Organisasi BUMD	Terlaksananya kegiatan fasilitas manajemen organ dan pengelolaan BUMD	1	kegiatan	18,000,000	150,000,000
c.	Kegiatan Fasilitasi Penyertaan Modal	Terlaksananya penyusunan Raperda Penyertaan Modal	1	RAT	18,000,000	20,000,000
d.	Penyertaan modal BUMD					10,000,000,000
<b>D</b>	<b>Program peningkatan ketahanan pangan</b>					
a.	Kegiatan Pendampingan Program RASKIN	Terkoordinasinya penyaluran program RASKIN sesuai RTS/RTM	12	Bulan	1,000,000,000	1,250,000,000
<b>E</b>	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>					
a.	Kegiatan Pengawasan Program LPG 3 KG	Terkoordinasinya penyaluran LPG 3 KG sesuai kuota	12	Bulan	18,000,000	35,000,000
<b>F</b>	<b>DBHCHT</b>					
<b>1</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>					
a	Kegiatan sosialisasi ketentuan bidang cukai	Terkoordinasinya penggunaan dana DBHCHT sesuai peraturan	3	kegiatan		200,000,000
<b>6</b>	<b>BAGIAN PEMBANGUNAN</b>				<b>730,000,000</b>	<b>755,000,000</b>
	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>730,000,000</b>	<b>755,000,000</b>
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
B.	BELANJA LANGSUNG				730,000,000	755,000,000
<b>Sumber Dana : DAU</b>					<b>730,000,000</b>	<b>755,000,000</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>					<b>730,000,000</b>	<b>755,000,000</b>
<b>I</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>					
<b>A.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					
1.	Fasilitasi Pelaksanaan DAK, dan bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan DAK dan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota	4	laporan	50,000,000	50,000,000
<b>II</b>	<b>Fungsi lainnya Setda</b>					
<b>B.</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah</b>					
1.	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung	Tersusunnya Buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung	1	dokumen	83,000,000	85,000,000
<b>C.</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah</b>					
1.	Pengendalian pelaksanaan kegiatan (Pengendalian Program)	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan dan terverifikasinya dokumen kontrak pengadaan barang/jasa SKPD	3	kegiatan	143,000,000	145,000,000

D	Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa					
1.	Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Terlaksananya pelelangan umum barang/jasa pemerintah	1	kegiatan	306,000,000	365,000,000
2.	Peningkatan SDM Pengelola ULP	Sosialisasi LPSE dan ULP serta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2	kegiatan	84,000,000	85,000,000
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana LPSE	Pengadaan sarana dan prasarana LPSE	1	Paket	62,000,000	25,000,000
<b>7</b>	<b>BAGIAN UMUM</b>				<b>33,235,970,000</b>	<b>39,567,231,508</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>33,235,970,000</b>	<b>39,567,231,508</b>
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG				0	<b>12,212,231,508</b>
B.	BELANJA LANGSUNG				33,235,970,000	<b>27,355,000,000</b>
<b>Sumber Dana : DAU</b>					<b>33,235,970,000</b>	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
A.	Belanja Pegawai	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	12	Bulan		8,551,231,508
b	TPP	Tersedianya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	12	Bulan		3,661,000,000
<b>BELANJA LANGSUNG</b>					<b>33,235,970,000</b>	
<b>2.</b>	<b>Pendukung operasional PD</b>					
<b>A.</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>					<b>18,195,000,000</b>
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening listrik, PJU, telpon, dan air	12	Bulan	12,000,000,000	2,000,000,000
2.	Penyediaan jasa pemel. dan perijinan kendaraan dinas/ops	Tersedianya jasa service untuk kendaraan dinas, penggantian suku cadang, tersedianya BBM/gas dan pelumas, KIR, dan STNK	12	Bulan	800,000,000	1,000,000,000
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih, dan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	800,000,000	1,100,000,000
4.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kantor berupa telpon, AC dan meubelair yang memadai, dan jasa perbaikan alat kerja	12	Bulan	100,000,000	150,000,000
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	12	Bulan	100,000,000	200,000,000
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	12	Bulan	200,000,000	250,000,000
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat listrik dan elektronika	12	Bulan	100,000,000	200,000,000

8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Wawasan, dan Kompas, dan referensi perundang-undangan dan peraturan lainnya	12	Bulan	98,000,000	150,000,000
9.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan rumah tangga Bupati dan Wabup	12	Bulan	2,250,000,000	2,500,000,000
10.	Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain dan dengan pemerintah pusat	12	Bulan	3,000,000,000	3,000,000,000
11.	Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah	Tercukupinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi antar instansi, SKPD	12	Bulan	40,000,000	45,000,000
12.	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya honor tenaga honorer, penjaga repeater, dan petugas kebersihan rumah dinas, dan pembantu rumah dinas	12	Bulan	550,000,000	900,000,000
13.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	12	Bulan	4,500,000,000	6,700,000,000
<b>B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						<b>6,575,000,000</b>
1.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	450,000,000	4,700,000,000
2.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas yang memadai	12	Bulan	600,000,000	350,000,000
3.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	12	Bulan	1,550,000,000	275,000,000
4.	Pengadaan meubelair	Tersedianya sarana dan prasarana kantor berupa meubelair yang memadai	12	Bulan	275,000,000	275,000,000
5.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpenuhinya kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan rumah dinas	12	Bulan	547,970,000	400,000,000
6.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor	12	Bulan	1,100,000,000	400,000,000
7.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan Perbaikan dan pemeliharaan komputer, LCD, mesin ketik, alat kesenian	12	Bulan	90,000,000	175,000,000
<b>C. Program peningkatan disiplin aparatur</b>						

1	Pengadaan pakaian Dinas dan atributnya	Terpenuhinya kebutuhan pakain dinas bupati, Wabup, Sekda, pejabat eselon, staf	35 stel PSL, 2 stel PDU & Atribut, 16 stel PSR, 12 stel PDH Bupati & Wabup, 25 stel PDH Spri, 16 stel Batik Bupati & Wabup, PSL kabag dan Asisten, PDH Karyawan karyawan setda		250,000,000	300,000,000
<b>D.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>					
1.	Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia)	kepesertaan kabupaten temanggung sebagai anggota APKASI dan FORSESDASI	12	Bulan	35,000,000	35,000,000
2.	Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ LPND dan peringatan hari besar nasional dan daerah	12	Bulan	3,000,000,000	2,250,000,000
<b>9</b>	<b>BAGIAN ORTALA</b>				<b>1,550,000,000</b>	<b>1,515,000,000</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>1,550,000,000</b>	<b>1,515,000,000</b>
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
B.	BELANJA LANGSUNG				1,550,000,000	1,515,000,000
<b>Sumber Dana : DAU</b>					<b>1,550,000,000</b>	<b>1,515,000,000</b>
BELANJA LANGSUNG					1,550,000,000	1,515,000,000
<b>1.</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN</b>					
<b>A.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					
1.	Penyusunan Perjanjian Kerja Bupati Tahun 2018 dan Penyusunan Ikjip Bupati Tahun 2017	Dokumen Penetapan Kinerja Bupati 2018 dan laporan kinerja Bupati Tahun 2017	2	Dokumen	30,000,000	85,000,000
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	3	Dokumen	5,000,000	5,000,000
3	Penyusunan LKjIP Kabupaten	Dokumen laporan kinerja Bupati Tahun 2017				
<b>2</b>	<b>FUNGSI LAINNYA SETDA</b>					
<b>B.</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah</b>					
1.	Pengembangan Budaya Kerja dan Integritas Aparatur	Sosialisasi dan penerapan pengembangan budaya kerja dan integritas aparatur	1	Kegiatan	75,000,000	75,000,000
<b>C.</b>	<b>Program pembinaan dan pengembangan aparatur</b>					
1.	Analisis Beban Kerja	Dokumen ABK	1	Dokumen	150,000,000	150,000,000
2.	Survey IKM atas Pelayanan Publik	Data IKM	150	Satuan pendidikan	100,000,000	100,000,000
3.	Penyusunan Standar kompetensi manajerial	Dokumen SKM	1	Dokumen	150,000,000	150,000,000

4.	Pelatihan Pelayanan Prima	Terlaksananya kegiatan bimtek pelayanan Prima	100	SKPD	100,000,000	100,000,000	
<b>D.</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>						
1.	Penyusunan Buku Standar Indeks Harga	Buku Standar Indeks Harga Tahun 2018 dan dokumen perbup TPP	1	Dokumen	200,000,000	200,000,000	
<b>E.</b>	<b>Program penataan peraturan perundang-undangan</b>						<b>650,000,000</b>
1.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersusunnya Dokumen SOP AP untuk seluruh Perangkat Daerah / Unit Kerja	150	Dokumen	300,000,000	300,000,000	
2.	Penyusunan Standar Pelayanan	Dokumen Standar Pelayanan	150	Dokumen	150,000,000	150,000,000	
3.	Partisipasi Lomba Pelayanan Publik	Partisipasi penilaian lomba kinerja pelayanan public	1	Kegiatan	140,000,000	50,000,000	
4	Pembangunan Zona Integritas	terwujudnya komitmen pencegahan korupsi yang nyata	1	Kegiatan	150,000,000	150,000,000	
<b>4</b>	<b>BAGIAN HUMAS</b>				<b>6,542,638,000</b>	<b>7,256,500,000</b>	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>							
<b>1</b>	<b>KOMUNIKASI dan INFORMATIKA</b>				<b>6,542,638,000</b>	<b>7,256,500,000</b>	
<b>A.</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa</b>					<b>6,542,638,000</b>	<b>7,256,500,000</b>
1	Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala	Tersedianya informasi melalui Majalah Gema Bhumi Phala	12,000,000	eksemplar MGBP	213,900,000	225,000,000	
2	Pengelolaan Website Kab. Temanggung	Tersedianya informasi melalui website dan sms gateway	1200	informasi /berita/sms	161,850,000	200,000,000	
3	Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi dan media massa bagi masyarakat	Meningkatnya informasi tentang kegiatan Pemkab di Temanggung	7	Penyebaran informasi di media massa dan luar ruang	200,000,000	170,000,000	
4	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya informasi kepada masyarakat	500 3000 28	Release berita dimedia massa kerjasama dengan wartawan	175,000,000	160,000,000	
5	Penyebaran Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (press tour)	Terselenggaranya kegiatan press tour	1	kegiatan	350,000,000	350,000,000	
6	Penyelenggaraan Kehumasan	Tersebarluaskanya informasi kegiatan Pemkab	720	dokumen tasi kegiatan pemkab	250,000,000	250,000,000	

---

7	Pembuatan buku dan video profil Kab. Temanggung	Tersedianya buku profil dan video prof Kab. Temanggung	300/200	buku/ video profil	27,000,000	75,000,000
8	Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Temanggung	Terselenggaranya kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Temanggung	1800	Program acara siaran	3,843,000,000	5,500,000,000
9	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio ERTE FM	Terselenggaranya siaran di Radio ERTE FM Temanggung	1800	program acara siaran	325,000,000	326,500,000
<b>DBHCHT</b>						
1	Pengisian Materi Tayang Videotron / Pengadaan LED Videotron	Tersedianya informasi melalui videotron	240	menit SPOT	996,888,000	500,000,000



## BAB III

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2018****3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Guna menyusun rencana kerja SKPD, maka perlu menelaah kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Alinea berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui terkait dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Bidang pembangunan yang digariskan RPJPN 2005-2025, yaitu bidang pembangunan:

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Ekonomi
3. Sarana dan Prasarana
4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6. Politik
7. Pertahanan dan Keamanan
8. Hukum dan Aparatur
9. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

Adapun arah pembangunan nasional tahun 2018 secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Isu-isu strategis pada masing-masing bidang Pembangunan adalah:

1. Makro
  - a. Pembangunan manusia dan masyarakat
2. Pembangunan manusia dan masyarakat
  - a. Kependudukan dan KB
  - b. Pendidikan
  - c. Kesehatan
  - d. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
  - e. Perlindungan anak
  - f. pembangunan masyarakat
3. Pembangunan sektor unggulan
  - a. Kedaulatan pangan
  - b. Kedaulatan energi
  - c. Maritim dan kelautan
  - d. Pariwisata dan industri manufaktur
  - e. Ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas
4. Pembangunan dimensi pemerataan
  - a. Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi
  - b. Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu
5. Pembangunan kewilayahan dan antar wilayah
  - a. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah
6. Pembangunan politik hukum pertahanan dan keamanan
  - a. Politik dan Demokrasi
  - b. Penegakan Hukum
  - c. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
  - d. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah
  - e. Pertahanan dan Keamanan

Setelah menyimak beberapa hal yang berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional tersebut diatas, terkait bidang pembangunan Hukum dan Aparatur,

maka Setda telah menetapkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayan publik sebagai program yang diprioritaskan dalam Renstra.

Reformasi birokrasi atau perubahan secara sungguh-sungguh terhadap tatanan birokrasi menuju tatanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, telah menjadi keharusan di era pasar bebas dunia saat ini.

Guna memberi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Sebagai tindaklanjutnya pemerintah juga telah menerbitkan beberapa regulasi sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi baik bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, salah satu diantaranya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.

Pemerintah Kabupaten Temanggung tentu saja tidak lepas dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan birokrasi yang ada.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan reformasi birokrasi tercermin dari visi Kabupaten Temanggung: “Pemerintahan yang bersih” dan misi keenam “Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik”. Visi dan misi terkait reformasi birokrasi tersebut, oleh Sekretariat Daerah berusaha diwujudkan melalui rencana kerja dari tahun ke tahun termasuk di tahun 2018.

### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan, merupakan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki posisi penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Kab. Temanggung 2013-2018.

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2018, dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018:

- a. Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum.
- b. Terwujudnya hasil kajian dan rumusan kebijakan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Terwujudnya hubungan kelembagaan yang harmonis dan sinergis antara Eksekutif dan Legislatif.
- d. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan fasilitasi kehidupan keagamaan.
- e. Meningkatkan sinergi koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan disetiap bidang.
- f. Meningkatkan sinergi koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum.
- g. Mewujudkan kualitas dan kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah, termasuk didalamnya Perangkat Desa/Kelurahan.
- h. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi aparatur pemerintah daerah.
- i. Meningkatkan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, Produktif dan bertanggung jawab.
- j. Mewujudkan pelayanan administrasi umum dan keuangan secara cepat dan tepat, baik kepada pimpinan maupun kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
- k. Mewujudkan pengembangan dan pengelolaan aset pemerintah khususnya asset/barang inventaris yang dikelola oleh Sekretariat Daerah secara benar, tertib, dan tepat guna.
- l. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- m. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan umum dan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah.
- n. Mewujudkan ruang pengawasan masyarakat dengan membangun kotak pos pengawas dan penyediaan SMS gateway.
- o. Mengembangkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain re-design situs/web Pemkab [www.Temanggungkab.go.id](http://www.Temanggungkab.go.id), pengembangan Sistem Informasi on line antar SKPD.

Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018:

- a. Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik lokal.
- b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

- c. Terlaksananya seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam setiap bidang secara baik, terpadu, dan terkoordinir.
- d. Terwujudnya advokasi hukum bagi pemerintah daerah.
- e. Terwujudnya komunikasi yang baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- f. Terjalinnnya hubungan kelembagaan yang harmonis antara Eksekutif (SKPD) dengan Legislatif.
- g. Terlaksananya kerjasama antar daerah.
- h. Terciptanya koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum.
- i. Terciptanya lembaga pemerintah yang hemat struktur dan kaya fungsi sesuai dengan kondisi dan kepentingan daerah.
- j. Tersedianya sumberdaya aparatur yang berkualitas dan proporsional.
- k. Terwujudnya peningkatan system kelembagaan, kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah Desa/Kelurahan.
- l. Terwujudnya tertib pelayanan administrasi yang memadai.
- m. Terlaksananya tertib administrasi umum.
- n. Terwujudnya tertib administrasi asset pemerintah.
- o. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan.
- p. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan.
- q. Meningkatnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.
- r. Tercukupinya sarana prasarana pelayanan publik.
- s. Meningkatnya pengetahuan masyarakat soal hukum.
- t. Terwujudnya pengawasan masyarakat melalui kotak pos pengawas maupun sms gateway.
- u. Terwujudnya pengembangan sistem informasi online antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- v. Tersebarnya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui situs/website Pemerintah Kabupaten Temanggung.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan yang dimunculkan dalam perencanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada tahun 2018, mempertimbangkan berbagai faktor pencapaian target baik secara langsung maupun tidak langsung, atas:

- a. Pencapaian visi dan misi Sekretaris Daerah

Visi Setda yang ditetapkan dalam Renstra Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 adalah :

**“TERWUJUDNYA SEKRETARIAT DAERAH YANG HANDAL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK FUNGSINYA YANG MAMPU MENDUKUNG TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah merumuskan 6 (enam) misi daerah, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Setda dan SKPD
2. Membangun sinergi koordinasi antar SKPD dan lembaga lain guna mendorong terwujudnya regulasi dibidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesra dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan
3. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur (pegawai daerah);
4. Meningkatkan pelayanan administrasi dan menjadi jembatan yang baik antara SKPD dengan Bupati;
5. Mendorong regulasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, mudah dan terjangkau serta mendukung iklim yang kondusif bagi investasi;
6. Membangun e-government untuk mempercepat pelayanan dan memberi akses pelayanan informasi kepada masyarakat;

Visi dan Misi Setda Kabupaten Temanggung tersebut menjadi pedoman utama bagi setiap Bagian dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan. Segala sumber daya yang dimiliki Bagian akan diarahkan dan dikelola dalam rangka pencapaian visi dan misi Setda Kabupaten Temanggung tersebut.

**b. Pencapaian MDGs**

Target utama dari MDGs adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3, dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih. Secara keseluruhan terdapat 8 butir tujuan pembangunan milenium yaitu:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Menurunkan angka kematian anak

5. Meningkatkan kesehatan ibu
  6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
  7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup
  8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
- c. Pengentasan kemiskinan

Masih adanya lapisan masyarakat di Kabupaten Temanggung yang berkategori belum sejahtera, menjadi perhatian dan diupayakan untuk ditanggulangi oleh semua OPD baik secara langsung maupun tidak langsung melalui rencana program dan kegiatan di OPD.

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indexs* (HDI). Angka IPM merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesehatan (angka usia harapan hidup), aspek pendidikan (angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah), dan aspek ekonomi (rata-rata pengeluaran riil per kapita dalam paritas daya beli masyarakat).

Dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Sekretariat Daerah, maka pengentasan kemiskinan telah menjadi perhatian dan diupayakan melalui rencana kerja yang disusun setiap tahunnya.

d. Pencapaian SPM

Keberhasilan penerapan SPM di daerah menjadi hal yang sangat penting agar tercapai pemberian pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Rencana pencapaian SPM yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menjadi dasar perencanaan program dan kegiatan setiap tahun oleh OPD.

Guna tercapainya indikator SPM, maka Sekretariat Daerah melalui Bagian Pemerintahan Umum setiap tahun melakukan pembinaan dan evaluasi penerapan standar

pelayanan minimal di beberapa SKPD yang memiliki SPM seperti Dinas Kesehatan, KP3M, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;

Kabupaten Temanggung merupakan daerah agraris, memiliki berbagai potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan terutama di sektor pertanian, industri pengolahan, dan sebagainya.

Dalam rangka pendayagunaan potensi ekonomi daerah, maka Sekretariat Daerah memiliki peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan ekonomi, peningkatan iklim investasi daerah, fasilitasi kemitraan petani dengan industri, monitoring program kredit lunak, serta pembinaan dan evaluasi BUMD.

Secara keseluruhan rincian program dan kegiatan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Bagian Pemerintahan**

**Belanja tidak langsung**

**FUNGSI PENUNJANG SEKRETARIAT DAERAH**

**Belanja Hibah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**

1. kegiatan belanja hibah kepada KPU

Dengan indikator tersalurkannya belanja hibah kepada KPU dengan target kinerja 1 kegiatan.

2. kegiatan belanja hibah kepada Panwaslu

Dengan indikator tersalurkannya belanja hibah kepada panwaslu dengan target kinerja 1 kegiatan.

**BELANJA LANGSUNG**

**I.URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**1. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**

a. Koordinasi Keamanan Daerah

Dengan capaian indikator terlaksananya pengamanan daerah dalam rangka hari raya idul fitri dan Natal dengan target 2 kegiatan.

**II.FUNGSI LAINNYA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**2. Program pendidikan politik dalam negeri**

a. Kegiatan desk Pemilihan Umum



Dengan capaian indikator terfasilitasinya pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan target 1 kegiatan.

### **III. FUNGSI LAINNYA SEKRETARIAT DAERAH**

#### **1. Program Kerjasama Daerah**

- a. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah melalui Fasilitasi dan Monev Kerjasama  
Dengan capaian indikator terfasilitasinya kerjasama antara pemerintahan kabupaten Temanggung dengan daerah lain/ pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebanyak 1 dokumen.
- b. Kegiatan pemeliharaan pilar batas daerah di Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonosobo  
Terlaksananya pemeliharaan, perbaikan dan penanaman kembali pilar batas yang rusak, hilang atau bergeser antara Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonosobo dengan target 1 paket.

#### **2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah**

- a. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan target 96,80 %.
- b. Kegiatan Pembuatan dan Publikasi LPPD, LKPJ, AMJ dan memori jabatan Bupati  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator Tersusunya pelaporan pemerintah daerah (LPPD dan LKPJ akhir tahun dan AMJ dan Memori Jabatan Bupati) dengan target 5 dokumen.

#### **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur kecamatan dan Perbup ADKEL dengan target 20 Kecamatan.

#### **4. Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan Pemerintah**

- a. Kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintah

Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator tercapainya peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah dibidang penyelenggaraan pemerintahan dengan target 2 kegiatan.

Di tahun 2018, Bagian Pemerintahan telah merencanakan 1 belanja hibah dengan 2 kegiatan dengan anggaran Rp. 23.400.000.000,- (belanja tidak langsung) dan 3 urusan, 4 program dan 8 kegiatan untuk belanja langsung sebesar Rp. 945.000.000,-. Sehingga total belanja pada Bagian Pemerintahan tahun 2018 sebesar Rp. 24.345.000.000,-

## **BAGIAN PEMERINTAHAN DESA**

### **BELANJA TIDAK LANGSUNG**

#### **Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa**

- a. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pelaksanaan Pilkades

Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator terlaksananya kegiatan pilkades dengan tertib, lancar dan aman di 12 desa.

### **BELANJA LANGSUNG**

#### **I.FUNGSI PENUNJANG**

##### **1. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah**

- a. Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa

Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator terlaksananya tukar menukar tanah kas desa dan alih fungsi tanah kas desa sebanyak 10 bidang.

- b. Identifikasi data alih fungsi dan Penyusunan tataguna tanah kas Desa

Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator terlaksananya inventarisasi data pemanfaatan dan alih fungsi tanah kas desa dengan target 20 kecamatan.

##### **2. Program peningkatan kapasitas aparatur pemeritahan desa**

- a. Pengisian kekosongan perangkat Desa

Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator terlaksananya pengisian jabatan perangkat desa yang kosong sebanyak 77 orang.

- b. Pembinaan Administrasi

Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator meningkatnya tertib administrasi di 266 desa.

c. Bintek BPD

Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator terlaksananya bintek bagi anggota BPD se Kabupaten Temanggung dengan target 266 orang.

d. Penguatan kekayaan Desa

Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator penguatan kekayaan Desa di 266 Desa.

e. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

Kegiatan dimaksud memiliki capaian indikator terfasilitasinya kegiatan pemilihan Kepala Desa di 12 desa.

**3. Program penataan peraturan perundang-undangan**

a. Evaluasi rancangan Peraturan Desa

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terevaluasinya Rancangan Peraturan Desa bagi 266 desa

b. Penyusunan Perda tentang Desa

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang Desa dengan target 2 dokumen Perda.

c. Penyusunan Perbup tentang Desa

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersusunnya dokumen Peraturan Bupati tentang Desa dengan target 4 dokumen Perda.

d. Sosialisasi Perda dan Perbup Desa

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersosialisasinya Perda dan Perbup serta tercetaknya dokumen kumpulan peraturan perundang-undangan dengan target 1 kegiatan

Bagian Pemerintahan desa telah merencanakan 1 kegiatan dengan anggaran Rp 240.000.000,- untuk belanja tidak langsung. Dan untuk belanja langsung terdiri dari 1 urusan, 3 program 11 kegiatan dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 665.000.000,-. Sehingga total belanja pada Bagian Pemerintahan Desa tahun 2018 sebesar Rp. 905.000.000,-

**BAGIAN HUKUM**

**BELANJA LANGSUNG**

**I.FUNGSI PENUNJANG SEKRETARIAT DAERAH**

**1. Program penataan peraturan perundang-undangan**

a. Legislasi peraturan perundang undangan

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terbahasnya Raperda sebanyak 15 Perda

b. Fasilitasi sosialisasi Peraturan perundang-undangan

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan di 35 desa

c. Kajian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang undangan

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terkajinya produk hukum daerah sesuai peraturan perundang-undangan dengan target 20 Raperbup

d. Dokumentasi dan informasi hukum

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terdokumentasikannya informasi hukum sebanyak 120 buku

e. Pengelolaan SJDI Hukum

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terkelolanya kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum dengan target 100 %

f. Peningkatan kesadaran hukum

Kegiatan dimaksud memiliki capaian meningkatnya kesadaran hukum kader TP-PKK melalui kadarkum di 20 kecamatan

g. Rencana aksi nasional HAM

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya RANHAM dengan target 4 kali

h. Pelayanan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tertanganinya sengketa Datun Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan target 26 perkara NL dan Perkara L

Di tahun 2018 Bagian Hukum telah merencanakan 1 Urusan, 1 program dan 8 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.399.000.000,-.

## **BAGIAN KESRA**

### **(BELANJA TIDAK LANGSUNG)**

#### **I. Belanja hibah**

1. Hibah kepada PMI

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersalurkannya Hibah kepada PMI dengan target 1 lembaga

2. Hibah kepada PMI.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersalurkannya Hibah kepada Kwartir Cabang Pramuka 11.23 Temanggung dengan target 1 lembaga.

3. Hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung (ke dindik, 2018 anggaran tidak ada).  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersalurkannya Hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung dengan target 1 lembaga.
4. Hibah kepada lembaga Keagamaan.  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersalurkannya Hibah kepada lembaga Keagamaan (MUI) dengan target 1 lembaga.
5. Hibah kepada BAZ.  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersalurkannya Hibah kepada BAZ dengan target 1 lembaga.
6. Hibah tempat ibadah, sarpras pendidikan dan sarpras lembaga keagamaan lainnya.  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersalurkannya hibah tempat ibadah sarpras pendidikan dan sarpras lembaga keagamaan lainnya dengan target 250 lembaga.
7. Belanja hibah kepada PD Muhammadiyah.  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersalurkannya hibah kepada PD Muhammadiyah dengan target 1 lembaga.
8. Belanja hibah kepada PC NU.  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersalurkannya hibah kepada PC NU dengan target 1 lembaga.

## **II. Belanja sosial**

1. Bantuan kepada anak yatim pada acara buka puasa bersama.  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersalurkannya bantuan sosial kepada anak yatim pada acara buka bersama dengan target kinerja 200 Orang.
2. Bantuan penyantunan sosial.  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersalurkannya bantuan penyantunan sosial dengan target 40 Orang.

## **BELANJA LANGSUNG**

### **I. URUSAN PENDIDIKAN**

1. **Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan**
    - a. Pemberian bantuan Kesejahteraan Wiyata Bhakti Pendidikan.  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan lingkup kemenag.
-

**2. Program pendidikan non formal**

- a. Pemberian bantuan siswa dan masyarakat berprestasi.  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian Meningkatnya prestasi siswa dan masyarakat Temanggung di berbagai bidang dengan target 150 orang.

**II.URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

**3. Program pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**

- a. Kegiatan fasilitasi olahraga di lingkungan Sekretariat Setda.  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terfasilitasinya kegiatan olahraga bagi karyawan Setda dan Pemkab dengan target 30 kegiatan.

**III.URUSAN KESEHATAN**

**4. Program Upaya kesehatan masyarakat**

- a. Kegiatan Rakor TP UKS Kab. Temanggung.  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian Cakupan penjangkauan kesehatan siswa tingkat dasar dengan target 2 kegiatan.

**IV.URUSAN SOSIAL**

**5. Program pengembangan nilai keagamaan**

- a. Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terselenggaranya kegiatan Ibadah Haji dengan target 1 kegiatan.
- b. MTQ Pelajar, STQ, MHQ dan seleksi Rebana (Realisasi Keg menyesuaikan Provinsi).  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian terselenggaranya MTQ, STQ, MHQ Tk Kabupaten dan pengiriman ke Provins, MAPSI, dan LPTQ dengan target 5 kegiatan.
- c. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Penyelenggaraan Tarkhim (Tarwih dan Silaturohim).  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya kegiatan Keagamaan : Tarkhim, PHBI, Jumat Legi, Sholawatan Siduduro) dengan target 60 kegiatan.
- d. Pelatihan Guru TPQ dan badan koordinasi TPQ.  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian meningkatnya kapasitas guru TPQ dan Batko TPQ sejumlah 260 orang.
- e. Pelatihan Manajemen Masjid  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian meningkatnya pemahaman takmir masjid dalam pengelolaan Masjid dengan target 260 orang.

f. **Fasilitasi AGAPAI (Asosiasi Guru Agama Pendidikan Agama Islam)**

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terfasilitasinya guru agama pendidikan agama Islam.

g. **Fasilitasi pensertifikatan tanah wakaf tempat ibadah dan sarana (tempat) pendidikan keagamaan.**

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terbantunya pensertifikatan tanah wakaf tempat ibadah dan sarana (tempat) pendidikan keagamaan dengan target 75.

**V. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak**

**6. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**

a. **Kegiatan Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Cakupan Meningkatnya kualitas anak dan perempuan dengan target 10 kegiatan.

**VI. Fungsi Lainnya**

**7. Program penyaluran bantuan hibah**

a. **Kegiatan fasilitas kegiatan penyaluran bantuan/ hibah.**

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Cakupan Terfasilitasinya penyaluran bantuan hibah dengan target 12 bulan.

Di tahun 2018 Bagian Kesejahteraan Rakyat telah merencanakan 2 belanja bantuan hibah untuk belanja tidak langsung dengan total anggaran Rp. 6.800.000.000,-. Sedangkan untuk belanja langsung terdiri dari 6 urusan, 7 program, 13 kegiatan dengan jumlah belanja langsung sebanyak Rp. 3.302.000.000,-. Sehingga total belanja Bagian Kesra di tahun 2018 sebesar Rp. 10.102.000.000,-

**BAGIAN PEREKONOMIAN**

**BELANJA LANGSUNG**

**I. FUNGSI LAINNYA SEKRETARIAT SETDA**

**1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

a. **Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.**

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan target 5 kegiatan.

b. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan TPID.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya koordinasi pengawasan inflasi di daerah Kabupaten dengan target 3 kegiatan.

**2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM**

a. Kegiatan Monitoring Program Kredit Lunak.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terlaksananya monitoring ke penerima Kredit Lunak dan LED dengan target 60 kelompok.

**3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**

a. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi BUMD.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terlaksananya pembinaan & evaluasi BUMD dengan target 4 kegiatan.

b. Kegiatan Fasilitasi Manajemen Organisasi BUMD.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya kegiatan fasilitas manajemen organ dan pengelolaan BUMD dengan target 5 Perda.

c. Kegiatan Fasilitasi Penyertaan Modal.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya penyusunan Raperda penyertaan modal dengan target 1 kegiatan.

**4. Program peningkatan ketahanan pangan**

a. Kegiatan Pendampingan Program RASKIN.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terkoordinasinya penyaluran program Raskin sesuai RTS/RTM dengan target 12 bulan.

**5. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**

a. Kegiatan Pengawasan Program LPG 3 KG.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya distribusi LPG 3 KG sesuai kuota dengan target 12 bulan.

Bagian Perekonomian juga memiliki 1 program dengan 1 kegiatan yang bersumber dari DBHCT.

**6. Program perencanaan pembangunan daerah**

a. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCT).

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terkoordinasinya penggunaan dana DBHCT sesuai peraturan dengan target 3 kegiatan.



Untuk tahun 2018 Bagian Perekonomian telah merencanakan 1 urusan, 6 program, 9 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung Rp. 11.705.000.000,-.

## **BAGIAN PEMBANGUNAN**

### **I.FUNGSI PENUNJANG**

#### **1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

- a. Fasilitasi pelaksanaan DAK dan bantuan keuangan kepada Kabupaten.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersusunnya laporan DAK dan bantuan keuangan kepada Kabupaten sebanyak 4 dokumen laporan.

### **II.FUNGSI LAINNYA SETDA**

#### **2. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah**

- a. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersusunnya buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung sebanyak 1 dokumen Perbup.

#### **3. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah**

- a. Pengendalian pelaksanaan kegiatan (Pengendalian Program).

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan dan terverifikasinya dokumen kontrak pengadaan dengan target 3 kegiatan.

### **III.Urusan komunikasi dan informatika**

#### **4. Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa**

- a. Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya pelelangan umum barang/jasa pemerintah dengan target 1 kegiatan.

- b. Peningkatan SDM Pengelola ULP.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya Sosialisasi LPSE dan ULP serta pelatihan pengadaan barang/ jasa pemerintah dengan target 2 kegiatan.

- c. Peningkatan Sarana dan Prasarana LPSE.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor dengan target 1 paket.

Untuk tahun 2018 Bagian Pembangunan telah merencanakan 3 urusan, 4 program, dan 6 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung Rp. 755.000.000,-.

## **BAGIAN UMUM**

### **BELANJA TIDAK LANGSUNG**

#### **I. Belanja Pegawai**

##### **1. Gaji**

Dengan capaian indikator kinerja tersedianya gaji dan tunjangan PNS Setda selama 12 bulan.

##### **2. TPP**

Dengan capaian indikator kinerja tersedianya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja selama 12 bulan.

### **BELANJA LANGSUNG**

#### **I. URUSAN PENDUKUNG OPERASIONAL PD**

##### **1. Program pelayanan administrasi perkantoran**

###### **a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.**

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terbayarnya tagihan rekening listrik, PJU, telephone, dan air dengan target 12 bulan.

###### **b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ops.**

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Tersedianya jasa service untuk kendaraan dinas, penggantian suku cadang, tersedianya BBM/ gas dan pelumas, KIR dan STNK dengan target 12 bulan.

###### **c. Penyediaan jasa kebersihan kantor.**

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih, dan jasa kebersihan kantor dengan target 12 bulan.

###### **d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.**

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya peralatan kantor berupa telephone, AC, dan meubelair yang memadai, dan jasa perbaikan alat kerja dengan target 12 bulan.

###### **e. Penyediaan alat tulis kantor.**

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya alat tulis kantor dengan target 12 bulan.

- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor dengan target 12 bulan.
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya komponen alat listrik dan elektronika dengan target 12 bulan.
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya referensi guna mendukung kelancaran pelaksanaan kerja dengan target 12 bulan.
- i. Penyediaan makanan dan minuman.  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya makan minum rapat, tamu, dan Rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati dengan target 12 bulan.
- j. Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah.  
Kegiatan dimaksud memiliki capai tercukupinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain dan dengan pemerintah pusat dengan target 12 bulan.
- k. Rapat- rapat dan konsultasi ke dalam daerah.  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian Tercukupinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi antar instansi dan organisasi pemerintah daerah dengan target 12 bulan.
- l. Jasa Pelayanan Perkantoran.  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian tterbayarnya honor tenaga honorer, penjaga repeater, sewa tenda sewa sound system, dekorasi dan publikasi denngan target 12 bulan.
- m. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya jasa pengamanan kantor OPD dan rumah dinas dengan target 12 bulan.

## **2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional  
Kegiatan dimaksud memiliki capaian teredianya kendaraan dnas/ operasional dengan target kendaraan roda 2 (150 cc) 43 unit, kendaraan roda 2

b. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas yang memadai dengan target lemari arsip bupati 1 unit, tempat tidur sopir 2 unit, kompor gas besar

c. Pengadaan peralatan gedung kantor

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor dengan target almari arsip 8 unit, filing kabinet 4 unit, meja komputer 2 unit

d. Pengadaan mebeleur

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Tersedianya sarana dan prasarana kantor berupa meubelair yang memadai dengan target 1 meja kerja eselon 2, meja kerja eselon 3

e. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terpenuhinya kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan rumah dinas dengan target pemeliharaan atap, lantai, kamar mandi/ WC

f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terpenuhinya kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor dengan target pemeliharaan atap, perbaikan lantai, perbaikan pintu dan jendela, pemeliharaan kolam air mancur

g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terpenuhinya kebutuhan Perbaikan dan pemeliharaan komputer, LCD, mesin ketik, alat kesenian selama 12 bulan.

**3. Program peningkatan disiplin aparatur**

a. Pengadaan pakaian Dinas dan atributnya.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terpenuhinya 35 stel PSL, 2 stel PDU & Atribut, 16 stel PSR, 12 stel PDH Bupati & Wabup, 25 stel PDH Spri, 16 stel Batik Bupati & Wabup, PSL kabag dan Asisten, PDH Karyawan karyawati setda.

**4. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**

a. Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia).

Kegiatan dimaksud memiliki capaian keikutsertaan kabupaten Temanggung sebagai anggota APKASI dan FORSESDASI dengan target 12 bulan.

- b. Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ LPND dan peringatan hari besar dengan target 12 bulan.

Untuk tahun 2018 Bagian Umum telah merencanakan 1 Urusan, 4 program, 23 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung Rp. 27.355.000.000,-. Sedangkan untuk belanja tidak langsung yang terdiri dari gaji dan TPP sebesar Rp. 12.212.231.508, sehingga total anggaran pada Bagian Umum sejumlah Rp. 39.567.231.508,-

## **BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA**

### **BELANJA LANGSUNG**

#### **I.FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN**

##### **1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

- a. Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kerja Bupati Tahun 2018 dan Penyusunan Ikjip Bupati Tahun 2017.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya dokumen Penetapan Kinerja Bupati 2018 dan laporan kinerja Bupati Tahun 2017 dengan target 2 dokumen.

- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD dengan target 3 dokumen.

#### **II.FUNGSI LAINNYA SETDA**

##### **2. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah**

- a. Pengembangan budaya kerja dan integritas aparatur.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya sosialisasi dan penerapan pengembangan budaya kerja dan integritas aparatur dengan target 1 kegiatan.

##### **3. Program pembinaan dan pengembangan aparatur**

- a. Analisis Beban Kerja.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersusunnya dokumen Analisis Beban Kerja dengan target 1 dokumen.

b. Survey IKM atas pelayanan publik.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya dokumen pelaporan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat di 150 Satuan pendidikan.

c. Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya 1dokumenn Standar Kompetensi Manajerial untuk seluruh jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten Temanggung.

d. pelatihan pelayanan prima.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terlaksananya kegiatan bimtek pelayanan Prima dengan target 100 organisasi perangkat daerah.

**4. program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**

a. Penyusunan buku Standar Indeks Harga.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian tersedianya 1 dokumen Standar Biaya Tahun 2018.

**5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**

a. Penyusunan SOP.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya kegiatan bimbingan teknis penyusunan dokumen SOP dan tersedianya 150 dokumen SOP pada satuan pendidikan.

b. Penyusunan Standar Pelayanan.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terlaksananya kegiatan bimbingan teknis penyusunan dokumen Standar Pelayanan dan tersedianya 150 dokumen SPP pada satuan pendidikan.

c. Partisipasi Lomba Pelayanan Publik.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Partisipasi penilaian lomba kinerja pelayanan publik dengan target 1 kegiatan.

d. Pembangunan Zona Integritas.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian terwujudnya komitmen pencegahan korupsi yang nyata dengan target 1 kegiatan.

Untuk tahun 2018 Bagian Organisasi dan Tatalaksana telah merencanakan 2 urusan, 5 program, dan 12 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung Rp. 1.515.000.000,-.

## **BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

### **BELANJA LANGSUNG**

#### **I. FUNGSI LAINNYA SEKRETARIAT DAERAH**

##### **1. Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media massa**

a. Kegiatan Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Tersedianya informasi melalui Majalah Gema Bhumi Phala dengan target 12.000 eksemplar MGBP.

b. Pengisian materi Website Kab. Temanggung.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Tersedianya informasi melalui website dan sms gateway serta pengelolaan konten website PD dengan target 1.200 informasi/berita/sms.

c. Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi dan media massa bagi masyarakat.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Meningkatnya informasi tentang kegiatan Pemkab di Temanggung dengan target 7 Penyebaran informasi di media massa dan luar ruang.

d. Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Meningkatnya informasi kepada masyarakat dengan target 500 release, 3.000 berita dimedia massa, 28 kerjasama dengan wartawan

e. Penyebaran Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (press tour).

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terselenggaranya kegiatan press tour dengan target 1 kegiatan.

f. Penyelenggaraan Kehumasan.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Tersebarluaskanya informasi kegiatan Pemkab dengan target 720 dokumentasi kegiatan Pemerintah Kabupaten.

g. Pembuatan buku dan video profil Kab. Temanggung.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Tersedianya buku profil dan video prof Kab. Temanggung dengan target 300/200 buku/video profil.

h. Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Temanggung.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terselenggaranya kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Temanggung dengan target 1.800 program acara siaran.

i. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio ERTE FM.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Terselenggaranya siaran di Radio ERTE FM Temanggung dengan target 1.800 program acara siaran.

Selain kegiatan diatas, pada Bagian Humas juga terdapat kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT yaitu:

j. Pengisian Materi Tayang Videotron / Pengadaan LED Videotron.

Kegiatan dimaksud memiliki capaian Tersedianya informasi melalui videotron dengan target 240 menit SPOT.

Untuk tahun 2018 Bagian Hubungan Masyarakat telah merencanakan 1 urusan, 1 program, dan 10 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung Rp. 7.256.500.000,-.



## **BAB IV PENUTUP**

Program dan Kegiatan yang dimunculkan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada tahun 2018, mempertimbangkan berbagai faktor pencapaian target baik secara langsung maupun tidak langsung, atas Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Percepatan reformasi birokrasi, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan lainnya.

Renja tahun 2018 ini juga disusun atas dasar evaluasi Renja tahun sebelumnya. Karena sangat penting untuk diketahui program/ kegiatan apa saja yang telah dan tidak memenuhi target kinerja yang telah direncanakan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan yang telah direncanakan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD, dan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja tahun lalu.

Di dalam Rencana Kerja Setda ini terkandung sasaran, kebijakan, 35 program dan 100 kegiatan dengan anggaran Rp. 42.652.231.508,- (belanja tidak langsung) serta Rp. 55.897.500.000,- sehingga total pagu anggaran sebesar Rp. 98.549.731.508,- yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 tahun. Perlu kami sampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sifatnya masih indikatif. Sehingga dalam pelaksanaannya masih disesuaikan dengan pembiayaan/ anggaran ataupun keuangan daerah yang tersedia.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rencana kerja ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan guna perbaikan dokumen tersebut. Lebih lanjut kami berharap, agar rencana kerja Sekretariat daerah kabupaten Temanggung Tahun 2018 yang tersusun untuk dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam waktu satu tahun kedepan.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. BAMBANG AROCHMAN, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580628 198703 1 005

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018. Rencana Kerja (RENJA) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Rencana Kinerja Tahunan ini juga merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2013–2018. Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2018 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan. Pada tahun 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung merencanakan 35 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 100 kegiatan baik belanja langsung maupun tidak langsung untuk mencapai 12 urusan dengan total anggaran sebesar Rp 98.549.731.508,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 42.652.231.508,- dan belanja langsung sebesar Rp 55.897.500.000,-.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah ini dibuat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. BAMBANG AROCHMAN, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580628 198703 1 005

**Tabel Usulan Program dan Kegiatan Setda  
kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan  
Perkiraan Maju Tahun 2019**



# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. A. Yani No. 32 Temanggung 56216 Telp. (0293) 491004 Fax (0293) 491040

E-mail: [info@temanggungkab.go.id](mailto:info@temanggungkab.go.id) Website: [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

### KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : / TAHUN 2017

### TENTANG

### TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

### BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2015;
  6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung adalah :
1. Menyusun, membuat Rencana Kerja maupun perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018.
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 2017

an. BUPATI TEMANGGUNG  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. BAMBANG AROCHMAN, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580628 198703 1 005

Lampiran Keputusan Bupati Temanggung  
Nomor :  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun

Rencana Kerja Sekretariat Daerah  
Kabupaten Temanggung Tahun  
2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung	Pengarah
2.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Temanggung	Ketua
3.	Kasubag Pendayagunaan Aparatur pada Bagian Ortala Setda Temanggung	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Temanggung	Anggota
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Temanggung	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Temanggung	Anggota
7.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Temanggung	Anggota
8.	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Temanggung	Anggota
9.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Temanggung	Anggota
10.	Kepala Bagian Pembangunan Setda Temanggung	Anggota
11.	Kepala Bagian Umum Setda Temanggung	Anggota
12.	Kasubag Kelembagaan pada Bagian Ortala Setda Temanggung	Anggota
13.	Kasubag Ketatalaksanaan pada Bagian Ortala Setda Temanggung	Anggota

an. BUPATI TEMANGGUNG  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. BAMBANG AROCHMAN, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580628 198703 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. A. Yani No. 32 Temanggung 56216 Telp. (0293) 491004 Fax (0293) 491040

## NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Daerah Kab. Temanggung  
Lewat Yth. : Bapak Assisten Administrasi  
D a r i : Kepala Bagian Ortala  
Tanggal : Februari 2017  
Perihal : Mohon tandatangan Surat Keputusan Sekretaris Daerah  
tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat  
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018

---

---

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bersama ini dengan hormat kami sediakan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon tanda tangan.

KEPALA BAGIAN ORTALA,

DJOKO PRASETYONO, S.Sos  
Pembina Tk. I  
NIP. 19721126199203 1 002